

RENCANA STRATEGIS

BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Tahun 2025 - 2029

*Transformasi Pariwisata Berkualitas Labuan Bajo
Flores: Destinasi Regeneratif yang Inklusif,
Berbudaya, dan Berkelanjutan*



Rencana Strategis Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores 2025 - 2029

*Transformasi Pariwisata Berkualitas Labuan Bajo Flores:
Destinasi Regeneratif yang Inklusif, Berbudaya, dan
Berkelanjutan*



Hak Cipta© Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF)

Dilarang memperbanyak/mengcopy sebagian atau keseluruhan isi laporan dalam bentuk apapun tanpa seizin dari BPOLBF. Setiap data, hasil analisis, dan lainnya yang diambil dari laporan ini untuk kebutuhan publikasi lain, harus menggunakan kutipan bersumber.

RENCANA STRATEGIS BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES 2025 - 2029

*Transformasi Pariwisata Berkualitas Labuan Bajo Flores: Destinasi Regeneratif yang Inklusif,
Berbudaya, dan Berkelanjutan*

DISUSUN OLEH

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

TIM PENYUSUN

KETUA TIM PENGARAH

Andhy MT Marpaung

Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

TIM PENGARAH

Hirwan La Anti

Kepala Satuan Pemeriksa Intern /
Plt. Direktur Pemasaran Pariwisata

Konstant Mardinandus Nandus

Direktur Destinasi Pariwisata

PENANGGUNG JAWAB

Feri Suprpto

Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata/
Plt. Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik

KETUA

Didimus Estanto Turuk

Kepala Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara

WAKIL KETUA

Yohanes Eudes Ampu

Kepala Divisi Keuangan

Sisilia Lenita Jemana

Kepala Divisi Komunikasi Publik

Maria Ririn Indriani

Plt. Kepala Divisi Umum

Elisabeth Uslyeni Rahmawati

Plt. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata

Shesar Andriawan

Kepala Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

Wiwin Iswandi Djola

Kepala Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur

Ditha Mangiri

Kepala Divisi Amenitas dan Daya Tarik Wisata

Maria Gratiani E. Badun

Kepala Divisi Investasi

SEKRETARIS

Stefanus Lobo Royman

ANGGOTA

Stefania Helmon
Maria Yulviana Dua Bela

Kareldus Agas
Yohanes Ngeo Dalung
Valerianus Mei Riwu

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, **Rencana Strategis Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Tahun 2025–2029** dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan representasi komitmen dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang terencana dan akuntabel guna merespons dinamika pembangunan pariwisata ke depan. Dokumen ini bukan sekadar sebuah rencana kerja, melainkan komitmen strategis dalam mengawal pengembangan pariwisata yang

berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di kawasan Labuan Bajo Flores, sekaligus mengembangkan Kawasan Otorita Parapuar sebagai destinasi percontohan di Pulau Flores.

Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan lima tahunan yang menjadi arah kebijakan dan tolok ukur kinerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pariwisata nasional. Penyusunannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025–2029

Labuan Bajo saat ini menempati posisi strategis sebagai bagian dari **10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional**, yang menjadi fokus pembangunan pariwisata Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing destinasi Indonesia di tingkat global. Dalam konteks tersebut, BPOLBF memiliki peran penting untuk memastikan pengembangan destinasi dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya di Labuan Bajo sebagai pintu gerbang utama, tetapi juga di 10 kabupaten di Pulau Flores, Lembata, Alor dan 2 kecamatan di Pulau Bima sebagai satu kesatuan kawasan Cagar Biosfer Komodo. Pengembangan pariwisata yang dilakukan juga pada penguatan ekonomi masyarakat lokal, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan. Prinsip keberlanjutan menjadi landasan utama dalam setiap langkah pembangunan destinasi, sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam dan identitas budaya yang menjadi kekuatan utama Labuan Bajo Flores.

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, BPOLBF terus berupaya mengantisipasi berbagai tantangan tersebut dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis keberlanjutan. Visi pengembangan Labuan Bajo Flores diarahkan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa mengorbankan kelestarian

lingkungan serta nilai-nilai budaya lokal. Secara khusus, kawasan Parapuar akan dikembangkan dengan pendekatan 3ECNC (*Ethno, Eco, Edu, Culture, Nature, and Conservation*) yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, keberagaman ekosistem, pendidikan, serta konservasi alam dalam pengelolaan destinasi wisata. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan Parapuar sebagai model pengembangan destinasi berkelanjutan yang memberikan pengalaman wisata yang autentik sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Seluruh program strategis BPOLBF juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk **Asta Cita Presiden Republik Indonesia**, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Lebih jauh, pengembangan Labuan Bajo Flores sebagai destinasi pariwisata kelas dunia merupakan bagian dari kontribusi nyata menuju **Indonesia Emas 2045**, yaitu visi besar Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Kami berharap Dokumen Rencana Strategis BPOLBF Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi panduan arah pembangunan sekaligus koridor tindakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores dan Kawasan Otorita Parapuar. Dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, kami yakin kawasan ini dapat tumbuh sebagai destinasi unggulan dunia yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen strategis ini. Semoga dokumen ini menjadi pijakan yang kokoh dalam mewujudkan masa depan pariwisata Labuan Bajo Flores yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Labuan Bajo, September 2026



Andhy M.T. Marpaung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
DISUSUN OLEH	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB 1: PENDAHULUAN.....	13
1.1 Kondisi Umum Pariwisata	13
1.2 Potensi dan Permasalahan	16
1.2.1 Potensi Sektor Pariwisata Labuan Bajo Flores	16
1.2.2 Permasalahan Pariwisata	20
1.3 Trend Kepariwisataaan	40
1.3.1 Tren Umum Pariwisata Global dan Asia-Pasifik.....	40
1.3.2 Tren Pola Perjalanan dan Konektivitas	40
1.3.3 Tren Perhotelan	41
1.3.4 Profil Wisatawan	42
1.4 Proyeksi Pengembangan Ekosistem Kepariwisataaan di Labuan Bajo Flores.....	45
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BPOLBF	49
2.1 Visi	49
2.2 Misi	49
2.3 Tujuan.....	50
2.4 Sasaran Strategis	52
2.5 Struktur Organisasi	55
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	58
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	58
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata	60
3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOLBF di Wilayah Otoritatif.....	63
3.2.1.1 Landasan Strategis dan Tujuan Pengembangan Kawasan Parapuar.....	63
3.2.1.2 Konsep, Zonasi, dan Pelibatan Masyarakat.....	66

3.2.1.3 Legalitas, Peluang Investasi, dan Infrastruktur Penunjang	69
3.2.1.4 Pengelolaan Kawasan Parapuar	74
3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan di Wilayah Koordinatif	82
3.3 Kerangka Regulasi Kementerian Pariwisata dan BPOLBF	99
3.4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan BPOLBF	100

BAB IV TARGET KINERJA, PROGRAM KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	115
4.1 Target Kinerja	115
4.2. Kerangka Pendanaan	122
BAB V PENUTUP	126
5.1 Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan BPOLBF	128
5.2 Manual IKU	130
5.3. Rincian Program Kerja dan Alokasi Anggaran BPOLBF Tahun 2029	141
5.4 Matriks Kerangka Regulasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	143
5.5 Matriks Pendanaan Hibah Luar Negeri BPOLBF	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kinerja Indonesia dalam TTDI 2024	16
Tabel 1.2	Sasaran Program dan Realisasi dalam Renstra BPOLBF 2020 – 2024	37
Tabel 1.3	Tren Perhotelan Asia-Pasifik 2024–2025	42
Tabel 1.4	Tren Profil Wisatawan Global tahun 2024-2025	43
Tabel 2.1	Tugas & Fungsi BPOLBF	50
Tabel 2.2	Sasaran Strategis BPOLBF	53
Tabel 3.1	Sebaran Klaster Berdasarkan Fungsi/Tema Tapak, Fungsi Bangunan dan Luas Tapak	69
Tabel 3.2	Hasil Pemetaan Potensi Pengembangan Tematik, Daya Tarik Unggulan, Event Strategis dan Produk Unggulan / Rantai Pasok Wilayah Koordinatif BPOLBF	83
Tabel 3.3	Pemetaan Key Tourism Area Wilayah Koordinatif BPOLBF	86
Tabel 3.4	Pengembangan Industri & Kelembagaan Wilayah Koordinatif BPOLBF	90
Tabel 3.5	Pengembangan Destinasi Wilayah Koordinatif BPOLBF	93
Tabel 3.6	Pengembangan Pemasaran Wilayah Koordinatif BPOLBF	95
Tabel 3.7	Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Pariwisata	98
Tabel 3.8	Matriks Kerangka Regulasi BPOLBF	98
Tabel 4.1.	Target Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029	114
Tabel 4.2.	Target Kegiatan Prioritas Kementerian Pariwisata Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 Khusus untuk Labuan Bajo	116
Tabel 4.3	Target Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Tahun 2025-2029	119
Tabel 4.4	Target Kinerja BPOLBF Tahun 2025-2029	120
Tabel 4.5	Kebutuhan Pendanaan Program Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hasil Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) BPOLBF	18
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BPOLBF	55
Gambar 3.1	Gambar Peta Status Kawasan Otoritatif BPOLBF	62
Gambar 3.2	Gambar Peta Klaster/ Peruntukan Lahan (Sub Kawasan / Zona 1 Parapuar)	71
Gambar 3.3	Pemetaan Key Tourism Area Wilayah Koordinatif BPOLBF	87
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata	100
Gambar 4.1	Infografis Pohon Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur pada Level : Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP)	118
Gambar 4.2	Infografis Diagram Kegiatan pada Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Dikaitkan dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program	118

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Grafik 1.1 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Wilayah Provinsi NTT Tahun 2024–2025	13
Grafik 1.2	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Wilayah Koordinatif BPOLBF Tahun 2024–2025	14
Grafik 1.3	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Labuan Bajo Tahun 2021–2025	15
Grafik 1.4	Prediksi Pertumbuhan Wisatawan 2026-2029 Berdasarkan Pola Tren	45
Grafik 1.5	Prediksi Pertumbuhan Wisatawan 2026-2029 Berdasarkan Pertumbuhan stabil 7%	46

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Pariwisata

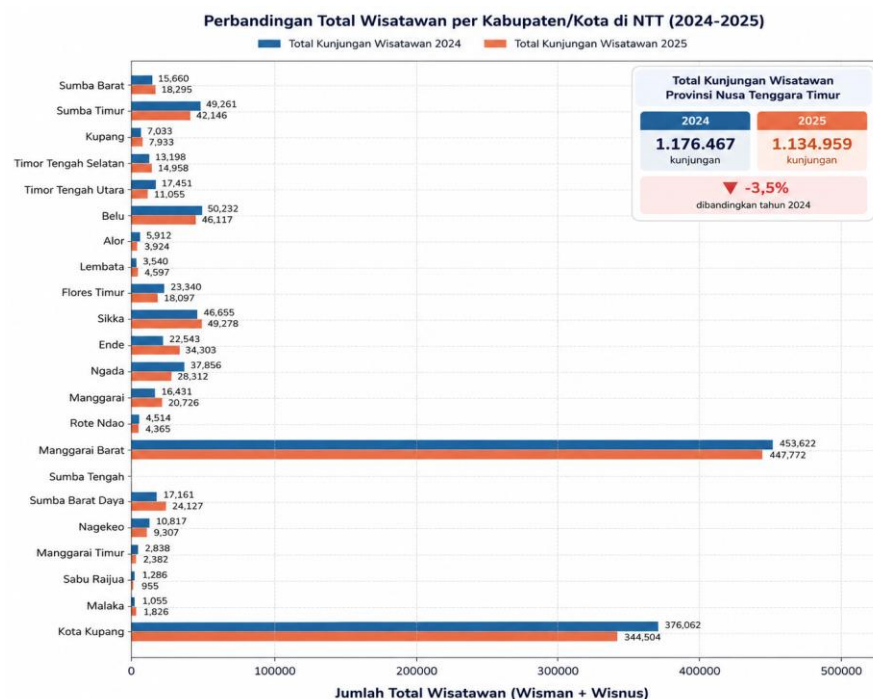
Pada tahun 2025, sektor pariwisata di Indonesia menempati posisi strategis sebagai salah satu motor penggerak transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Labuan Bajo, menjadi salah satu simpul utama pengembangan destinasi pariwisata unggulan nasional. Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan sekaligus sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta termasuk dalam 5 destinasi super prioritas yang mendapat perhatian intensif dari pemerintah pusat.

Keunggulan Labuan Bajo terletak pada kombinasi daya tarik alam dan budaya yang unik. Keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO, keanekaragaman hayati laut yang tinggi, lanskap pulau-pulau eksotis, dan warisan budaya masyarakat Flores menjadi modal dasar dalam mengembangkan destinasi ini sebagai pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan pariwisata di kawasan ini juga ditopang oleh investasi infrastruktur strategis, termasuk pembangunan Bandara Internasional Komodo, peningkatan pelabuhan, penataan kawasan Marina, serta pengembangan jaringan jalan dan amenities.

Namun demikian, potensi besar ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, antara lain: kesenjangan antarwilayah, ketergantungan pada pariwisata berbasis alam (*ecotourism*) yang rentan terhadap isu keberlanjutan, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata, serta minimnya integrasi destinasi antara Labuan Bajo dengan wilayah lainnya di Pulau Flores, Lembata, Alor, dan Kecamatan Sape dan Lambu di Kabupaten Bima. Hal ini mendorong perlunya pendekatan pembangunan destinasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis daya dukung lingkungan.

Dari sisi kinerja kunjungan wisatawan, perkembangan pariwisata di NTT menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap wilayah. Berdasarkan data pada Grafik 1.1 Perbandingan Total Wisatawan per Kabupaten/Kota di NTT, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak **1.176.467 kunjungan pada tahun 2024**, kemudian menurun menjadi **1.134.959 kunjungan pada tahun 2025**, atau mengalami penurunan sebesar **3,5%**. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di tingkat provinsi belum berlangsung secara merata, dengan sebagian kabupaten/kota mengalami peningkatan kunjungan, sementara wilayah lainnya mengalami penurunan. Pada tingkat

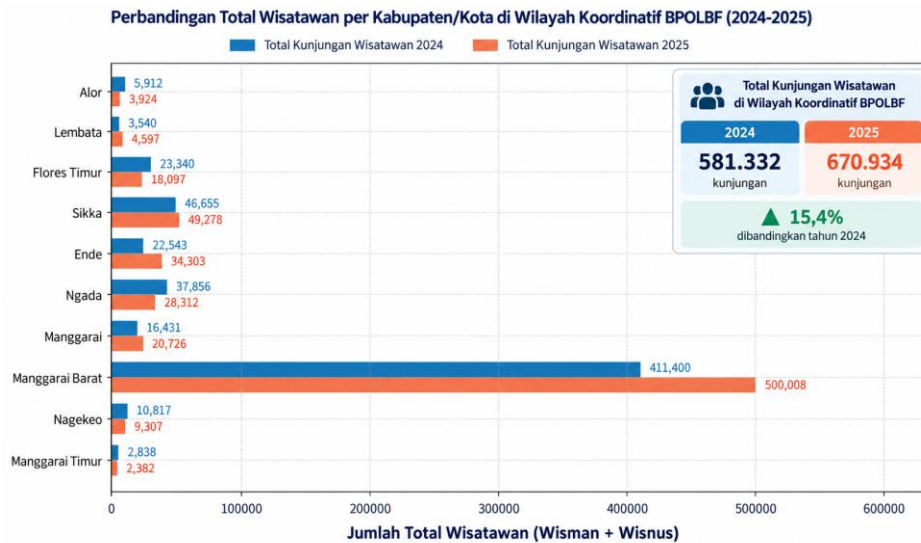
Provinsi NTT jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan masih relatif terkonsentrasi pada beberapa Kabupaten/kota yakni Manggarai Barat dan Kota Kupang dengan jumlah kunjungan tertinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aktivitas pariwisata NTT masih banyak bertumpu pada wilayah yang memiliki fungsi sebagai pusat akses, pintu masuk wisatawan, serta destinasi unggulan. Oleh karena itu, penguatan konektivitas, pengembangan produk wisata yang beragam, serta pengembangan destinasi alternatif menjadi penting untuk memperluas distribusi pergerakan wisatawan dan mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata di seluruh wilayah NTT.



Grafik 1.1 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Wilayah Provinsi NTT Tahun 2024–2025

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Data diolah oleh BPOLBF (2025)

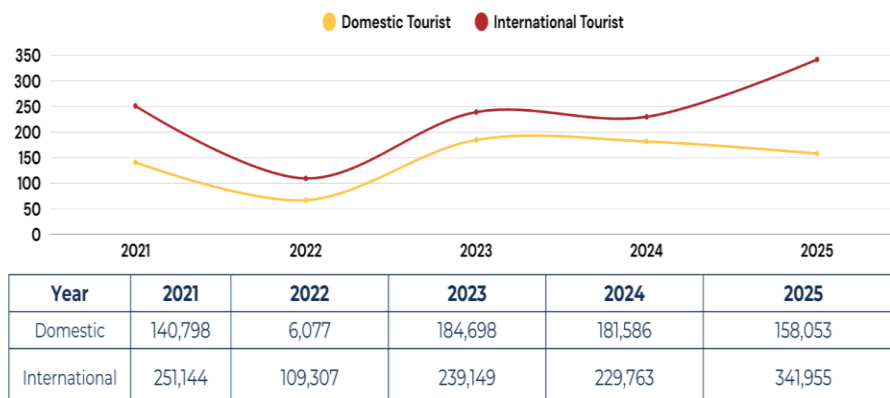
Dalam konteks wilayah koordinatif BPOLBF, yang mencakup Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat, perkembangan kunjungan wisatawan menunjukkan kecenderungan yang lebih positif. Berdasarkan grafik 1.2 Perbandingan Total Wisatawan per Kabupaten/Kota di Wilayah Koordinatif BPOLBF Tahun 2024–2025, total kunjungan wisatawan meningkat dari **581.332 kunjungan pada tahun 2024 menjadi 670.934 kunjungan pada tahun 2025**, atau tumbuh sebesar **15,4%**. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara agregat Provinsi NTT mengalami penurunan, **wilayah koordinatif BPOLBF justru mencatat pertumbuhan positif** terutama ditopang oleh peningkatan kunjungan di Kabupaten Manggarai Barat seperti pada grafik berikut:



Grafik 1.2 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Wilayah Koordinatif BPOLBF Tahun 2024–2025

Sumber: Data diolah oleh BPOLBF (2025)

Dari sisi kinerja kunjungan, data menunjukkan bahwa Labuan Bajo/Manggarai Barat masih menjadi pusat pertumbuhan utama pariwisata dalam wilayah koordinatif BPOLBF. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencatat selama periode 2021–2025, jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan perkembangan yang dinamis, dari 391.942 kunjungan pada tahun 2021, turun menjadi 115.384 kunjungan pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi **423.847 kunjungan pada tahun 2023** dan sedikit menurun menjadi **411.349 kunjungan pada tahun 2024**. **Pada tahun 2025, jumlah kunjungan kembali meningkat signifikan menjadi 500.008 wisatawan**, hal ini menunjukkan pemulihan sekaligus penguatan performa sektor pariwisata di kawasan ini. Di sisi lain, pembukaan rute penerbangan internasional langsung dari Singapura dan Malaysia pada tahun 2024 memberikan sinyal positif terhadap peningkatan konektivitas serta potensi perluasan pasar wisatawan mancanegara. Tren tersebut menunjukkan bahwa Labuan Bajo tidak hanya mengalami pemulihan jumlah kunjungan, tetapi juga mengalami penguatan posisi sebagai destinasi internasional. Pertumbuhan kunjungan wisatawan dapat dilihat melalui Grafik 1.3 berikut.



Grafik 1.3 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Labuan Bajo Tahun 2021–2025

Sumber: Data diolah oleh BPOLBF (2025)

Sebagai lembaga yang memiliki mandat pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pembangunan pariwisata di kawasan ini berlangsung secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk itu, periode 2025–2029 merupakan fase penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan dan ekosistem pariwisata yang tangguh guna mendorong kontribusi sektor ini dalam pencapaian transformasi ekonomi wilayah dan nasional. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari langkah strategis menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi Sektor Pariwisata Labuan Bajo Flores

Sektor pariwisata di kawasan Labuan Bajo–Flores menunjukkan potensi multidimensional yang signifikan, melampaui daya tarik ikonis Taman Nasional Komodo. Kawasan ini tidak hanya dikenal karena keunikan satwa purba Komodo dan lanskap alam yang eksotis, tetapi juga karena posisinya yang strategis dalam kerangka Segitiga Pariwisata Bali–NTB–NTT, yang membuka peluang besar untuk kolaborasi lintas wilayah, khususnya dalam pengembangan geowisata melalui jejaring geopark nasional seperti Batur, Rinjani, Tambora, dan Kelimutu.

Dalam konteks kebijakan pariwisata nasional, peran Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menjadi krusial sebagai entitas yang mengorkestrasi pengembangan pariwisata secara terintegrasi. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bertugas

menyusun pedoman pembangunan, mengkoordinasikan rencana multi-pihak, memperkuat tata kelola destinasi, serta memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam rantai nilai pariwisata. Peran ini sangat relevan untuk mewujudkan Labuan Bajo Flores sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan.

Salah satu peluang strategis dalam konteks global adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar AS, yang berdampak positif terhadap peningkatan daya saing pariwisata Indonesia secara umum. Dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau bagi wisatawan mancanegara, Indonesia, termasuk Labuan Bajo, menjadi destinasi yang semakin kompetitif di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir memperkuat asumsi ini. Data menunjukkan bahwa kunjungan ke Labuan Bajo mencapai 423.847 wisatawan pada tahun 2023 dan 411.349 pada tahun 2024, yang mencerminkan antusiasme tetap tinggi meskipun terdapat fluktuasi eksternal. Tren ini berlanjut pada tahun 2025 dengan lonjakan signifikan hingga mencapai 500.008 kunjungan, menandakan pemulihan yang semakin kuat sekaligus meningkatnya daya tarik destinasi di pasar global.

Berdasarkan hasil *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) 2024 yang dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam performa sektor pariwisata, naik dari peringkat 36 pada 2019 menjadi peringkat 22 pada 2024, dengan peningkatan skor sebesar 4,5%. Kenaikan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan peningkatan tertinggi secara global. Berikut adalah tabel ringkasan kinerja Indonesia dalam TTDI 2024.

Tabel 1.1. Kinerja Indonesia dalam TTDI 2024

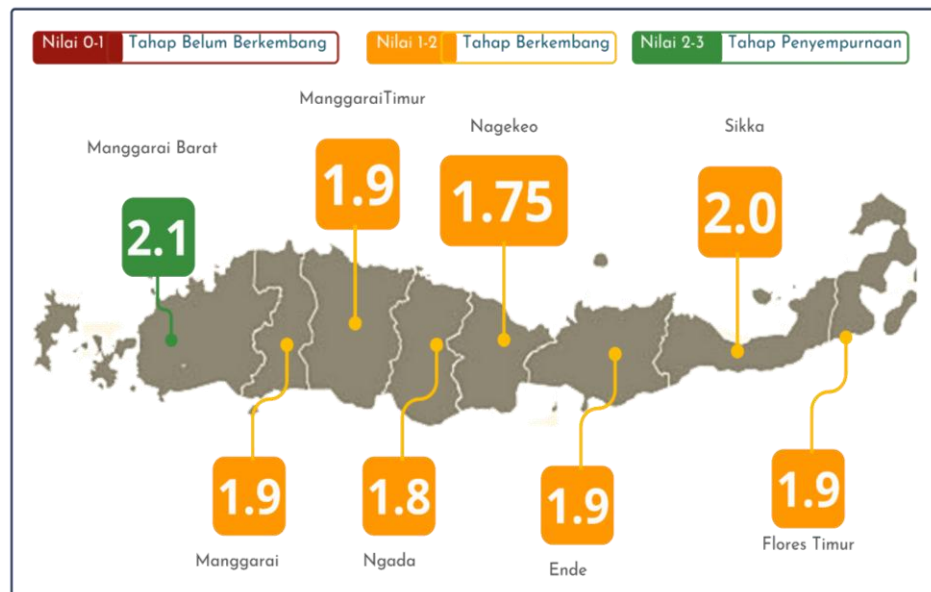
Aspek	Nilai / Informasi
Peringkat Global (2024)	22 (Indonesia naik 10 peringkat dari posisi sebelumnya [peringkat 32 pada 2021])
Skor TTDI 2024	4,46 (skala 1–7)
Peningkatan Skor (2019–2024)	+4.5%
Peningkatan Peringkat	+14 posisi
Kategori Pendapatan	Upper-middle income economy
Wilayah	Asi-Pacific
Kontribusi ke Kuartil Atas TTDI	Ya (bersama China, Brazil, dan Türkiye)
Pilar yang Paling Unggul	Natural & Cultural Resources
Area Perbaikan Utama	Infrastruktur, SDM pariwisata, berkelanjutan

Sumber: Travel & Tourism Development Index, World Economic Forum (2024)

Salah satu pendorong utama peningkatan skor Indonesia dalam TTDI adalah pilar "*Natural and Cultural Resources*", yang menilai keberadaan dan pemanfaatan potensi alam dan budaya dalam sektor pariwisata. Pilar ini sangat relevan dengan Labuan Bajo, yang memiliki warisan alam kelas dunia dan nilai-nilai budaya yang masih hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Namun demikian, laporan TTDI juga menggarisbawahi bahwa banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam penguatan infrastruktur, kapabilitas SDM, dan sistem tata kelola yang mendukung keberlanjutan.

Pilar *ICT Readiness* mengalami pertumbuhan global sebesar 7,2%, yang mencerminkan peran penting digitalisasi dalam pemasaran dan pengelolaan destinasi. Hal ini memberikan peluang besar bagi Labuan Bajo untuk mengoptimalkan promosi digital melalui platform seperti Tourism 2.5.0 dan Calendar of Events, sebagaimana telah ditetapkan dalam program *quick wins* nasional.

Selain itu berdasarkan Hasil pengukuran *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) versi lokal yang disusun oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (lihat Gambar 1.1); menunjukkan potret kesiapan dan daya saing destinasi pariwisata di wilayah koordinatif Flores Raya. Penilaian ini dilakukan terhadap delapan kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur, menggunakan pendekatan berbasis empat pilar utama: Produk, Infrastruktur, Regulasi, dan Pendukung. Skor TTCI diberikan dalam skala 0–3, dengan kategorisasi tahap: Belum Berkembang (0–1), Berkembang (1–2), dan Penyempurnaan (2–3). Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih berada pada *Tahap Berkembang*, dengan hanya Manggarai Barat (2.1) dan Sikka (2.0) yang telah memasuki *Tahap Penyempurnaan*.



Gambar 1.1 Hasil Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) BPOLBF

Sumber: Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI), BPOLBF (2022)

Kabupaten Manggarai Barat, yang menaungi destinasi utama Labuan Bajo, memperoleh skor tertinggi yaitu 2.1, mencerminkan tingkat kesiapan destinasi yang lebih matang. Skor ini menunjukkan kekuatan yang signifikan pada aspek kualitas produk wisata, infrastruktur pariwisata seperti aksesibilitas bandara dan pelabuhan, regulasi yang mendukung iklim investasi dan keberlanjutan, serta sistem pendukung seperti keamanan, ICT, dan SDM. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah pusat melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, pengelolaan kawasan otoritatif oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, serta kolaborasi multi stakeholder dalam penguatan tata kelola dan promosi. Di sisi lain, kabupaten-kabupaten seperti Nagekeo (1.75), Ngada (1.8), dan Manggarai Timur (1.9) menunjukkan skor TTCI yang masih berada di bawah ambang penyempurnaan, mengindikasikan kebutuhan akan peningkatan layanan wisata, konektivitas antar wilayah, dan keterlibatan masyarakat lokal.

Hasil TTCI Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores ini memberikan pemetaan penting bagi arah pembangunan destinasi pariwisata yang lebih terarah dan berkelanjutan. Skor TTCI menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, sekaligus mendorong pendekatan integratif berbasis data dalam penyusunan rencana aksi di tingkat regional. Dengan menjadikan Labuan Bajo (Manggarai Barat) sebagai *hub utama*, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores memiliki peluang besar untuk memfasilitasi pemerataan pengembangan destinasi di seluruh Flores Raya melalui program pendampingan, konektivitas antar destinasi satelit,

penguatan SDM dan kelembagaan, serta penerapan prinsip keberlanjutan yang inklusif dalam setiap lini pengembangan pariwisata.

Disisi lain dalam upaya penyempurnaan hal tersebut, Labuan Bajo juga memiliki prospek substantif dalam diversifikasi produk pariwisata melalui pengembangan pendekatan tematik. Potensi ini mencakup:

- 1) Pariwisata budaya, dengan menonjolkan kekayaan tradisi dan nilai-nilai lokal masyarakat Flores.
- 2) Pariwisata gastronomi, dengan mengeksplorasi kuliner khas berbasis bahan pangan lokal.
- 3) Pariwisata kopi dan agrikultur, sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis lahan dan komunitas.
- 4) Pariwisata religi dan spiritual, yang memperkaya kedalaman pengalaman wisatawan.

Diversifikasi ini tidak hanya memperluas segmentasi pasar wisata, tetapi juga memperdalam kualitas pengalaman wisatawan serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan masuknya investasi pada sarana dan prasarana pariwisata, potensi Labuan Bajo semakin diperkuat dengan aksesibilitas global yang lebih baik, termasuk dengan pembukaan rute penerbangan internasional dari Singapura dan Malaysia pada tahun 2024.

Dalam kerangka jangka panjang, visi BPOLBF untuk menjadikan Labuan Bajo Flores sebagai destinasi wisata berkelas dunia dan berkelanjutan menjadi fondasi utama pembangunan. Dimensi keberlanjutan yang diusung tidak hanya mencakup pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan penciptaan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. Semua inisiatif ini selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, serta mendukung transformasi ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata yang inklusif, resilien, dan berdaya saing tinggi.

1.2.2 Permasalahan Pariwisata

a. Permasalahan Pariwisata Global

Pariwisata global saat ini menghadapi serangkaian isu dan permasalahan kompleks yang memengaruhi keberlanjutannya dan dampaknya secara keseluruhan. Salah satu isu utama adalah dampak lingkungan. Pertumbuhan pesat pariwisata telah menyebabkan degradasi lingkungan di banyak destinasi, termasuk polusi, hilangnya habitat alami, dan tekanan berlebihan pada sumber daya alam seperti air. Sebagai contoh, pembangunan resor yang tidak terkendali di Bali telah menyebabkan erosi

pantai dan mengancam kehidupan laut (Greenly, 2025). Selain itu, transportasi pariwisata, terutama penerbangan, menyumbang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan mempercepat perubahan iklim. Pada tahun 2025, diperkirakan bahwa sektor pariwisata menyumbang sekitar 8% dari emisi gas rumah kaca global, dengan transportasi sebagai kontributor terbesar (Mindful Ecotourism, 2025).

Isu lain yang signifikan adalah *overtourism*, terutama di destinasi populer. Kota-kota seperti Venesia dan Bali mengalami masalah kepadatan wisatawan yang ekstrem, yang memberikan tekanan pada infrastruktur lokal, mengganggu kehidupan penduduk setempat, dan mengurangi kualitas pengalaman wisatawan (Idebiz, 2025). Data dari UN Tourism menunjukkan bahwa pada tahun 2024, kedatangan turis internasional hampir pulih ke tingkat pra-pandemi, mencapai sekitar 1,4 miliar orang (UN Tourism, 2025). Pertumbuhan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memperburuk masalah *overtourism* di banyak tempat.

Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga menjadi tantangan, semakin banyak wisatawan yang mencari pengalaman yang lebih otentik, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat lokal (Idebiz, 2025). Survei menunjukkan bahwa 84% wisatawan global menganggap penting untuk bepergian secara berkelanjutan pada tahun 2025, dan sepertiga dari mereka telah menginap di akomodasi berkelanjutan dalam setahun terakhir (Radical Storage, 2025). Hal ini menuntut industri pariwisata untuk beradaptasi dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta bencana alam, juga merupakan permasalahan yang mempengaruhi pariwisata global. Inflasi dan kenaikan biaya hidup dapat membatasi kemampuan orang untuk bepergian, sementara ketidakstabilan politik dan masalah keamanan dapat mengurangi minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi tertentu (Hospitality Management Jobs, 2025). Bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan juga dapat menghancurkan infrastruktur pariwisata dan memaksa pembatalan perjalanan.

Menghadapi isu-isu ini, masa depan pariwisata global diperkirakan akan berfokus pada keberlanjutan dan inovasi teknologi. Pariwisata berkelanjutan menjadi semakin penting, dengan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, mendukung ekonomi lokal, dan melestarikan budaya. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) juga diharapkan memainkan peran yang lebih besar dalam personalisasi pengalaman perjalanan dan meningkatkan efisiensi operasional (James Hallam, 2025). Dengan demikian, adaptasi terhadap tantangan-tantangan ini akan menentukan arah dan

keberhasilan industri pariwisata di masa depan.

Perkembangan sektor pariwisata global pada tahun 2025 berada dalam lanskap yang sangat kompleks akibat interaksi berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika geopolitik, persaingan pasar global, dan eskalasi perang dagang. Meskipun data menunjukkan adanya pemulihan signifikan pasca-pandemi, seperti peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB global hingga mencapai USD 11,7 triliun atau 10,3% dari total PDB dunia, proses pemulihan ini tidak berlangsung merata dan sangat rentan terhadap ketidakpastian global.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi dan politik global. Dengan demikian, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan pendekatan multidisipliner dan lintas sektoral yang menekankan pada stabilitas kebijakan, diplomasi internasional yang konstruktif, serta ketahanan terhadap risiko global. Hanya melalui sinergi antara aktor negara dan non-negara, sektor ini dapat tumbuh secara inklusif dan resilien di tengah dinamika global yang terus berubah.

Eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah dan krisis energi global membawa dampak sistemik yang signifikan bagi stabilitas pariwisata di Labuan Bajo. Sebagai destinasi yang sangat bergantung pada pasar mancanegara, khususnya dari Eropa, gangguan pada wilayah Timur Tengah bukan sekadar isu keamanan regional, melainkan disrupti pada jalur konektivitas utama. Timur Tengah merupakan *hub* transit internasional terbesar bagi penerbangan dari Eropa menuju Asia Tenggara. Ketidakpastian situasi udara dan peningkatan biaya avtur akibat krisis energi global secara langsung menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat dan potensi pembatalan perjalanan. Bagi Labuan Bajo, kondisi ini sangat kritis karena dapat menurunkan angka kunjungan wisatawan pasar premium Eropa yang selama ini menjadi kontributor utama terhadap durasi tinggal (*Length of Stay*) dan belanja wisatawan di kawasan.

Selain itu Pariwisata global pada tahun 2025 berada dalam persimpangan kompleksitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik, dinamika persaingan pasar yang intens, dampak sisa perang dagang, hingga pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Interaksi dari isu-isu ini secara signifikan membentuk arah dan pembangunan sektor pariwisata di seluruh dunia.

1) Ketegangan Geopolitik dan Disrupsi Jalur Penerbangan Global

Ketegangan geopolitik yang meluas, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga

ketidakstabilan di Asia Selatan, menciptakan efek domino pada industri penerbangan. Selain penurunan kunjungan langsung ke wilayah konflik, dampak paling dirasakan oleh destinasi seperti Labuan Bajo adalah terganggunya jalur transit utama di hub Timur Tengah. Hal ini memaksa maskapai melakukan pengalihan rute yang lebih jauh, meningkatkan waktu tempuh, serta menaikkan biaya operasional. Situasi ini memicu kerentanan bagi wisatawan mancanegara jarak jauh (*long-haul*) dalam memutuskan rencana perjalanan mereka ke Asia Tenggara.

2) Krisis Energi dan Ketidakpastian Ekonomi Makro

Ketidakpastian ekonomi global telah mempengaruhi perilaku wisatawan. Di Amerika Serikat, perjalanan bisnis menurun sebesar 9% pada April 2025, terutama dari Eropa Barat dan Meksiko, akibat kekhawatiran terhadap kebijakan tarif dan penahanan di perbatasan. Meskipun perjalanan rekreasi meningkat selama liburan Paskah, proyeksi untuk musim panas menunjukkan penurunan pemesanan sebesar 12% dari Eropa. Di sisi lain, Kanada mengalami boikot terhadap perjalanan ke AS, dengan penurunan pemesanan penerbangan sebesar 71–76% pada Maret 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi sektor pariwisata AS.

Fluktuasi harga energi global yang dipicu oleh konflik antarnegara telah mendorong inflasi pada komponen biaya transportasi pariwisata. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan avtur memicu kenaikan harga tiket pesawat domestik dan internasional, yang berpotensi menurunkan daya saing harga destinasi. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya daya beli masyarakat global akibat kenaikan biaya hidup, sehingga wisatawan cenderung lebih selektif dan sensitif terhadap harga, yang dapat menggeser preferensi mereka dari destinasi premium ke pilihan yang lebih ekonomis.

3) Eskalasi Perang Dagang dan Proteksionisme Kebijakan

Kebijakan perdagangan yang agresif, seperti tarif tambahan yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump pada awal 2025, telah memicu ketegangan dagang dengan negara-negara mitra utama. Hal ini berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan internasional ke AS sebesar 11.6% pada Maret 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penurunan signifikan dari negara-negara seperti Jerman (28%), Spanyol (25%), dan Inggris (18%). Selain itu, proyeksi menunjukkan bahwa perang dagang dapat menyebabkan penurunan

kunjungan internasional ke AS sebesar 12.7% dan pengeluaran wisatawan internasional sebesar 12.3% pada 2025, yang setara dengan kerugian sekitar \$22 miliar.

Persaingan pasar global semakin kompleks dengan adanya kebijakan perdagangan agresif dan pemberlakuan tarif tambahan antar negara maju. Perang dagang tidak hanya mempengaruhi arus logistik pariwisata, tetapi juga menciptakan sentimen proteksionisme yang membatasi mobilitas lintas batas. Kebijakan tarif yang memicu ketegangan diplomatik seringkali diikuti dengan penurunan signifikan kunjungan wisatawan dari negara-negara mitra dagang utama, yang secara agregat dapat merugikan ekspor jasa pariwisata nasional dan menghambat target pencapaian devisa negara di tahun 2025-2026.

b. Permasalahan Pariwisata Nasional

Pembangunan sektor pariwisata nasional merupakan bagian integral dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, sejumlah permasalahan strategis masih menghambat pencapaian visi tersebut, terutama pada empat pilar utama pembangunan.

1) Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK

Pada Pilar Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, sektor pariwisata nasional menghadapi tantangan serius terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan destinasi wisata baru. Minimnya pelatihan berbasis kompetensi serta rendahnya penguasaan teknologi digital dalam industri pariwisata memperburuk kondisi ini. Akibatnya, daya saing pariwisata Indonesia melemah dalam menghadapi persaingan global, dan hal tersebut tidak sejalan dengan misi besar Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya SDM unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, pengembangan sektor pariwisata nasional masih menghadapi kendala dalam penerapan prinsip CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*) secara menyeluruh di berbagai destinasi. Selain itu, pengelolaan daya dukung (*carrying capacity*) destinasi yang belum optimal meningkatkan risiko kerusakan lingkungan akibat overtourism. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas pengalaman wisatawan, tetapi juga mempercepat

degradasi lingkungan.

3) Penerapan CHSE di Destinasi Wisata

Pemerataan pembangunan, sektor pariwisata nasional masih mengalami ketimpangan yang signifikan, terutama dalam hal infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Salah satu persoalan utama adalah mahalnya harga tiket penerbangan antardaerah, terutama menuju destinasi wisata di kawasan Indonesia Timur, seperti Labuan Bajo, Wakatobi, dan Raja Ampat, yang sering kali jauh lebih mahal dibandingkan penerbangan ke destinasi internasional. Selain itu, akses antar destinasi wisata dalam satu kawasan pun masih belum memadai, dengan keterbatasan transportasi darat, laut, maupun udara yang menghambat pergerakan wisatawan. Ketimpangan ini memperbesar kesenjangan antarwilayah, mengurangi minat kunjungan ke destinasi non-mainstream, dan menghambat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

4) Kurangnya Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi yang Terpadu

Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan memainkan peran krusial dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Lemahnya tata kelola, seperti minimnya koordinasi antar sektor dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya data berbasis bukti dan sistem monitoring, mengakibatkan pengembangan pariwisata yang tidak tepat sasaran. Dampaknya, efektivitas pembangunan jangka panjang berkurang dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang adaptif, inklusif, serta berbasis bukti. Untuk memperkuat ketahanan nasional, diperlukan perbaikan tata kelola yang melibatkan kolaborasi multisektor, peningkatan transparansi data, dan pemberdayaan masyarakat agar pembangunan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

Berbagai permasalahan timbul di tengah sejumlah capaian dan peluang yang diraih oleh sektor pariwisata. Permasalahan tersebut mencakup tantangan struktural, kelembagaan, dan isu keberlanjutan yang dapat menghambat kinerja pembangunan pariwisata pada jangka menengah dan panjang. Identifikasi masalah ini menjadi sangat krusial sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam kerangka Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029. Permasalahan sektor pariwisata tersebut diklasifikasikan menjadi 4 (empat) poin, yaitu:

1. Pengelolaan Destinasi, Tata Kelola, dan Strategi Pemasaran

Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan destinasi, tata kelola, dan

strategi pemasaran menjadi aspek krusial dalam upaya mengembangkan pariwisata nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan daya tarik wisata yang sangat potensial, optimalisasinya masih terhambat oleh berbagai tantangan, seperti (1) divergensi antara perencanaan dan implementasi peta jalan pariwisata di lapangan, (2) rendahnya kapasitas dan kualitas tata kelola destinasi, (3) degradasi budaya lokal akibat kurang meratanya penyebaran wisatawan dan akulturasi budaya wisatawan, (4) keterbatasan data dukung destinasi, terutama di kawasan timur Indonesia, dan (5) minimnya pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan. Tantangan-tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya krisis global, pandemi, dan dampak perubahan iklim yang berpotensi mengganggu keberlanjutan destinasi pariwisata dalam jangka panjang.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM dalam industri pariwisata merupakan salah satu tantangan utama yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sektor ini, khususnya di era digital dan dalam konteks keberlanjutan. Kualitas SDM sangat menentukan pengalaman wisatawan, mulai dari kompetensi, keramahan, hingga kebersihan dan pelayanan destinasi pariwisata. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar, seperti rendahnya kesejahteraan pekerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang dan keahliannya. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas layanan dan daya saing destinasi pariwisata. Di sisi lain, disrupsi teknologi, seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi, turut mengubah kebutuhan dan struktur tenaga kerja di sektor ini. Sementara itu, kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi krisis, seperti pandemi atau guncangan ekonomi, masih terbatas, termasuk dari sisi jaminan sosial dan fleksibilitas model bisnis.

Peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata juga menjadi isu penting, karena partisipasi masyarakat lokal berperan besar dalam menciptakan layanan yang otentik dan berkelanjutan. Tanpa manajemen SDM yang adaptif, inklusif, dan berbasis kompetensi, sektor pariwisata berisiko menghadapi stagnasi kualitas layanan serta ketimpangan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, penguatan strategi pengelolaan SDM berbasis digital, pelatihan vokasional, dan perlindungan

kesejahteraan pekerja perlu menjadi bagian integral dalam penyusunan kebijakan pariwisata nasional.

3. Aksesibilitas, Amenitas, dan Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Destinasi

Aksesibilitas dan amenities merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Di banyak daerah, keterbatasan infrastruktur transportasi udara, darat, dan laut yang terjangkau membatasi jumlah kunjungan wisatawan dan menghambat pengembangan destinasi potensial. Selain itu, kualitas dan pemerataan fasilitas pendukung, seperti akomodasi, sanitasi, dan layanan publik masih jauh dari standar yang diharapkan, terutama di kawasan terpencil dan bagian timur Indonesia. Infrastruktur yang ada pun seringkali memerlukan pembaruan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan modern dan standar internasional. Tak kalah penting, konflik sengketa lahan, terutama yang berkaitan dengan tanah adat dan hak ulayat, masih menjadi hambatan dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan pariwisata. Minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata juga dapat menimbulkan resistensi sosial dan ketimpangan manfaat ekonomi.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Peran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat krusial dalam membentuk arah pembangunan pariwisata yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Namun, tantangan dalam tata kelola pemerintahan pariwisata masih cukup signifikan. Salah satunya adalah perlunya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, agar tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan kapasitas lokal secara kontekstual. Selain itu, sistem rotasi pegawai yang tidak mempertimbangkan kesinambungan dan kompetensi sering kali berdampak pada penurunan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata. Di sisi lain, belum adanya standar dan kebijakan yang tegas terkait daya dukung destinasi, baik dari aspek fisik, lingkungan, maupun sosial, mengakibatkan tidak meratanya penyebaran wisatawan di beberapa kawasan wisata, yang mengancam kelestarian dan kenyamanan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas

kelembagaan dan harmonisasi kebijakan lintas level pemerintahan menjadi ihwal yang sangat mendesak untuk dibenahi.

Memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan dalam pengembangan sektor pariwisata nasional tersebut, diperlukan perumusan isu strategis sebagai landasan penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029. Isu strategis tersebut berfungsi sebagai kerangka kontekstual guna memastikan arah kebijakan dan program pembangunan pariwisata berjalan secara terukur, responsif, dan selaras dengan dinamika global serta prioritas pembangunan nasional. Beberapa isu strategis tersebut, yaitu:

1. Perubahan paradigma pengembangan sektor pariwisata dari berorientasi pada kuantitas atau angka menjadi berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan

Perubahan paradigma pengembangan sektor pariwisata dari orientasi pada kuantitas atau angka menjadi fokus pada kualitas dan keberlanjutan merupakan transformasi yang signifikan dalam industri pariwisata global. Tidak hanya memperhatikan angka kunjungan wisatawan atau pendapatan, namun saat ini terdapat kepentingan untuk menuju pengalaman wisata berkualitas dan memastikan dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan, dan tentunya berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan. Hal ini mencerminkan pemahaman yang semakin mendalam bahwa pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, akan tetapi juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kelestarian budaya. Dengan mengadopsi pendekatan ini, destinasi pariwisata bertujuan untuk memberikan pengalaman yang berarti bagi wisatawan.

2. Pembangunan sektor pariwisata yang inklusif melalui pariwisata berbasis komunitas dan pemerataan infrastruktur pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata yang inklusif melalui pariwisata berbasis komunitas dan pemerataan infrastruktur pariwisata adalah langkah penting dalam menciptakan kesempatan ekonomi dan sosial yang merata di berbagai wilayah. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam industri pariwisata melalui konsep pariwisata berbasis komunitas potensi ekonomi lokal dapat menjadi lebih maksimal dan memperkuat keberlanjutan budaya dan lingkungan. Di samping itu, pemerataan infrastruktur pariwisata yang

memadai di berbagai daerah akan membuka aksesibilitas dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata yang tidak hanya terpusat di kota besar atau tujuan populer saja. Melalui pendekatan ini, pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih merata kepada seluruh masyarakat, menciptakan kesempatan ekonomi lokal yang lebih luas, serta memperkuat inklusi sosial dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Isu ini juga mengedepankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta dalam pemerataan pembangunan pariwisata. Selain itu, pemanfaatan proyek nasional dalam mengembangkan pariwisata melalui kerja sama dengan pihak lain juga menjadi isu yang penting.

3. Implementasi Blue Green Circular Economy (BGCE)

Implementasi BGCE di sektor pariwisata, fokus pada pengembangan pariwisata regeneratif, dekarbonisasi, penciptaan green jobs, dan pengembangan pariwisata yang inklusif dan tangguh. Implementasi BGCE dalam sektor pariwisata adalah langkah progresif yang menempatkan perhatian pada berbagai aspek penting. Fokus utamanya adalah pada pengembangan pariwisata regeneratif, di mana upaya konservasi dan restorasi lingkungan menjadi prioritas dalam pembangunan destinasi pariwisata. Selain itu, dekarbonisasi juga menjadi bagian krusial dari BGCE, dengan upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan energi terbarukan dalam operasi pariwisata. Melalui BGCE, juga terjadi penciptaan green jobs, dimana industri pariwisata tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Implementasi BGCE juga tidak kalah penting untuk mendorong pengembangan pariwisata yang inklusif dan tangguh, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan destinasi pariwisata dapat menghadapi tantangan dengan keberlanjutan yang kokoh.

4. Tantangan global termasuk ketidakpastian (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity/VUCA) perubahan preferensi pasar, digitalisasi, dan permintaan akan industri pariwisata yang berkelanjutan

Industri pariwisata saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan global yang memengaruhi cara kita memandang, mengelola, dan merencanakan masa depannya. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian yang terkait

dengan kondisi VUCA yang semakin kompleks dan tidak terduga. Selain itu, perubahan preferensi pasar yang dipicu oleh perkembangan demografis dan perubahan gaya hidup memengaruhi bagaimana destinasi pariwisata harus beradaptasi dan mengubah pendekatannya dalam menarik wisatawan. Digitalisasi juga menjadi faktor penting, dengan teknologi yang memengaruhi setiap aspek dari pengalaman wisata, mulai dari perencanaan perjalanan hingga pengalaman di destinasi. Terakhir, meningkatnya permintaan akan pariwisata yang berkelanjutan menandakan perlunya industri pariwisata untuk bergerak menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan sosial, serta berfokus pada pelestarian budaya dan sumber daya alam.

5. Perubahan preferensi konsumen yang mengarah pada kesehatan, keselamatan, dan keamanan

Perubahan dalam preferensi konsumen mengindikasikan tren menuju pengalaman yang lebih personal, terlokalisasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Konsumen semakin cenderung mencari pengalaman yang unik dan terasa khusus, yang mencerminkan minat dan keinginan pribadi konsumen. Salah satu contohnya adalah dengan mengembangkan wisata kebugaran dan wisata kesehatan. Pendekatan yang lebih terfokus pada komunitas lokal dan pengalaman autentik semakin diminati, sementara konsep customized dan disesuaikan memungkinkan konsumen untuk memilih dan merancang pengalaman sesuai dengan preferensi individu mereka. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran akan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan juga memainkan peran penting dalam pembentukan preferensi konsumen, dengan permintaan yang semakin tinggi untuk pengalaman yang menjamin kesejahteraan fisik dan emosional.

6. Perubahan preferensi pola perjalanan wisatawan mancanegara

Adanya indikasi perubahan preferensi pola perjalanan wisatawan mancanegara untuk perjalanan long haul menjadi perjalanan inter-regional. Hal ini juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik dan pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi melemah dalam beberapa tahun mendatang.

Tahapan berikutnya merumuskan arah kebijakan pembangunan pariwisata ke depan dengan menggunakan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT) (Tabel 1.4) untuk mengidentifikasi posisi sektor pariwisata nasional secara komprehensif berdasarkan potensi, permasalahan, dan isu strategisnya.

Analisis ini bertujuan untuk menggali kekuatan internal dan kelemahan yang perlu diperbaiki, serta mengantisipasi peluang eksternal dan ancaman yang harus diwaspadai atau dimitigasi.

c. Permasalahan Pariwisata Lokal

Target Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mendukung pencapaian target Indonesia emas 2045 yaitu melalui peningkatan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan peran dan posisi daerah tingkat nasional, peningkatan daya saing SDM serta penurunan emisi gas rumah kaca, adapun dalam mencapai visi Manggarai Barat tahun 2045 diperlukan penguatan kolaborasi yang kokoh dan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan di wilayah ini, sambil secara aktif memperhatikan dinamika dan arah kebijakan pembangunan nasional untuk menjamin sinkronisasi serta kesinambungan pembangunan pusat dan daerah, serta peningkatan inovasi melalui kerja keras dan cerdas dalam pembangunan. Namun dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo saat ini beberapa isu utama yang menjadi fokus untuk dibenahi dalam mencapai visi tersebut diantaranya;

1) Konservasi dan Keberlanjutan

Labuan Bajo Flores menghadapi tantangan konservasi yang kompleks seiring dengan pertumbuhannya sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Over kapasitas di Taman Nasional Komodo, perubahan iklim global, dan kerusakan terumbu karang menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan biodiversitas di wilayah ini. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan yang lemah memperparah situasi dan menghambat upaya konservasi yang efektif. Konsekuensi dari permasalahan ini mengkhawatirkan keberlanjutan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Over kapasitas mengancam habitat Komodo dan memicu konflik dengan manusia, sementara perubahan iklim mengancam ketahanan pangan dan merusak ekosistem. Kerusakan terumbu karang berdampak pada keanekaragaman hayati laut dan mata pencaharian nelayan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan komprehensif yang mencakup pengelolaan wisata berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, restorasi terumbu karang, serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan.

2) Keselamatan dan Keamanan

Pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo meningkatkan kebutuhan akan jaminan keselamatan dan keamanan bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama, mengingat meningkatnya aktivitas wisata bahari dan potensi risiko kecelakaan laut. Selain itu, isu-isu

seperti kejahatan, terorisme, dan narkoba juga perlu diantisipasi dan ditangani secara efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan, diperlukan peningkatan infrastruktur dan sumber daya. Ini mencakup pengembangan sistem informasi keselamatan, peningkatan kapasitas petugas keamanan, dan penerapan teknologi pemantauan. Koordinasi yang kuat antar instansi pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat juga penting untuk menciptakan sistem keamanan yang komprehensif dan responsif.

3) Adaptasi Perubahan Iklim

Pengembangan pariwisata di Labuan Bajo semakin dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem seperti hujan berintensitas tinggi, gelombang laut yang tinggi, serta angin kencang yang berdampak pada aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas wisata, khususnya wisata bahari sebagai daya tarik utama kawasan, di sisi lain pola *low season* yang semakin tidak menentu baik dari sisi waktu maupun durasi turut menyebabkan fluktuasi kunjungan wisatawan yang signifikan dan berimplikasi pada ketidakstabilan pendapatan pelaku usaha pariwisata lokal, sehingga diperlukan upaya adaptasi yang terencana dan terintegrasi melalui penguatan ketahanan destinasi dengan mendorong diversifikasi produk wisata non-musiman seperti wisata budaya, berbasis komunitas, serta MICE dan event kreatif sepanjang tahun, penguatan kalender event strategis pada periode sepi kunjungan, penyediaan sistem informasi cuaca dan peringatan dini yang akurat dan mudah diakses, pembangunan infrastruktur pariwisata yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola risiko dan menyusun strategi usaha yang fleksibel, sehingga sektor pariwisata tetap resilien, berkelanjutan, dan mampu menjaga stabilitas kontribusi terhadap perekonomian daerah dalam mendukung visi pembangunan Manggarai Barat kedepannya.

4) Rantai Pasok

Pengembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo memerlukan dukungan rantai pasok yang kuat, efisien, dan terintegrasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal, di mana rantai pasok yang efektif berfungsi menghubungkan produsen lokal, khususnya UMKM Pariwisata dengan kebutuhan industri pariwisata seperti hotel, restoran, dan jasa perjalanan, namun demikian dalam implementasinya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain kesenjangan antara penawaran dan permintaan, belum optimalnya komitmen

dan kemitraan usaha, keterbatasan infrastruktur logistik, serta rendahnya akses terhadap informasi pasar, selain itu berkembang isu strategis terkait belum terjaminnya keandalan rantai pasok energi, termasuk fluktuasi harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan yang berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya logistik dan operasional, baik bagi pelaku usaha maupun wisatawan, serta belum tersusunnya *demand assessment* rantai pasok darat secara komprehensif yang mengakibatkan belum optimalnya pemetaan kebutuhan riil industri terhadap pasokan barang dan jasa lokal, sehingga berimplikasi pada inefisiensi distribusi dan potensi ketidaksesuaian pasar. Oleh karena itu diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan kapasitas produksi dan manajemen UMKM, pengembangan sistem kurasi produk berbasis kebutuhan pasar, fasilitasi kemitraan usaha yang berkelanjutan, penguatan sistem logistik dan distribusi, pengembangan platform digital dan sistem informasi pasar, penyusunan *demand assessment* rantai pasok darat, serta penguatan sistem penyediaan energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan guna mewujudkan rantai pasok pariwisata yang efektif, efisien, dan berdaya saing dalam mendukung pengembangan destinasi secara berkelanjutan.

5) Tata Ruang & Lanskap

Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata super prioritas, menghadapi tantangan tata ruang yang kompleks dan multidimensi. Pembangunan yang masif dan tidak terkendali telah mengakibatkan degradasi lanskap alami, mengancam integritas ekosistem pesisir, dan membatasi akses masyarakat terhadap ruang publik. Ketimpangan pembangunan yang terkonsentrasi di Kawasan Taman Nasional dan Kecamatan Komodo berpotensi memicu konflik sumber daya dan tekanan lingkungan yang berlebihan. Dampak dari tata ruang yang tidak berkelanjutan bersifat *multifaceted*. Kerusakan lingkungan, erosi, dan hilangnya keanekaragaman hayati mengancam keberlanjutan ekosistem. Konflik sosial akibat minimnya akses publik dan kemacetan lalu lintas dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan penduduk lokal. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dan lanskap yang holistik dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, menjadi sangat mendesak.

6) SDM & Kelembagaan

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Labuan Bajo sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kekuatan kelembagaan. Keterbatasan SDM yang kompeten di sektor pariwisata, terutama dalam bidang hospitality, menjadi tantangan. Kurangnya pelatihan

dan pengembangan keterampilan menghambat kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. Selain itu, kelembagaan yang kuat dan efektif juga diperlukan untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan. Koordinasi antar lembaga yang baik, kapasitas pengelolaan yang memadai, dan dukungan anggaran yang cukup menjadi faktor penting. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan kelembagaan, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan destinasi.

7) Sampah dan Limbah

Peningkatan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo menghasilkan volume sampah dan limbah yang signifikan, yang menjadi tantangan serius bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang belum optimal mengakibatkan pencemaran di darat dan laut, merusak keindahan alam, dan mengancam ekosistem. Praktik pembuangan limbah yang tidak bertanggung jawab memperparah masalah ini dan dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah sampah dan limbah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti fasilitas daur ulang dan pengolahan limbah. Penegakan hukum yang tegas terhadap pembuangan sampah ilegal dan praktik pengelolaan limbah yang buruk juga penting. Selain itu, kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci untuk perubahan perilaku jangka panjang.

8) Sosial dan Budaya

Pengembangan pariwisata di Labuan Bajo membawa perubahan signifikan dalam dinamika sosial dan budaya masyarakat lokal. Komersialisasi budaya lokal untuk pariwisata dapat mengancam keaslian dan otentisitas budaya, serta mengurangi nilai-nilai tradisional. Perbedaan budaya antara wisatawan dan penduduk lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kurangnya visibilitas budaya lokal dan penghayatan terhadap nilai-nilai lokal dalam pengembangan pariwisata dapat menyebabkan hilangnya identitas dan keunikan Labuan Bajo. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan sosial budaya menjadi isu strategis yang tidak dapat diabaikan. Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam desain, tata ruang, dan aktivitas pariwisata. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya lokal dalam pariwisata juga menjadi kunci. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan produk wisata berbasis budaya dapat memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan manfaat ekonomi pariwisata terdistribusi secara merata.

9) Infrastruktur

Pengembangan pariwisata di Labuan Bajo sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aktivitas pariwisata tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Tantangan infrastruktur di Labuan Bajo mencakup keterbatasan jaringan jalan, ketersediaan air bersih, listrik, dan fasilitas pengelolaan sampah.

10) Perlindungan Wisatawan dan Penipuan (*Tourism Scam*)

Pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo juga menghadapi tantangan berupa penipuan wisata (*tourism scam*) dan lemahnya perlindungan wisatawan, khususnya dalam transaksi dengan agen perjalanan. Salah satu kasus yang mencuat pada Juni 2025 adalah penipuan terhadap 20 wisatawan, terdiri dari 13 wisatawan Amerika Serikat dan 7 wisatawan domestik, yang telah membayar sekitar Rp101 juta kepada agen perjalanan untuk paket perjalanan ke Taman Nasional Komodo. Setibanya di Labuan Bajo, rombongan tersebut justru terlantar di Pelabuhan Marina karena agen perjalanan belum melunasi pembayaran kepada operator kapal. Wisatawan akhirnya dapat diberangkatkan setelah persoalan tersebut difasilitasi oleh kepolisian.

Kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas dalam verifikasi dan pengawasan usaha perjalanan wisata, terutama terhadap agen yang melakukan pemasaran melalui kanal digital tetapi tidak memiliki kejelasan keberadaan dan operasional di Labuan Bajo. Dinas Pariwisata Manggarai Barat pada saat itu juga menyoroti maraknya agen perjalanan yang hanya mengandalkan website tanpa memiliki kantor fisik di daerah tersebut. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan wisatawan dan citra Labuan Bajo sebagai destinasi internasional. Bahkan wisatawan korban menyatakan pengalaman tersebut membuat mereka kecewa dan kapok untuk kembali berwisata ke Labuan Bajo.

Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan wisatawan dan penguatan tata kelola usaha pariwisata melalui pendataan dan verifikasi agen perjalanan, kejelasan legalitas dan alamat operasional, pengembangan direktori resmi *travel agent* dan *tour operator* terpercaya, transparansi transaksi dan paket wisata, mekanisme pengaduan wisatawan yang cepat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, asosiasi usaha pariwisata, operator kapal, dan pelaku industri. Langkah tersebut penting untuk membangun trust, kepastian layanan, perlindungan konsumen, dan reputasi

destinasi.

1.2.3 Capaian Rencana Strategis BPOLBF 2020-2024

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOLBF periode 2025–2029 merupakan langkah re-orientasi kebijakan untuk menyelaraskan diri dengan siklus perencanaan pembangunan nasional lima tahunan. Perubahan masa berlaku yang semula direncanakan dalam dokumen jangka panjang 2021–2030 kini disesuaikan menjadi periode 2025–2029 guna memastikan sinkronisasi vertikal yang sempurna dengan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kedeputan Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Penyesuaian ini penting agar target kinerja dan alokasi anggaran BPOLBF tetap relevan dalam kerangka waktu yang sama dengan kebijakan makro pemerintah pusat.

Secara kelembagaan, transisi ini juga dilatarbelakangi oleh perubahan struktur organisasi yang fundamental di tingkat pusat menyusul terbentuknya Kabinet Merah Putih. Penghapusan Kemenko Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Dewan Pengarah, di mana fungsi koordinasi strategis kepariwisataan kini beralih ke Kemenko Perekonomian, serta transformasi Kemenparekraf menjadi Kementerian Pariwisata (Kemenpar), menuntut BPOLBF untuk merombak arsitektur kerjanya. Fokus kebijakan kini lebih spesifik pada penguatan destinasi, sehingga sub-bagian industri kreatif yang sebelumnya mendominasi dokumen 2021-2030 kini diredesain agar lebih taktis mendukung mandat baru lembaga.

Seiring dengan perubahan nomenklatur tersebut, BPOLBF juga telah resmi bertransformasi dari pola keuangan APBN Murni menjadi pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Status BLU ini mengubah landasan operasional lembaga secara drastis, sehingga draft Renstra 2021–2030 dianggap sudah tidak lagi memadai. Sebagai BLU, BPOLBF kini memiliki kewenangan dalam fleksibilitas pengelolaan pendapatan (PNBP) dan belanja, yang mengharuskan adanya rencana bisnis dan strategi (RSB) yang lebih lincah dan berorientasi pada kemandirian fiskal dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penajaman strategi juga tercermin dalam perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih mencerminkan kebutuhan aktual di lapangan. Pada bidang pemasaran, BPOLBF melakukan terobosan dengan mengalihkan indikator capaian dari yang semula berbasis "jumlah kunjungan" menjadi "jumlah event dan kegiatan promosi berkualitas". Perubahan ini diambil untuk memastikan bahwa performa pemasaran dapat diukur melalui *output* kerja nyata divisi dalam mengaktivasi destinasi, tanpa sepenuhnya terdistorsi oleh variabel eksternal global yang berada di luar kendali langsung lembaga.

Renstra 2025–2029 mengukuhkan pergeseran fokus kerja di mana sekitar 80% sumber daya kini dialokasikan untuk tugas otoritatif pengembangan kawasan, dibandingkan porsi seimbang antara koordinatif dan otoritatif pada rencana sebelumnya. Dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik, krisis energi, serta tren pariwisata regeneratif, BPOLBF memfokuskan akselerasi pembangunan pada lahan otorita Parapuar berbasis prinsip *inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan*. Langkah ini merupakan bentuk penajaman fungsi sebagai lembaga pengelola kawasan yang gesit dan profesional dalam mengejar target visi Indonesia Emas 2045 melalui sektor pariwisata super premium. Berikut terlampir gambaran target program dan realisasi renstra BPOLBF 2020 - 2024.

Tabel 1.2 Sasaran Program dan Realisasi dalam Renstra BPOLBF 2020 - 2024

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target & Capaian										Sumber
		2020		2021		2022		2023		2024		
		Target	capaian	Target	capaian	Target	capaian	Target	capaian	Target	capaian	
Meningkatkan Kunjungan Wisata dan Wisnus ke Labuan Bajo Flores*												Disarikan dari RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024
Jumlah Kunjungan Wisman ke Labuan Bajo Flores	Ribu Orang	20	13	30	251	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Kunjungan Wisnus ke Labuan Bajo Flores	Ribu Orang	50	38	70	140	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Kegiatan Pemasaran Labuan Bajo Flores untuk segmen wisman	Kegiatan	-	-	-	-	1	6	3	5	5	9	

Jumlah Kegiatan Pemasaran Labuan Bajo Flores Untuk segmen wisnus	Kegiatan	-	-	-	-	5	9	6	8	8	8
Bertumbuhnya Investasi dan Industri pariwisata di Labuan Bajo-Flores											
Jumlah investasi pariwisata di Labuan Bajo-Flores	US dollar (\$)	1	-	1	10	4	102	8	32	15	19
Jumlah usaha pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Usaha	10	-	10	27	15	104	20	60	25	41
Tersedianya produk pariwisata di Labuan Bajo-Flores											
Jumlah atraksi/daya tarik pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Atraksi	2	-	3	3	5	7	6	6	8	9
Jumlah amenities pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Unit	2	-	3	3	5	6	6	6	8	8
Jumlah aksesibilitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Objek	2	-	3	3	5	6	7	9	8	9

Meningkatnya kualitas layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores											
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores	Skala Likert (1-4)	3	-	3	3	4	4	4	4	4	4

*Perubahan IKU Direktorat Pemasaran terjadi pada tahun 2022-2024 yang sebelumnya berupa angka kunjungan menjadi jumlah kegiatan event dan promosi.

Berdasarkan data sasaran program dan realisasi capaian BPOLBF, kinerja periode 2020–2024 secara umum menunjukkan hasil yang positif, bahkan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini terutama terlihat pada sektor investasi dan industri pariwisata, di mana realisasi investasi mencapai 126% dan jumlah usaha pariwisata mencapai 164% dari target. Capaian ini mengindikasikan adanya daya tarik kawasan Labuan Bajo Flores yang semakin kuat di mata investor dan pelaku usaha. Selain itu, indikator pengembangan produk pariwisata seperti atraksi dan aksesibilitas juga menunjukkan kinerja yang melampaui target, yang mencerminkan adanya percepatan pembangunan destinasi secara fisik dan fungsional.

Dengan Capaian yang diperoleh dimana sejumlah indikator melampaui target, terutama pada investasi, jumlah usaha pariwisata, kegiatan Pemasaran, serta pengembangan atraksi dan aksesibilitas. Hal ini mencerminkan meningkatnya daya tarik Labuan Bajo Flores dan keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Ke depan, capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat posisi destinasi secara berkelanjutan.

Memasuki periode 2025–2029, penguatan ekosistem pariwisata perlu didukung oleh peningkatan inovasi, kualitas layanan, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan strategi yang lebih terintegrasi, BPOLBF berpeluang besar mendorong pertumbuhan pariwisata yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.

Kondisi anomali ini menjadi justifikasi utama bagi BPOLBF untuk mempercepat implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) guna menutup

celah pendanaan operasional. Penurunan alokasi DIPA bukan dipandang sebagai hambatan, melainkan pendorong utama untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pengusahaan lahan otorita Parapuar dan kemitraan investasi hijau. Dengan fokus pada efisiensi dan kreativitas pendanaan, BPOLBF berkomitmen untuk tetap menjamin tercapainya target-target strategis di wilayah koordinatif dan otoritatif demi mewujudkan pariwisata yang berkualitas, meskipun berada di tengah keterbatasan dukungan fiskal negara yang semakin ketat.

1.3 Trend Kepariwisata

1.3.1 Tren Umum Pariwisata Global dan Asia-Pasifik

Pemulihan sektor pariwisata global menunjukkan tren yang sangat positif pada tahun 2024. Data terbaru mengindikasikan bahwa jumlah wisatawan internasional mencapai sekitar 1,4 miliar orang, meningkat sebesar 11% dibandingkan tahun 2023. Angka ini menandai hampir selesainya fase pemulihan sektor pariwisata yang mengalami kontraksi tajam selama masa pandemi. Pemulihan ini menegaskan kembali pentingnya pariwisata sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi global dan penggerak utama bagi berbagai sektor terkait.

Dalam konteks regional, kawasan Asia dan Pasifik menempati posisi sebagai destinasi kedua terbesar di dunia setelah Eropa, dengan jumlah kunjungan internasional mencapai 316 juta pada tahun 2024, yang berarti mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 33% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan mobilitas dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan perjalanan internasional, tetapi juga menandai peran strategis kawasan Asia-Pasifik dalam perekonomian pariwisata dunia.

Lebih rinci, analisis pemulihan di tingkat sub-kawasan Asia menunjukkan disparitas yang menarik. Asia Selatan mencatat tingkat pemulihan tertinggi dengan capaian sekitar 92% dari volume kunjungan internasional sebelum pandemi (2019). Disusul oleh Asia Tenggara yang mencapai 88%, Asia Timur Laut sebesar 86%, dan Oseania yang berada pada level 83%. Hal ini mencerminkan dinamika pemulihan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pembatasan perjalanan, tingkat vaksinasi, kesiapan infrastruktur, dan strategi pemasaran pariwisata yang diterapkan oleh masing-masing negara dan wilayah.

1.3.2 Tren Pola Perjalanan dan Konektivitas

Kawasan Asia-Pasifik menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam sektor transportasi udara, yang menjadi salah satu indikator utama pemulihan industri pariwisata. Berdasarkan proyeksi International Air Transport Association (IATA), permintaan

perjalanan udara menuju kawasan ini diperkirakan meningkat sebesar 9,3% pada tahun 2025. Lima negara sumber wisatawan utama yang berkontribusi besar terhadap tren ini adalah India, Korea Selatan, Australia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut memiliki populasi besar, kelas menengah yang terus berkembang, serta hubungan dagang dan pariwisata yang erat dengan Asia-Pasifik.

Secara khusus, Tiongkok mencatat pertumbuhan paling signifikan dalam pencarian dan pemesanan perjalanan internasional. Berdasarkan data dari *Forward Keys*, terdapat peningkatan sebesar 235% dalam pencarian perjalanan dan 86% dalam pemesanan dari wisatawan asal Tiongkok. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya permintaan yang tertahan selama masa pandemi serta pembukaan kembali perbatasan internasional oleh pemerintah Tiongkok. Dinamika ini memperkuat posisi Tiongkok sebagai salah satu pasar outbound terbesar di dunia dan menjadi pendorong utama bagi arus wisatawan menuju kawasan Asia-Pasifik.

Dalam mendukung peningkatan mobilitas ini, konektivitas udara di Asia-Pasifik juga mengalami perkembangan pesat. Sepanjang 2024, tercatat terdapat 1.526 rute baru di Asia Timur Laut dan 176 rute baru menuju kawasan Oseania. Rute-rute ini menghubungkan pusat-pusat utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dengan pasar strategis di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, serta Asia Tenggara. Penambahan rute baru ini tidak hanya memperluas aksesibilitas antar kawasan, tetapi juga membuka peluang besar bagi destinasi-destinasi sekunder dan baru untuk mengembangkan pariwisata berbasis konektivitas yang berkelanjutan dan inklusif.

1.3.3 Tren Perhotelan

Industri perhotelan di kawasan Asia-Pasifik menunjukkan tren pemulihan yang solid sepanjang 2024 hingga awal 2025, dengan tingkat okupansi hotel stabil pada kisaran 60–70%. Beberapa negara mencatatkan performa luar biasa, seperti Jepang yang konsisten mempertahankan okupansi di atas 80% di kota-kota utama, serta India dan Thailand yang menunjukkan pertumbuhan signifikan berkat permintaan domestik dan internasional. Tiongkok juga mengalami *rebound* yang kuat, khususnya di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai, meskipun menghadapi tantangan ekonomi makro, sektor perhotelan di negara-negara ini tetap menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum, peningkatan pendapatan per kamar atau *Revenue per Available Room* (RevPAR) menunjukkan bahwa bukan hanya volume kunjungan yang meningkat, tetapi juga nilai ekonomi per tamu. Hal ini turut tercermin dari naiknya tarif kamar rata-rata atau *Average Daily Rate* (ADR).

Selain itu, tren saluran pemesanan juga mengalami pergeseran yang mencerminkan transformasi perilaku konsumen dan dinamika pasar. Pemesanan langsung melalui situs

resmi hotel seperti *Brand.com* menunjukkan peningkatan signifikan, mengindikasikan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap brand hotel serta upaya hotel untuk mengurangi ketergantungan pada agen perjalanan *online*. Segmen grup dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) turut mengalami pertumbuhan pesat, mencerminkan pulihnya kegiatan bisnis, konferensi, dan acara korporat. Negara-negara seperti India dan Thailand melaporkan peningkatan tajam dalam permintaan untuk ruang pertemuan dan layanan pendukung acara, yang secara keseluruhan memberikan kontribusi positif terhadap performa industri perhotelan di kawasan Asia-Pasifik. Berikut adalah tabel tren perhotelan Asia - Pasifik selama tahun 2024 - 2025.

Tabel 1.3 Tren Perhotelan Asia-Pasifik 2024–2025

Negara	Tingkat Okupansi (%)	ADR (Tarif Rata-rata/Kamar)	RevPAR (Pendapatan/Kamar)	Tren Booking & Segmen Utama	Sumber Utama
Jepang	80–85%	↑ hingga +20% YoY	↑ hingga +25% YoY	Kuat di direct booking & MICE	STR, HVS, CBRE
India	65–68%	↑ +15% YoY	↑ +18% YoY	Tumbuh di grup, korporat, MICE	HVS, Hotelivate, CBRE
Thailand	63–67%	↑ +12% YoY	↑ +17% YoY	MICE & leisure internasional meningkat	STR, CBRE
Tiongkok	60–65%	Stabil (+5–8% YoY)	↑ +10% YoY	Pulihnya domestik dan bisnis grup	STR, HVS
APAC Rata-rata	66%	↑ +10–15% YoY	↑ +15–20% YoY	Direct booking dan OTA bersaing ketat	STR Global Hotel Performance (Q1 2025)

Sumber: Olahan data sekunder (Asia Pacific Hotel Performance Update (Q1 2025); HVS Global Hotel Industry 2023 Recap and 2024 Outlook; Asia Pacific Hotel Trends Q4 2024; Indian Hospitality Trends & Opportunities 2024).

1.3.4 Profil Wisatawan

Visualisasi tren profil wisatawan global tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa digitalisasi dan kesadaran akan keberlanjutan merupakan dua faktor dominan yang mempengaruhi perilaku wisatawan. Sebanyak 75% wisatawan memprioritaskan aspek keberlanjutan dalam memilih destinasi dan aktivitas perjalanan mereka. Hal mencerminkan adanya pergeseran ke arah travel yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan. Sementara itu, 71% wisatawan mengandalkan platform digital untuk perencanaan dan pemesanan

perjalanan, menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi fondasi utama dalam seluruh siklus perjalanan—dari inspirasi, pemesanan, hingga pengalaman di destinasi. Generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, menjadi motor penggerak utama tren ini dengan pendekatan spontan dan digital-first.

Selain itu, tren gaya perjalanan juga mengalami transformasi signifikan. Perjalanan tidak lagi hanya soal destinasi, melainkan pengalaman dan kualitas waktu. Hal ini tercermin dalam meningkatnya popularitas perjalanan solo, terutama di kalangan wanita usia 50 tahun ke atas (61%), serta maraknya tren "*slow travel*" dan "*coolcation*" yang mengedepankan relaksasi dan eksplorasi mendalam di satu tempat. Perjalanan kini tidak hanya untuk berlibur, tetapi juga sebagai sarana pemulihan (*wellness travel*), eksplorasi budaya lokal, serta perpanjangan aktivitas profesional melalui konsep *bleisure*. Pergeseran ini menunjukkan bahwa wisatawan global semakin menuntut nilai tambah, fleksibilitas, dan personalisasi dalam setiap aspek perjalanannya. Berikut adalah visualisasi tren profil wisatawan global tahun 2024-2025

Tabel 1.4 Tren Profil Wisatawan Global tahun 2024-2025

Aspek	Tren Utama	Detail Profil Wisatawan
Usia & Generasi	Dominasi Gen Z & Milenial	- Gen Z & Milenial cenderung spontan & digital-savvy - Gen X & Baby Boomer lebih loyal terhadap brand & menyukai kenyamanan
Gender & Gaya Travel	Peningkatan Solo Female Traveler	61% wanita usia 50+ bepergian sendiri demi fleksibilitas & kebebasan
Motivasi Perjalanan	Kombinasi <i>leisure</i> , <i>healing</i> , dan <i>workation (bleisure)</i>	<i>Wellness</i> menjadi motivasi dominan - <i>Bleisure travel</i> meningkat 40% - Digital nomad makin populer di kalangan usia 25–35
Perilaku Digital	Wisatawan semakin bergantung pada teknologi	71% booking via online 75% mendukung boarding biometrik - Sosial media jadi sumber inspirasi utama (khususnya Gen Z)
Preferensi Pengeluaran	Polarisasi belanja, wisatawan memilih antara low-budget atau luxury	- Segmen luxury tumbuh cepat (terutama Asia & Eropa) 58% wisatawan mempertimbangkan <i>value for money</i>
Sustainability	Perjalanan berkelanjutan menjadi norma	70–83% wisatawan menganggap penting untuk memilih opsi yang ramah lingkungan - Tren <i>slowcation</i> menggantikan gaya travel cepat & padat
Lokasi Tujuan	Perubahan destinasi favorit	- Wisatawan menghindari musim puncak - Negara-negara "dingin" seperti Islandia, Norwegia, dan Kanada naik daun (<i>coolcation</i>)

Durasi & Gaya Perjalanan	Durasi lebih panjang, gaya lebih lambat ("slow travel")	• Wisatawan memilih tinggal lebih lama di 1 lokasi (bukan berpindah-pindah) • Fokus pada pengalaman lokal, budaya, & relaksasi
--------------------------	---	--

Sumber: Olahan data sekunder BPOLBF (2025)

Selain itu Tren aktivitas yang dilakukan wisatawan pada tahun 2025 mengalami perubahan pergeseran yaitu :

1) *Bleisure (Business + Leisure)*

Pascapandemi, beberapa perusahaan di Indonesia memberi kebebasan pegawainya untuk bekerja dari mana saja. Adanya kebebasan tersebutlah dapat meningkatkan fleksibilitas para pekerja untuk tetap menyempatkan liburan singkat di sela-sela waktu bekerja. Akhirnya, kesempatan tersebut menciptakan *bleisure* (business and leisure) sebagai salah satu tren pariwisata. Pelaku pariwisata harus mulai atur strategi dengan memberikan paket *bleisure*. Misalnya dengan menghadirkan paket destinasi MICE untuk kepentingan perjalanan bisnis, dengan rekomendasi destinasi wisata di sekitar lokasi acara.

2) *Wellness Experience*

Wellness experience atau pengalaman wisata kebugaran. Meningkatnya popularitas tren wisata *wellness experience* tidak bisa dipisahkan dari pergeseran perilaku wisatawan pascapandemi COVID-19 yang semakin menyadari pentingnya kesehatan mental dan pengalaman spiritual.

3) *Deep and Meaningful*

Deep and meaningful turut menjadi tren pariwisata yang diprediksi banyak diminati sepanjang tahun. Munculnya tren pariwisata ini dilatarbelakangi ketidakpastian selama pandemi COVID-19. Akibatnya, lebih dari 3/4 wisatawan dalam survei yang dilakukan oleh Booking.com menginginkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas dan bermakna. Indonesia terkenal sebagai negara dengan keindahan alam dan budaya yang sangat kental. Hal ini membuat Indonesia memiliki peluang sangat besar dalam mengembangkan *story comics tourism* yang membantu membangun interpretasi dan imajinasi wisatawan pada sebuah objek wisata. Sehingga, besar harapannya tren pariwisata ini membuat wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mendapatkan pengalaman berwisata lebih berkesan dan penuh makna.

4) *Set-Jetting*

Set-jetting adalah kegiatan berwisata dengan mengunjungi tempat-tempat syuting film yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Selain menikmati keindahan alam, bangunan arsitektur, maupun mengenal budaya yang kental, liburan ke destinasi

wisata yang pernah menjadi lokasi syuting film turut memberikan rasa bangga tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung.

1.4 Proyeksi Pengembangan Ekosistem Kepariwisata di Labuan Bajo Flores

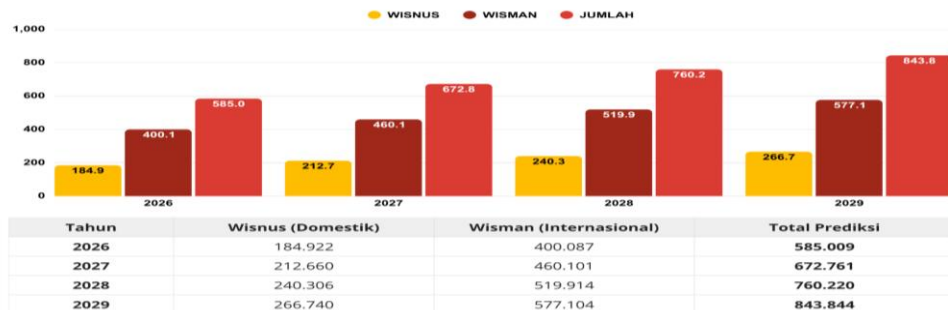
Proyeksi pengembangan kepariwisataan Labuan Bajo Flores tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat. Dengan mempertimbangkan tren global, potensi lokal, serta tantangan yang dihadapi, pengembangan ekosistem ini difokuskan pada penguatan keterpaduan antara destinasi, industri, masyarakat, dan kelembagaan. Berdasarkan data kunjungan wisatawan, Labuan Bajo sebagai pintu gerbang pariwisata Flores menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan tercatat sebesar 423.847 wisatawan. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan relatif stabil dengan total 411.349 wisatawan, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar 500.008 wisatawan. Dinamika ini menunjukkan adanya fase pertumbuhan yang diikuti dengan penyesuaian, yang perlu direspons melalui perencanaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1.1 serta didukung oleh grafik proyeksi 1.2 berikut, arah pengembangan ke depan tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan volume kunjungan, tetapi juga pada optimalisasi nilai ekonomi, kualitas pengalaman wisata, serta penguatan kapasitas destinasi. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Flores diharapkan mampu berkembang sebagai destinasi unggulan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Kondisi terkini yang masih sangat dinamis menciptakan prediksi pertumbuhan wisatawan yang harus dapat diantisipasi dengan dua skema.

Skenario pertama ialah prediksi berdasarkan pola tren (Optimis-Agresif). Skenario ini memproyeksikan lonjakan kunjungan yang sangat signifikan, dimana Labuan Bajo diperkirakan akan menembus angka 840.000 wisatawan pada tahun 2029. Pertumbuhan ini didorong oleh momentum pasca-pandemi yang menunjukkan daya lenting luar biasa, terutama pada segmen mancanegara yang tumbuh drastis di tahun 2025. Dalam pola ini, Labuan Bajo dipandang bukan lagi sebagai destinasi alternatif, melainkan destinasi utama di Asia Tenggara yang mampu menarik minat pasar global secara masif dan konsisten.

Landasan utama prediksi ini adalah keberhasilan branding "Destinasi Prioritas (Percepatan)" dan peningkatan status Bandara Komodo menjadi bandara internasional yang memicu konektivitas langsung dari hub luar negeri. Selain itu, masifnya kegiatan promosi seperti *Familiarization Trip* bagi influencer internasional dan penyelenggaraan event skala besar (MICE) terbukti menciptakan efek bola salju. Pola pertumbuhan tahunan yang sempat menyentuh angka di atas 20% menunjukkan bahwa pasar masih memiliki

ruang ekspansi yang besar jika infrastruktur pendukung terus ditingkatkan. Deskripsi pertumbuhan dapat dilihat dalam Grafik 1.4 di bawah ini.

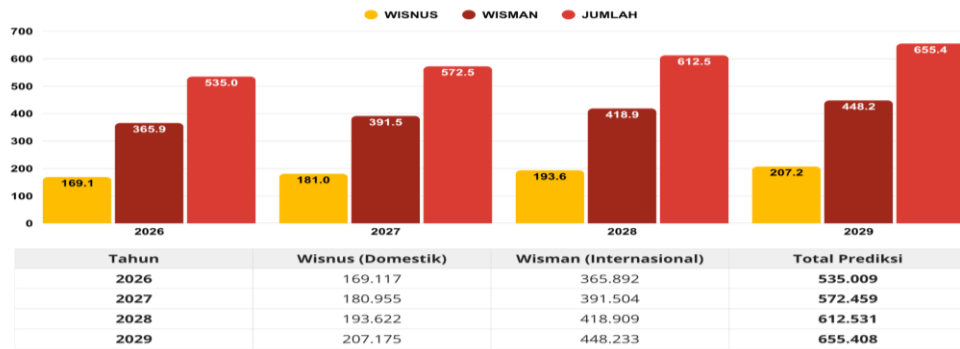


Grafik 1.4 Prediksi Pertumbuhan Wisatawan 2026-2029 Berdasarkan Pola Tren Tahunan

Sumber: Data diolah oleh BPOLBF (2025)

Skenario kedua ialah prediksi pertumbuhan tetap 7% (Moderat-Konservatif). Skenario ini memproyeksikan pertumbuhan yang stabil namun sangat selektif di angka 7% per tahun, dengan target kunjungan sekitar 655.000 wisatawan pada tahun 2029. Angka ini mencerminkan komitmen terhadap transformasi Labuan Bajo dari *mass tourism* menuju destinasi wisata minat khusus yang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Dengan membatasi laju pertumbuhan, fokus dialihkan pada peningkatan durasi tinggal (*length of stay*) dan belanja wisatawan (*spending*) melalui penyediaan pengalaman yang unik, eksklusif, dan tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia.

Landasan utama skenario ini adalah penerapan kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) di Taman Nasional Komodo yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi pembahasan. Kebijakan ini menjadi instrumen krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem purba dari tekanan jumlah manusia yang berlebih. Selaras dengan visi pengembangan destinasi premium, desain pertumbuhan 7% ini dirancang agar tidak melampaui ambang batas ekologis, sekaligus memastikan setiap wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih personal dan terbatas (*limited access*). Hal ini bertujuan untuk mempertahankan nilai prestisius Labuan Bajo di pasar global sebagai destinasi yang menjaga keseimbangan antara konservasi dan pariwisata berkelas dunia. Deskripsi pertumbuhan dapat dilihat dalam grafik 1.5 di bawah ini.

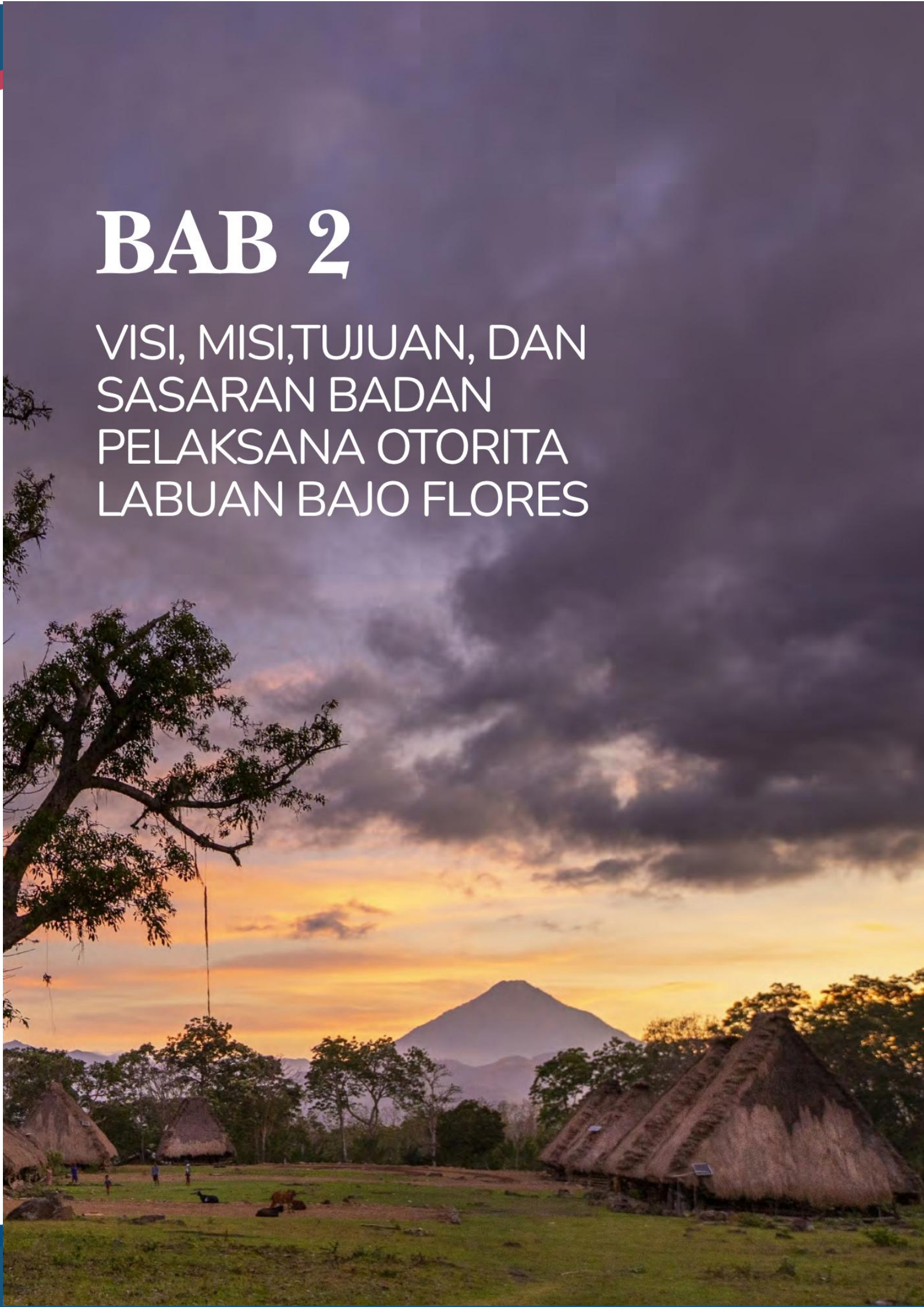


Grafik 1.5 Prediksi Pertumbuhan Wisatawan 2026-2029 Berdasarkan Pertumbuhan stabil 7%

Sumber: Data diolah oleh BPOLBF (2025)

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN BADAN
PELAKSANA OTORITA
LABUAN BAJO FLORES



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

2.1 Visi

Visi terbaru BPOLBF kini bertransformasi menjadi **“Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045.”** Paradigma ini menandai pergeseran radikal dari sekadar mengejar volume kunjungan (*quantity*) menuju penciptaan nilai ekonomi tinggi (*quality*) yang berdampak langsung pada peningkatan PDB, investasi, dan lapangan kerja. Melalui konsep "super premium" yang holistik, BPOLBF mengoptimalkan tujuh variabel kunci, yaitu: Lingkungan, SDM, Manajemen Perjalanan, Kuliner, Kesehatan/Keamanan, Infrastruktur, dan Aktivitas untuk menyajikan pengalaman perjalanan mewah yang autentik dan berdaya saing global tanpa kehilangan akar kearifan lokal Flores.

Selaras dengan **Asta Cita Presiden Prabowo** dan prinsip inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan, strategi ini diimplementasikan melalui pembangunan SDM yang unggul serta pengembangan infrastruktur digital dan ekowisata yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aktivitas pariwisata di Labuan Bajo Flores tidak hanya menjaga kelestarian alam dan budaya, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal sesuai amanat RPJMN 2025–2029. Dengan fokus pada wisata regeneratif dan personal, BPOLBF memposisikan Labuan Bajo Flores sebagai mesin utama transformasi ekonomi nasional yang inklusif menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi

Misi BPOLBF berfokus pada perwujudan destinasi *World-Class Sustainable Premium Quality Tourism* yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pendekatan holistik. Strategi ini mengintegrasikan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian ekonomi yang selaras dengan pilar Asta Cita Presiden Prabowo serta target Indonesia Emas 2045. Dengan mengadopsi prinsip pariwisata regeneratif, BPOLBF memastikan setiap pengembangan wilayah tidak hanya mengejar nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan keluhuran budaya lokal.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki mandat percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Percepatan, BPOLBF berperan sebagai orkestrator utama dalam mensinergikan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan kawasan otoritatif dan koordinatif dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital serta standar layanan global untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan. Melalui kerangka regulasi yang kuat, BPOLBF mentransformasi Labuan Bajo Flores menjadi model percontohan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berdaya saing internasional.

Adapun rincian misi BPOLBF adalah sebagai berikut:

- Kontribusi Ekonomi Nasional: Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan lapangan kerja, peningkatan investasi infrastruktur publik, dan penguatan perputaran ekonomi kreatif.
- Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan taraf hidup dan kapasitas SDM lokal melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku usaha dan penjaga nilai budaya yang autentik.
- Konservasi Dinamis: Menjalankan perlindungan terhadap sumber daya alam dan warisan budaya secara berkelanjutan guna menjaga nilai ekologis dan daya tarik destinasi.
- Orkestrasi Ekosistem Pariwisata: Mengelola tata kelola ekosistem yang berkualitas melalui pengaturan daya dukung destinasi (*carrying capacity*) dan kemitraan strategis lintas sektor yang akuntabel.

2.3 Tujuan

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) memiliki peran strategis sebagai akselerator pengembangan kepariwisataan di kawasan Labuan Bajo dan Flores. Pembentukan BPOLBF yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2018 mengamankan pelaksanaan dua fungsi utama, yaitu fungsi otoritatif dan koordinatif.

Fungsi otoritatif berfokus pada pelaksanaan kewenangan secara langsung dalam perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores seluas ±400 hektar yang berlokasi di Hutan Nggorang Bowosie. Dalam fungsi ini, BPOLBF berperan sebagai *master developer*, operator kawasan, sekaligus pengelola aset yang bertanggung jawab memastikan kawasan berkembang secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ruang lingkup fungsi ini mencakup penataan kawasan, penyediaan infrastruktur dasar,

pengembangan dan aktivasi atraksi wisata, pengelolaan kawasan berbasis skema Badan Layanan Umum (BLU), fasilitasi investasi, serta pengelolaan operasional dan pengendalian kawasan.

Sementara itu, fungsi koordinatif mencakup pelaksanaan peran BPOLBF dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, dan memfasilitasi pengembangan pariwisata di wilayah yang lebih luas, yaitu pada 11 kabupaten dalam Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Dalam fungsi ini, BPOLBF berperan sebagai *orchestrator* yang menjembatani kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pengembangan destinasi yang terintegrasi dan berdaya saing. Dengan dua fungsi tersebut, BPOLBF tidak hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan di kawasan otorita, tetapi juga sebagai penggerak utama ekosistem pariwisata Labuan Bajo Flores secara menyeluruh. Berikut merupakan uraian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi BPOLBF:

Tabel 2.1 Tugas & Fungsi BPOLBF

Kategori	Deskripsi
Tugas (Pasal 4)	a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores; dan
	b. Melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
Fungsi (Pasal 5)	a. Penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
	b. Penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
	c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
	d. Penyusunan perencanaan dan pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;

	e. Perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
	f. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores ;
	g. Penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores ; dan
	h. Pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah;

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores

Dalam rangka menjalankan kedua tugas dan fungsi tersebut, BPOLBF mengemban sejumlah fungsi strategis yang meliputi penyusunan rencana induk dan rencana detail pengembangan kawasan, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, perumusan strategi operasional pengembangan destinasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penetapan langkah strategis dalam penyelesaian permasalahan pengembangan kawasan. Seluruh fungsi ini dilaksanakan untuk memastikan pengembangan Labuan Bajo Flores berjalan secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspirasi, nilai budaya, karakteristik, serta partisipasi masyarakat lokal, serta membuka ruang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, tentunya dengan persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.

2.4 Sasaran Strategis

Rencana strategis BPOLBF adalah kerangka kerja bersama (*blueprint*) unit kerja di lingkungan BPOLBF dan rujukan bagi stakeholder pembangunan wisata di Labuan Bajo Flores dalam bekerja sa dengan BPOLBF. Oleh karena itu, fokus utama Renstra adalah menyusun peta jalan (*road map*) yang berisikan serangkaian kegiatan untuk mendorong dan memastikan keterpaduan, sinergitas, dan koherensi program pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores, terlebih khusus pada periode pemerintahan baru 2025-2029.

Buku Renstra BPOLBF ini diharapkan tidak hanya menjadi rujukan internal, namun juga kementerian/lembaga terkait yang mendukung pengembangan Labuan Bajo Flores serta pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di lingkungan Provinsi NTT. Sebagai entitas strategis dalam pengembangan pariwisata nasional,

BPOLBF memiliki sasaran strategis yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan potensi Labuan Bajo dan Flores sebagai destinasi wisata kelas dunia. Sasaran-sasaran ini merupakan turunan yang disesuaikan dari sasaran strategis Kedeputan Destinasi Kementerian Pariwisata, sekaligus menunjang program strategis Menteri Pariwisata. Meskipun demikian, perumusan sasaran BPOLBF didesain berbeda dan spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam tujuan pembentukannya, yakni untuk mengakselerasi pengembangan kawasan otoritatif secara komprehensif.

Secara umum, sasaran strategis BPOLBF berfokus pada lima pilar utama: peningkatan citra dan kunjungan wisatawan, pertumbuhan industri dan investasi, peningkatan kualitas destinasi, penguatan kolaborasi, serta peningkatan kualitas layanan internal. Kelima pilar ini saling terkait dan menjadi fondasi bagi pencapaian visi BPOLBF untuk menjadikan Labuan Bajo Flores sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Berikut adalah rincian sasaran strategis beserta indikator kinerja utama yang menjadi acuan keberhasilan BPOLBF.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis BPOLBF

SP 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	
IKSP 1.1. Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kunjungan
IKSP 1.2 Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara ke Destinasi pariwisata Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Perjalanan
IKSP 1.3 Jumlah Investasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	USD
IKSP 1.4 Realisasi Jumlah PNPB BLU Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores	Juta Rupiah
SK1. Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	
IKSK 1.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan
IKSK 1.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan
SK.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	
IKSK 2.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi
IKSK 2.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan
SK.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	
IKSK 3.1 Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	Unit
IKSK 3.2 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Km/hektar/wilayah
IKSK 3.3 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Unit
IKSK 3.4 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan
SK.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	
IKSK 4.1 Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	Kesepakatan
IKSK 4.3 Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan

IKSK 4.4 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan
SK.5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	
IKSK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks
IKSK 5.2 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks
IKSK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Presentase
SK.6 Meningkatnya Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Pariwisata	
IKSK 6.1 Indeks Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Nilai

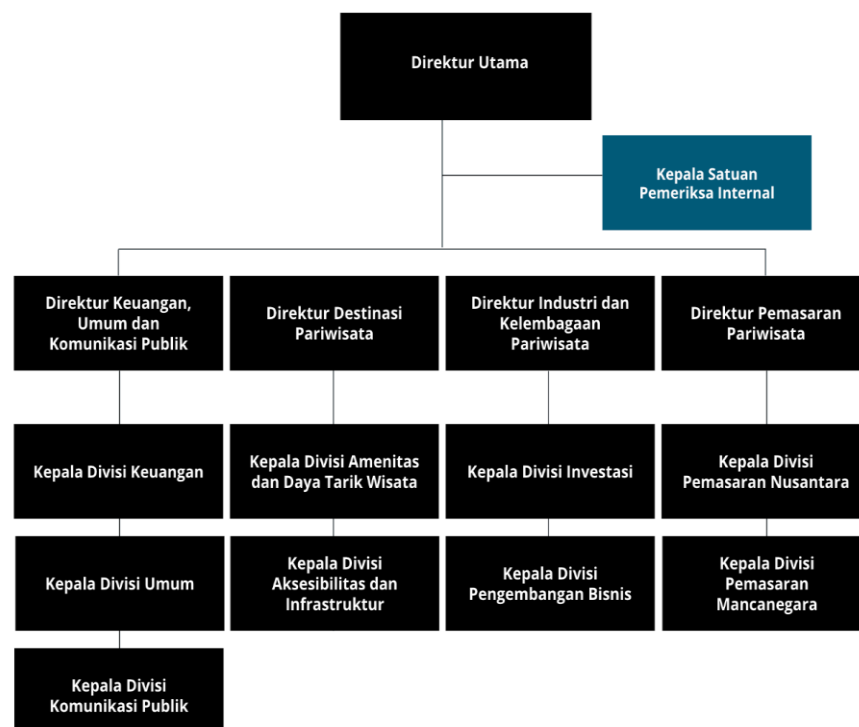
2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores disusun secara fungsional dan hierarkis sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018. Struktur organisasi tersebut dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan tugas dan fungsi badan, serta didukung oleh Satuan Pemeriksa Intern yang melaksanakan fungsi pengawasan internal guna memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan operasional, BPOLBF didukung oleh empat direktorat utama yang memiliki peran strategis dan saling melengkapi, yaitu Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, administrasi umum, pengembangan sumber daya manusia, serta komunikasi publik; Direktorat Industri dan Kelembagaan yang melaksanakan fungsi pengembangan ekosistem usaha pariwisata, fasilitasi investasi, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan; Direktorat Destinasi Pariwisata yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengelolaan kawasan, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan amenitas dan daya tarik wisata; serta

Direktorat Pemasaran Pariwisata yang melaksanakan fungsi pemasaran destinasi secara terpadu guna meningkatkan citra dan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Masing-masing direktorat didukung oleh unit-unit pelaksana teknis pada tingkat divisi sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga dengan struktur organisasi dan pembagian fungsi yang jelas tersebut, BPOLBF memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam mengakselerasi pengembangan kawasan Labuan Bajo Flores sebagai destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPOLBF

A photograph of a traditional building with a steep, conical thatched roof made of dark, layered straw or reeds. The roof is topped with a small, dark, crescent-shaped ornament. The building's walls are made of light-colored wood. In the foreground, there is a low, rustic stone wall made of large, irregular grey stones. The background is a clear, bright blue sky.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah landasan perencanaan pembangunan di Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian (Renstra). Sejalan dengan hal tersebut, maka penyusunan Renstra Kementerian Pariwisata 2025-2029 ini selaras dengan rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJPN dan RPJMN. RPJPN bertujuan mencapai visi dan misi bernegara yaitu “Negara yang merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Visi dan misi bernegara tersebut diterjemahkan menjadi visi RPJPN 2025-2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Dari visi tersebut, Kementerian Pariwisata memiliki peran dalam mencapai semua visi tersebut dan paling berkaitan dengan upaya mencapai Indonesia yang Bersatu, Maju, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia bersatu yaitu Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila serta mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang lebih kokoh.

Dalam rangka memastikan perumusan kebijakan yang relevan, responsif, dan berdampak luas, seluruh arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Kemenpar Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan sebagai prinsip dasar pembangunan nasional. Kelima aspek tersebut meliputi:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan

2. Pengarusutamaan SDGs

Pengarusutamaan SDGs mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui:

(a) Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) Mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam RPJMN; (c) Penyusunan rencana aksi nasional dan penguatan kolaborasi multi pihak; (d) Pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) Inklusi sosial dan keberlanjutan.

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan superapps) serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMN Tahun 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral, (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (3) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat

bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Kelima prinsip di atas menjadi fondasi dalam setiap perumusan arah kebijakan, program, dan kegiatan, guna memastikan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta daya saing bangsa dalam jangka panjang.

Target capaian Renstra Kementerian Pariwisata 2025-2029 untuk dapat mendukung pencapaian Agenda Pembangunan yang tercantum pada RPJPN yaitu rasio PDB Pariwisata dari 5% di tahun 2029 menjadi 8% di tahun 2045 serta devisa pariwisata dari 32 miliar USD pada tahun 2029 menjadi 100 miliar USD pada tahun 2045.

Selain selaras dengan RPJPN, Renstra Kementerian Pariwisata 2025-2029 merujuk pada RPJMN 2025-2029. Renstra Kementerian Pariwisata 2025-2029 bertujuan untuk mencapai Prioritas Nasional (PN) 3 yaitu, *“Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”*. Indikator pencapaian prioritas nasional tersebut yaitu Rasio PDB Pariwisata 5% dan devisa pariwisata 32-39.4 miliar USD.

Untuk mencapai PN 3 tersebut maka Prioritas Pembangunan (PP) sektor pariwisata yaitu, *“Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan”*. Sasaran PP sektor pariwisata yaitu, *“Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan”* dengan lima indikator PP dan target capaian pada 2029 sebagai berikut:

1. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara yaitu rata pengeluaran wisatawan mancanegara di tiap kedatangan (*average spending per arrival*) dengan target USD 1.600-1672 per kunjungan.
2. Tenaga Kerja Pariwisata 29 juta orang.
3. Indeks Pembangunan Pariwisata (*Travel and Tourism Development Index*) Peringkat 20 besar.
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 20-23,59 juta kunjungan.
5. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 1.5 Miliar perjalanan (MPD).

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pariwisata. Perumusan arah

pengembangan tersebut mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, serta memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan pariwisata nasional ke depan.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Arah Kebijakan menyatakan bahwa arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk itu dibentuklah arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan/ sasaran strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029. Arah kebijakan Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 terbagi menjadi lima ruang lingkup utama yaitu:

1. Pengembangan Produk Pariwisata yang adaptif, sinergis, dan berkualitas
2. Pengembangan SDM Pariwisata yang unggul dan berdaya saing
3. Pengembangan pariwisata yang menunjang keberlanjutan dan keadilan sosial
4. Kolaborasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan pariwisata
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kementerian Pariwisata yang baik dan bersih

Dalam periode 2025-2029, Kementerian Pariwisata memiliki lima arah kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Setiap arah kebijakan diiringi dengan strategi spesifik, melibatkan unit pelaksana, serta relevansi terhadap sasaran strategis dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Unit pelaksana 34 utama di dalam Kementerian Pariwisata bertanggung jawab untuk menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan searah dengan arah kebijakan sehingga dapat mencapai sasaran strategis kementerian. Setiap arah kebijakan mengedepankan kolaborasi intraorganisasional di dalam internal Kementerian Pariwisata maupun dengan lintas Kementerian/Lembaga terkait. Arah kebijakan Kementerian Pariwisata juga mendorong kolaborasi intra-organisasional dengan organisasi lainnya baik sektor privat, lembaga non profit, perguruan tinggi dan masyarakat.

Terdapat sejumlah program *quick wins* untuk dapat mendukung pencapaian target pembangunan Kementerian Pariwisata. Pelaksanaan *quick wins* ini membutuhkan

kolaborasi dan komitmen seluruh bagian Kementerian Pariwisata dan juga kolaborasi yang kuat dengan Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah. Berikut sejumlah *quick wins* yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata:

1. Intensifikasi Program Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI)

Program Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI) adalah program inisiatif untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata dalam negeri. BBWI menyediakan beraneka ragam paket wisata menarik yang terintegrasi, kampanye/*branding*, dan efisiensi biaya transportasi. Termasuk dalam *quick wins* ini adalah upaya untuk meningkatkan pembentukan Satgas wisata bersih di destinasi wisata. Pesan utama dalam meningkatkan minat masyarakat atas program ini yaitu agar masyarakat menikmati sensasi liburan seru dengan hemat sambil membantu penguatan sektor pariwisata serta ekonomi tanah air dengan Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI).

2. Tourism 5.0: Pemasaran dan *Calendar of Events*

Quick wins adalah respons dan adaptasi atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat di semua sektor termasuk pariwisata. Potensi dan tantangan ini mendorong munculnya program inovatif dengan mendayagunakan perkembangan teknologi dan informasi serta mengikuti perubahan perilaku wisatawan. Salah satu perilaku wisatawan pada era digital saat ini adalah mencari berbagai informasi wisata secara *online*. *Tourism 5.0* adalah program yang menyediakan berbagai alternatif program dan informasi tentang destinasi pariwisata di Indonesia untuk dapat meningkatkan minat wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Program ini termasuk digitalisasi *calendar of events* dan pengembangan fitur I Program Tourism 5.0 juga termasuk dalam penyelenggaraan dan dukungan pada pelaksanaan acara nasional dan internasional. Kolaborasi yang kuat sangat penting dalam melaksanakan *quick wins* ini khususnya dalam mendorong percepatan 58 implementasi sistem proses perizinan penyelenggaraan acara internasional secara digital dengan berkolaborasi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaku Usaha

Sumber daya manusia dan pelaku usaha sangat mempengaruhi pengalaman wisatawan karena interaksi langsung dengan wisatawan dan menentukan penilaian atas kualitas pengalaman berwisata di Indonesia. Atas dasar itu maka perlu ada *quick wins* untuk mendorong munculnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha. Termasuk dalam program ini adalah komisi sektoral pariwisata revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi serta pemberdayaan desa wisata. Kolaborasi yang kuat sangat penting dalam

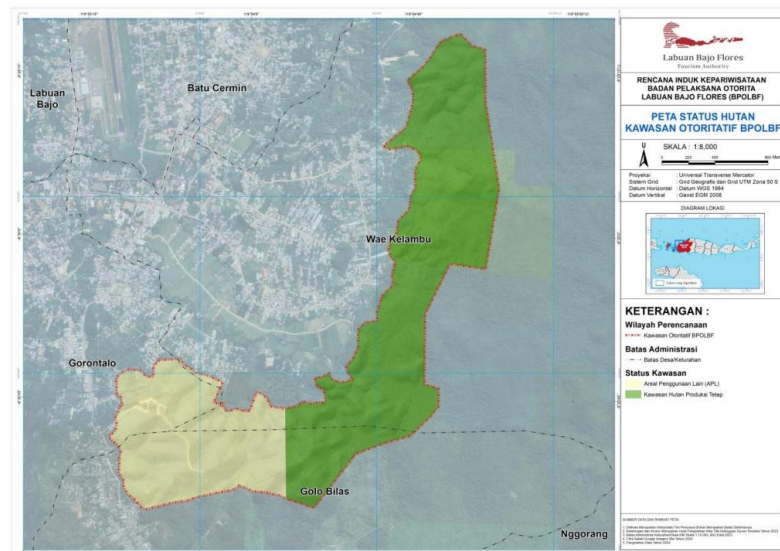
melaksanakan *quick wins* ini dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kolaborasi sebagai mitra strategis sangat diperlukan khususnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja pariwisata.

4. Penyesuaian Harga Tiket Pesawat Terjangkau

Harga tiket perjalanan udara adalah salah satu tantangan dan peluang dalam pemerataan akses ke seluruh destinasi wisata di Indonesia. Tingginya biaya perjalanan udara menjadi salah satu tantangan yang sangat mempengaruhi minat wisatawan dalam mengunjungi destinasi wisata tertentu dan berpotensi menurunkan pengeluaran wisatawan, lama tinggal wisatawan di sebuah destinasi wisata, dan mobilitas wisatawan antar destinasi wisata di seluruh wilayah di Indonesia. Sebaliknya, harga tiket pesawat yang terjangkau dapat menjadi peluang dalam mendorong minat wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia. Oleh karena itu, *quick win* penyesuaian harga tiket pesawat yang terjangkau ini muncul. pelaksanaan *quick wins* ini sangat membutuhkan kolaborasi tinggi antara Kementerian dan Lembaga..

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOLBF di Wilayah Otoritatif

3.2.1.1 Landasan Strategis dan Tujuan Pengembangan Kawasan Parapuar



Gambar 3.1 Gambar Peta Status Kawasan Otoritatif BPOLBF

Sumber : Dokumen Rencana Induk Kepariwisata (2024-2044)

Kawasan otoritatif BPOLBF berada di 8°30'59.80" Lintang Selatan (LS) dan 119°54'15.33" Bujur Timur (BT), Desa/Kelurahan Wae Kelambu, Golo Bilas dan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau yang saat ini

disebut sebagai Kawasan Parapuar. Kawasan Parapuar yang berada dalam lanskap Hutan Bowosie merupakan bagian integral dari agenda percepatan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Secara ekologis, kawasan Parapuar memiliki fungsi strategis sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) bagi sistem perkotaan Labuan Bajo, sehingga pengembangannya diarahkan sebagai bagian dari kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus optimalisasi pengembangan wisata darat (*mainland tourism*) guna menyeimbangkan struktur destinasi yang selama ini didominasi oleh wisata bahari. Dalam kerangka tersebut kawasan Parapuar diposisikan sebagai kawasan prioritas yang memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya untuk memperluas sebaran aktivitas wisatawan, meningkatkan lama tinggal (*length of stay*), serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Kawasan ini memiliki luas sekitar 400 hektar sebagaimana Perpres No.32 tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dimana Pembentukan peraturan ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dapat dilaksanakan melalui BPOLBF. Pengembangan tahap pertama kawasan otoritatif BPOLBF berfokus kepada sub kawasan / zona 1 Parapuar sebesar 129,6 Hektar yang telah memiliki sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) pada tahun 2023 serta penambahan 3.631 m² sebagai akses masuk kawasan dari jalan trans Flores yang telah memperoleh sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) pada tahun 2024. Kepastian legalitas tersebut menjadi dasar dalam percepatan pembangunan kawasan serta membuka peluang pengembangan investasi yang terarah dan terukur.

Adapun Pengembangan kawasan Parapuar didasarkan pada sejumlah landasan strategis yang menjadi acuan dalam perencanaan dan implementasi, antara lain:

- **Kebijakan Nasional dan Regulasi**, termasuk Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai dasar pembentukan dan kewenangan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dalam mengelola kawasan otoritatif.
- **Rencana Induk Kepariwisata BPOLBF Tahun 2022–2044**, sebagai pedoman utama dalam penataan ruang, pengembangan kawasan, serta arah investasi pariwisata.
- **Pendekatan 3ECNC (Ethno–Eco–Edu–Culture & Nature Conservation)**, sebagai kerangka pengembangan yang mengintegrasikan kearifan lokal, konservasi lingkungan, edukasi, dan pelestarian budaya dalam satu sistem pembangunan destinasi berkelanjutan.

- **Standar Daya Saing Global**, yang mengacu pada indikator Travel & Tourism Development Index (TTDI), khususnya pada aspek kesehatan, kebersihan, keberlanjutan lingkungan, dan kesiapan teknologi digital.
- **Skema Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)**, yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, optimalisasi aset kawasan, serta pengembangan kerja sama investasi untuk mendukung kemandirian fiskal kawasan.

Sebagai tindak lanjut dari arah pengembangan, pengelolaan kawasan Parapuar dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kawasan yang selaras dengan Rencana Induk Kepariwisataaan BPOLBF Tahun 2022–2044 melalui **tiga strategi utama** yaitu

1. **Penguatan pembangunan sumber daya kawasan otoritatif**, yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan fasilitas kawasan, serta penataan ruang berbasis klaster guna meningkatkan kualitas dan daya dukung kawasan.
2. **Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia BPOLBF**, melalui peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola, serta kompetensi SDM dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang profesional dan berkelanjutan.
3. **Penguatan penerimaan dan investasi di kawasan otoritatif**, yang dilakukan melalui optimalisasi skema Badan Layanan Umum (BLU), pengembangan kerja sama pemanfaatan lahan, serta penciptaan ekosistem investasi yang kondusif dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian fiskal kawasan.

Implementasi arah kebijakan pembangunan kawasan juga memperhatikan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh, meliputi :

- Keberlanjutan lingkungan melalui pengendalian pemanfaatan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung, konservasi ekosistem, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya;
- Keberlanjutan sosial budaya melalui perlindungan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal serta peningkatan peran masyarakat dalam aktivitas kepariwisataan;
- Keberlanjutan pola ruang dan struktur bangunan melalui penataan ruang yang terintegrasi, pengendalian intensitas pemanfaatan ruang, serta penerapan standar bangunan yang kontekstual dan berwawasan lingkungan;
- Penguatan aspek pengendalian melalui pengaturan kewajiban, sanksi, dan mekanisme pengawasan guna menjamin kepatuhan seluruh pemangku kepentingan;

- serta Penerapan manajemen pengunjung wisatawan (*tourist visitor management*) melalui pengaturan kapasitas daya tampung, distribusi, dan aktivitas wisata secara terukur guna menjaga kualitas pengalaman wisata dan keberlanjutan destinasi.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi penguasaan dan pengelolaan kawasan, dari total luasan $\pm 134,58$ hektar, BPOLBF telah memperoleh sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 129,60 hektar, sementara masih terdapat sisa luasan sekitar $\pm 4,98$ hektare yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut, karena lahan tersebut beririsan langsung dengan lahan milik masyarakat baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang belum, sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif, terkoordinasi, dan berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat, di sisi lain penyempurnaan batas kawasan masih diperlukan guna memastikan kejelasan batas spasial serta optimalisasi luasan kawasan yang dapat dikelola secara penuh oleh BPOLBF.

Lebih lanjut, dalam konteks legalisasi keseluruhan kawasan otorita Labuan Bajo Flores, masih terdapat sisa luasan sekitar $\pm 265,42$ hektare yang memerlukan penyelesaian status lahan. Terkait hal tersebut, BPOLBF mengusulkan perubahan skema penyelesaian lahan, dari yang semula menggunakan skema perizinan pemanfaatan kawasan hutan (IUPJWA/PBPH seturut amanat Perpres 32/2018 yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan regulasi dibidang kehutanan) **menjadi skema pelepasan kawasan hutan** dari fungsi Hutan Produksi Tetap menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Usulan saat ini telah masuk dalam proses revisi Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, khususnya pada aspek legalitas dan skema pengelolaan lahan. Revisi tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dalam proses perubahan skema, sehingga mendukung percepatan pengembangan kawasan otorita secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3.2.1.2 Konsep, Zonasi, dan Pelibatan Masyarakat

Konsep Pengembangan kawasan dilaksanakan melalui **pendekatan terintegrasi Ethno-Eco-Edu-Culture & Nature Conservation (3ECNC)** yang menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, dan konservasi lingkungan, serta didukung melalui penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan atraksi dan amenitas, serta peningkatan aksesibilitas kawasan secara bertahap dan terencana. Konsep pendekatan 3ECNC diharapkan dapat memberikan panduan bagi

pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan di kawasan Parapuar, Labuan Bajo, dengan memperhatikan aspek budaya dan edukasi masyarakat secara holistik. Konsep-konsep ini bersama-sama membentuk visi Parapuar untuk memastikan pengembangan Labuan Bajo yang berkelanjutan, melibatkan kearifan lokal, pelestarian lingkungan, peningkatan pendidikan, promosi budaya, dan konservasi alam secara holistik dan terintegrasi. Berikut adalah uraian serta penjelasan dari masing-masing konsep:

1. **Etno (Etnik):** Melibatkan pendekatan berbasis budaya lokal, nilai-nilai, struktur sosial, serta kearifan lokal masyarakat Manggarai. Ini mencakup Pengetahuan tradisional seperti sistem pertanian *lodok*, pola ruang berbasis komunitas, serta filosofi *Gendang One–Lingko Pe'ang* tidak hanya dipertahankan sebagai simbol budaya, tetapi diinternalisasikan dalam desain kawasan dan tata kelola pariwisata. Dengan demikian, masyarakat lokal tidak diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan keberlanjutan pengembangan kawasan.
2. **Eco (Ekologi):** pendekatan yang diterapkan menekankan prinsip ekowisata dan keberlanjutan lingkungan melalui keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Strategi pengembangan kawasan membatasi pembangunan fisik hanya pada sekitar 20% dari total area, sementara 80% sisanya dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau guna menjaga fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati. Prinsip *low impact development* diimplementasikan melalui penggunaan energi terbarukan seperti panel surya, sistem drainase berkelanjutan yang adaptif terhadap kondisi topografi, serta pengembangan sistem transportasi kawasan yang ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan degradasi lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan kawasan terhadap tekanan pembangunan dan perubahan iklim.
3. **Edu (Pendidikan):** pengembangan Parapuar diwujudkan melalui konsep kawasan sebagai ruang pembelajaran terbuka (*open learning space*). Fasilitas seperti *botanical garden*, pusat interpretasi budaya, dan program wisata edukatif dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya, sekaligus membangun kapasitas lokal dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi dengan institusi pendidikan, peneliti, dan komunitas lokal juga menjadi bagian penting dalam pengembangan konsep *living lab*, dimana kawasan Parapuar berfungsi sebagai laboratorium hidup untuk inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

4. **Cultural (Budaya):** pengembangan kawasan diarahkan pada pelestarian sekaligus revitalisasi ekspresi budaya lokal sebagai bagian integral dari daya tarik wisata. Penyediaan ruang-ruang budaya seperti pusat seni, amfiteater, dan museum budaya memungkinkan terjadinya interaksi dinamis antara pelaku budaya dan wisatawan. Kegiatan budaya seperti pertunjukan tari *Caci* (Tarian Tradisional Manggarai), produksi tenun ikat, serta pengembangan kuliner khas Manggarai tidak hanya ditampilkan sebagai atraksi, tetapi dihidupi sebagai praktik keseharian yang memperkuat identitas kawasan. Dengan demikian, budaya tidak direduksi menjadi komoditas semata, melainkan tetap dijaga sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
5. **Natural Conservation:** menempatkan Hutan Bowosie sebagai elemen kunci dalam menjaga keseimbangan ekologis kawasan Labuan Bajo. Pendekatan konservasi dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang berbasis zonasi yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan aktivitas wisata berbasis konservasi yang bersifat edukatif dan minim dampak. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada perlindungan ekosistem, tetapi juga mendukung agenda mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui penguatan fungsi kawasan sebagai penyerap karbon dan pengatur tata air.

Secara keseluruhan, Konsep 3ECNC dalam pengembangan kawasan Parapuar merupakan suatu model integratif yang menghubungkan kearifan lokal dengan inovasi teknologi ramah lingkungan, pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi kreatif, serta edukasi partisipatif dengan praktik wisata yang bertanggung jawab. Pendekatan ini melampaui sekadar konsep normatif, dan berfungsi sebagai kerangka kerja operasional yang mampu menciptakan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Melalui implementasi yang konsisten dan adaptif, kawasan Parapuar diharapkan tidak hanya berkembang sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga sebagai pusat inovasi sosial dan lingkungan yang merepresentasikan paradigma baru pariwisata masa depan yakni pariwisata yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal, sekaligus responsif terhadap tantangan global keberlanjutan.

Dalam implementasinya, pengembangan kawasan dilakukan melalui penetapan **peruntukan lahan makro (sub kawasan)** yang disusun secara fungsional dan terintegrasi. Peruntukan lahan tersebut meliputi:

- (1) **Perkantoran**, sebagai pusat pengelolaan dan operasional kawasan;
- (2) **Perdagangan dan Jasa**, yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan wisata;
- (3) **Kebudayaan**, sebagai ruang pelestarian dan ekspresi budaya lokal;

- (4) **Budi Daya**, yang mengakomodasi kegiatan produktif masyarakat berbasis lahan;
- (5) **Wisata dan Rekreasi**, sebagai inti pengembangan atraksi wisata berbasis alam dan pengalaman pengunjung;
- (6) **Perhotelan**, sebagai penyedia akomodasi wisatawan; serta
- (7) **Pelayanan Umum**, yang mencakup fasilitas pendukung seperti kesehatan, keamanan, dan utilitas kawasan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari peruntukan lahan makro tersebut, disusun **Rencana Pengembangan Sub-Kawasan/Zona 1** di kawasan Parapuar yang mencakup beberapa komponen utama pengembangan kawasan secara terintegrasi.

Selanjutnya, pelibatan masyarakat merupakan bagian integral dalam pengembangan kawasan, khususnya masyarakat di Desa Golo Bilas, Desa Gorontalo, dan Kelurahan Wae Kelambu yang merupakan masyarakat penyangga kawasan Parapuar. Pelibatan tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produk kreatif berbasis lokal. Pelaksanaan strategi tersebut perlu didukung melalui program pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi kemitraan antara masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan di kawasan.

3.2.1.3 Legalitas, Peluang Investasi, dan Infrastruktur Penunjang

Sesuai dengan **Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 110/HPL/KEM-ATR/BPN/IX/2023**, kawasan otorita yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores telah memiliki dasar legalitas pengelolaan yang jelas. Berdasarkan keputusan tersebut, BPOLBF memperoleh **Hak Pengelolaan (HPL)** atas kawasan Parapuar yang diperkuat dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 24.16.00.00.5.00003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan luas wilayah sekitar **±129,6 hektar**. Kepastian legalitas ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan kawasan sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengembangan kawasan dan peluang investasi.

Dalam mendukung pengembangan kawasan yang terarah dan terstruktur, peruntukan lahan di kawasan Parapuar seluas ±129,6 hektar ditetapkan melalui pembagian zona perencanaan ke dalam beberapa subzona yang membentuk **19 klaster ruang pengembangan**. Setiap klaster dirancang dengan peruntukan lahan yang spesifik sesuai dengan tema kegiatan yang diusung, termasuk di dalamnya

penetapan fungsi klaster atau tapak, serta fungsi bangunan yang akan dikembangkan. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang kawasan yang terintegrasi, memastikan kesesuaian antara fungsi ruang dengan karakter kawasan, serta mendukung pengembangan destinasi wisata berbasis tema yang beragam dan berkelanjutan. Adapun pengelompokan fungsi atau tema tapak, fungsi bangunan, serta luas tapak pada masing-masing klaster disajikan pada tabel dan peta berikut :

Tabel 3.1 Sebaran Klaster Berdasarkan Fungsi / Tema Tapak, Fungsi Bangunan dan Luas Tapak

Nomor	Klaster	Fungsi/Tema Tapak	Fungsi Bangunan	Luas Tapak (Ha)	Luas Tapak (m ²)
K.01	A	<i>Eco Management Office, Edu Tourist Information Centre (TIC), dan Etno Stakeholder Forum Office</i>	Perkantoran	0.22	2.175,36
		<i>Utility Building and Halte Shuttle</i>	Perkantoran	0.05	560,79
K.02	B	<i>Eco Factory Outlet and Etno UMKM Kiosk</i>	Perdagangan	0.35	3.522,04
		<i>Eco Greenhouse</i>	Budi Daya	0.21	2.074,25
		<i>Eco Service Building (BOH)</i>	Perkantoran	0.10	993,89
K.03	C	<i>Eco Forest Restaurant</i>	Perdagangan	0.30	2.999,36
K.04	D	<i>Eco Premium Boutique Resort</i>	Wisata & Rekreasi	1.22	12.239,88
K.05	E	<i>Eco Cliff Restaurant</i>	Perdagangan	1.07	10.658,56
K.06	F	<i>NTT, Flores, Manggarai dan Bajo Cultural Centre, Etno Ecological Museum</i>	Kebudayaan	1.16	11.649,06
K.07	G	<i>Eco Wall Climbing</i>	Wisata & Rekreasi	0.74	7.384,99
K.08	H	<i>Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Ekologis</i>	Pelayanan Umum	0.46	4.621,23
K.09	I	<i>Ecological Hiking, Jogging, dan Running Centre</i>	Wisata & Rekreasi	0.28	2.801,55
		<i>Eco Creative Hub</i>	Wisata & Rekreasi	0.43	4.281,04
		<i>Educational Outbound Area</i>	Wisata & Rekreasi	0.38	3.794,91
		<i>Amphitheatre</i>	Wisata & Rekreasi	0.32	3.197,08
		<i>Edu Child Friendly Playground</i>	Wisata & Rekreasi	0.53	5.330,33
K.10	J	<i>Eco Parapuar 360° Outlook Gallery Cafe (Natas)</i>	Wisata & Rekreasi	0.57	5.659,09
K.11	K	<i>Edu Traditional Cultural Village with Etno Outdoor Theatre</i>	Kebudayaan	1.36	13.581,10

K.12	L	<i>Edu Mini Zoo</i>	Wisata & Rekreasi	1.06	10.623,83
		<i>Natural Reserve Park Centre</i>	Budi Daya	0.80	8.039,44
		<i>Edu Botanical Garden, dan Ethnological Lodok</i>	Budi Daya	0.51	5.065,93
		Bangunan Gedung Parkir	Pelayanan Umum	0.29	2.900,09
K.13	M	<i>Ecological Forest Healing dan Regenerative Tourism Centre</i>	Wisata & Rekreasi	1.03	10.270,48
K.14	N	<i>Ecological and Educational Premium Glamping</i>	Wisata & Rekreasi	0.61	6.100,37
K.15	O	<i>Yoga and Eco Meditation</i>	Wisata & Rekreasi	0.27	2.738,58
K.16	P	<i>Ecological Family Resort Hotel</i>	Perhotelan	1.85	18.516,99
K.17	Q	<i>Eco MICE</i>	Perkantoran	1.08	10.838,65
		<i>Eco Hotel</i>	Perhotelan	0.26	2.553,66
K.18	R	<i>Eco Eiger Café</i>	Perdagangan	0.35	3.528,06
K.19	S	Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) Ekologis	Pelayanan Umum	0.07	667.58
J.01		Jalan Kolektor		0.95	9.542.59
J.02		Jalan Lokal		1.63	16.306.29
J.03		Jalan Inspeksi (Aspal)		0.49	4.852.02
J.04		Halte		0.05	465.67
J.05		Drainase $\geq$ 1 Meter		0.68	6.849.11
J.06		Drainase		0.47	4.666.89
J.07		Bak Kontrol		0.01	83.00
J.08		Bahu Jalan		0.06	557.89
J.09		Area Hijau		0.20	1.971.17
J.10		Jalur Sepeda		1.20	12.027.79
J.11		Kanstin		0.47	4.733.22
J.12		Median Jalan		0.08	761.71
J.13		Ramp		0.00	41.37
J.14		Trotoar		1.13	11.345.23
J.15		Akses Tangga Jembatan Gantung		0.16	1.598.54
J.16		Bahu Jalan		1.03	10.278.60
J.17		Bak Kontrol		0.00	7.00
J.18		Drainase		0.31	3.138.28
J.19		Jalan Inspeksi (Sirtu)		1.30	12.954.24
J.20		Jalan Inspeksi (Tangga)		0.33	3.258.32
J.21		Jalur Tracking		0.15	1.503.36

[illegible]

Sumber : Dokumen Masterplan Sub - Kawasan / Zona 1 Parapuar (2024)

- **Ukuran dan Bentuk Tapak:** setiap tapak dirancang dengan menyesuaikan fungsi bangunan dan kebutuhan ruang yang akan dikembangkan pada masing-masing klaster.
- **Aksesibilitas dan Infrastruktur:** Menyediakan akses jalan, utilitas (listrik, air, sanitasi), dan fasilitas pendukung.
- **Jarak Antar Tapak:** Pengaturan jarak antar tapak dilakukan dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, serta kualitas lingkungan kawasan.

- Kesesuaian dengan Peraturan: Mematuhi regulasi zoning dan peraturan bangunan yang berlaku

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan, penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagai berikut:

- Secara umum diarahkan tidak lebih dari 40% dari luas tapak.
- Pada klaster lahan datar maksimal 40% sedangkan pada klaster lahan didominasi kontur tajam maksimal 30%
- Pada klaster dengan tema aktivitas ruang luar maksimal 20%, sedangkan pada klaster dengan tema taman dan hutan maksimal 10%

Pengaturan KDB juga selaras dengan komitmen BPOLBF dalam menjaga keseimbangan kawasan melalui penguatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang mengharuskan setiap pemanfaatan lahan untuk menyediakan RTH minimal sebesar 30% dari luas lahan. RTH yang direncanakan mencakup taman, hutan, kebun, area konservasi dan lanskap alami yang tak terbangun.

Pengaturan klaster tersebut menjadi dasar dalam membuka peluang investasi yang terarah, di mana setiap klaster dapat dikembangkan sesuai dengan karakter dan potensi masing-masing, baik untuk pengembangan atraksi wisata, amenitas, maupun fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, pengembangan kawasan Parapuar tidak hanya memiliki kepastian legalitas, tetapi juga didukung oleh struktur perencanaan ruang yang jelas sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan serta implementasi investasi di masa mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores mendorong pengembangan kawasan melalui berbagai skema kemitraan investasi yang transparan dan berkelanjutan, antara lain melalui kerja sama pemanfaatan lahan dengan investor sektor pariwisata, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan fasilitas strategis, serta kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam pengembangan produk wisata. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan kualitas destinasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal serta memperkuat ekosistem pariwisata kawasan.

Selanjutnya, pengembangan kawasan juga dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Infrastruktur kawasan dirancang secara terpadu dan ramah lingkungan dengan memperhatikan sistem transportasi, jaringan utilitas bawah tanah, sistem drainase kawasan, penyediaan energi, serta pengelolaan sampah berbasis prinsip *reduce, reuse, recycle (3R)*. Selain penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan

kawasan juga diarahkan untuk memenuhi standar destinasi pariwisata global yang mengacu pada indikator Travel & Tourism Development Index (TTDI), khususnya pada aspek kesehatan, kebersihan, serta kesiapan teknologi digital, guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat daya saing destinasi pariwisata.

3.2.1.4 Pengelolaan Kawasan Parapuar

Pengembangan kawasan Parapuar sebagai kawasan pariwisata terpadu di wilayah Labuan Bajo Flores merupakan bagian dari strategi pengembangan destinasi pariwisata Labuan Bajo Flores yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing destinasi pariwisata nasional. Dalam konteks ini, pengembangan kawasan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi, tetapi juga pada pembentukan sistem pengelolaan kawasan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pengelola kawasan, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengembangan kawasan. Dengan status sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan **Badan Layanan Umum (BLU)**, BPOLBF memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya keuangan serta mengoptimalkan pemanfaatan aset kawasan untuk mendukung operasional dan pengembangan destinasi secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pengelolaan Kawasan Parapuar dilakukan melalui pendekatan *integrated destination management*, yaitu sistem pengelolaan destinasi yang mengintegrasikan perencanaan kawasan, pengembangan industri pariwisata, pemasaran destinasi, serta pengelolaan layanan kawasan dalam satu tata kelola yang terpadu.

Sejalan dengan arah pengembangan tersebut, Kawasan Parapuar dikembangkan dengan visi menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan berkelas dunia berbasis kearifan lokal dan konservasi alam. Visi ini diwujudkan melalui pendekatan **Ethno-Eco-Edu-Culture & Nature Conservation (3ECNC)**, yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal (*ethno*), keberlanjutan lingkungan (*eco*), aspek edukasi (*edu*), serta pelestarian budaya dan alam (*culture & nature conservation*) dalam setiap aspek pengembangan kawasan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian integral dari pengembangan destinasi, sekaligus memastikan bahwa kegiatan pariwisata tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Sebagai BLU, BPOLBF tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik dalam pengembangan destinasi pariwisata, tetapi juga mengelola berbagai aktivitas ekonomi

yang berkembang di kawasan melalui mekanisme kerjasama pemanfaatan kawasan, penyediaan layanan kawasan, serta pengembangan produk wisata yang dapat menghasilkan pendapatan layanan. Pendapatan tersebut selanjutnya dikelola kembali untuk mendukung operasional kawasan, pemeliharaan infrastruktur, pengembangan fasilitas wisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengelolaan Kawasan Parapuar dilakukan melalui koordinasi lintas direktorat dalam struktur organisasi BPOLBF yang terdiri atas Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik, Direktorat Industri dan Kelembagaan, Direktorat Destinasi, Direktorat Pemasaran, serta Satuan Pemeriksa Intern. Masing-masing direktorat memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa pengembangan kawasan berjalan secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional destinasi. Dengan pendekatan ini, pengelolaan Kawasan Parapuar diharapkan mampu menjadi model pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

1. Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik

Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum, serta komunikasi publik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPOLBF secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai unsur pendukung tata kelola organisasi, direktorat berperan dalam memperkuat kualitas administrasi kelembagaan, pengelolaan keuangan berbasis kinerja, penguatan layanan organisasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik yang informatif dan adaptif guna mendukung pencapaian sasaran strategis BPOLBF.

Divisi Keuangan berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan organisasi melalui pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian anggaran, pengelolaan penerimaan dan belanja BLU, penatausahaan dan pelaporan keuangan, serta monitoring dan evaluasi kinerja anggaran guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Strategi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2025–2029 difokuskan pada optimalisasi pengelolaan anggaran yang bersumber dari BLU, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap pedoman dan pola pengelolaan keuangan BLU sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditarget akan bersumber dari layanan pengelolaan kawasan Otorita Parapuar yang meliputi layanan aktivasi tiket masuk kawasan Parapuar, layanan sewa lahan, layanan penunjang pariwisata lainnya seperti penyelenggaraan event baik tingkat lokal, nasional hingga internasional.

Selain pengelolaan keuangan, direktorat ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta dukungan hukum bagi seluruh aktivitas pengelolaan kawasan. Fungsi hukum memiliki peran penting dalam penyusunan perjanjian kerja sama pemanfaatan kawasan dengan investor serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam aspek komunikasi publik, direktorat ini juga menjalankan fungsi komunikasi strategis untuk membangun citra positif lembaga dan kawasan Parapuar serta menjaga hubungan yang harmonis antara BPOLBF, pemerintah daerah, investor, dan masyarakat. Komunikasi publik yang transparan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengembangan kawasan sekaligus mengelola berbagai isu yang mungkin muncul seiring dengan perkembangan investasi di kawasan.

Strategi pengelolaan kawasan Parapuar oleh Divisi Komunikasi Publik dirancang sebagai upaya terpadu untuk membangun citra kawasan, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan arus informasi yang transparan, akurat, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengintegrasikan kemitraan media, media monitoring, pengelolaan media sosial, layanan PPID, serta forum stakeholder dalam satu kerangka komunikasi yang saling mendukung.

Kemitraan media menjadi pilar utama dalam memperluas jangkauan informasi dan publikasi kawasan Parapuar. Melalui hubungan yang strategis dan berkelanjutan dengan media lokal, nasional, hingga internasional, Divisi Komunikasi Publik memastikan setiap program, kegiatan, dan perkembangan kawasan tersampaikan secara positif, berimbang, dan tepat sasaran. Media tidak hanya diposisikan sebagai kanal publikasi, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun narasi pembangunan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga kualitas informasi yang beredar, dilakukan media monitoring secara berkala guna memetakan persepsi publik, mengidentifikasi isu strategis, serta merespons potensi krisis komunikasi secara cepat dan terukur. Hasil monitoring ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data,

dan relevan dengan dinamika opini publik.

Di sisi lain, pengelolaan media sosial difokuskan pada penyampaian konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif, dengan mengedepankan storytelling kawasan Parapuar sebagai destinasi yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya. Optimalisasi platform digital dilakukan melalui perencanaan konten yang konsisten, interaksi aktif dengan audiens, serta pemanfaatan tren komunikasi digital untuk meningkatkan engagement dan awareness publik.

Keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui penguatan fungsi PPID, yang memastikan seluruh informasi terkait pengelolaan kawasan dapat diakses secara mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Layanan informasi ini menjadi bagian penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan Parapuar.

Selanjutnya, forum stakeholder difasilitasi sebagai ruang dialog dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini berperan dalam menyelaraskan persepsi, menghimpun masukan, serta memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap pengembangan kawasan Parapuar.

Melalui strategi komunikasi yang terintegrasi ini, Divisi Komunikasi Publik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi dan penjaga reputasi kawasan Parapuar sebagai destinasi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

2. Direktorat Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Direktorat Industri dan Kelembagaan Pariwisata memiliki peran penting dalam mengembangkan ekosistem industri pariwisata serta memperkuat struktur kelembagaan yang mendukung pengelolaan kawasan. Dalam konteks pengembangan Kawasan Parapuar, direktorat ini bertanggung jawab dalam memfasilitasi masuknya investasi serta mengelola kerja sama pemanfaatan kawasan antara BPOLBF dan investor.

Kerja sama pemanfaatan kawasan dilakukan melalui berbagai skema kerja sama yang memungkinkan investor mengembangkan fasilitas pariwisata seperti resort, eco-lodge, pusat kegiatan budaya, serta fasilitas wisata lainnya di kawasan Parapuar. Dalam kerangka pengelolaan BLU, kerja sama tersebut tidak hanya bertujuan untuk menarik investasi, tetapi juga untuk menciptakan sumber

pendapatan layanan bagi BPOLBF melalui mekanisme pemanfaatan kawasan. Pendapatan tersebut kemudian digunakan kembali untuk mendukung operasional kawasan, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan destinasi.

Promosi kawasan Parapuar tidak hanya dilakukan melalui kerja sama investasi yang telah berjalan, tetapi juga perlu diperkuat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum investasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan pemanfaatan aset di Parapuar, seperti kerja sama pengembangan fasilitas pariwisata dan amenities pendukung, dapat dijadikan sebagai showcase nyata (proof of concept) untuk menunjukkan kesiapan kawasan kepada calon investor. Hal ini kemudian dipromosikan secara strategis dalam forum investasi dengan menampilkan keunggulan Parapuar, antara lain lokasi yang terintegrasi dengan destinasi super prioritas Labuan Bajo, dukungan infrastruktur dasar yang terus dikembangkan, kepastian pengelolaan oleh BPOLBF sebagai BLU, serta konsep pengembangan berbasis ekowisata, budaya, dan kearifan lokal. Selain itu, keikutsertaan dalam forum investasi juga menjadi sarana untuk memperluas jejaring, melakukan business matching, serta mempercepat peninjauan dan realisasi kerja sama investasi pada berbagai peluang usaha di Parapuar, seperti pengembangan restoran tematik, eco-lodge, pusat edukasi, dan fasilitas wisata berbasis pengalaman.

Selain pengelolaan kerja sama investasi, Direktorat Industri dan Kelembagaan Pariwisata juga berperan dalam membangun kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal. Penguatan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat menjadi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar turut memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan kawasan. Melalui pengembangan UMKM pariwisata, kemitraan usaha, serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, direktorat ini berperan dalam menciptakan ekosistem industri pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktorat Industri dan Kelembagaan Pariwisata berperan dalam mendorong terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan melalui Program Floratama Academy yang melibatkan pelaku UMKM lokal dan mitra strategis. Selain itu, Direktorat Industri dan Kelembagaan Pariwisata memfasilitasi pelaku UMKM lokal melalui proses kurasi untuk pengisian tenant di kawasan Parapuar, fasilitasi kerja sama, serta pengembangan dan pengelolaan unit usaha baru untuk meningkatkan daya tarik dan utilisasi kawasan. Selain itu, pendekatan ini juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam rantai nilai

pariwisata, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas. Lebih lanjut, Direktorat Industri dan Kelembagaan Pariwisata turut memastikan tata kelola operasional bisnis di Parapuar berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencakup pengelolaan pendapatan, penetapan tarif yang kompetitif, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja usaha secara berkala.

3. Direktorat Destinasi Pariwisata

Direktorat Destinasi Pariwisata memiliki peran dalam melaksanakan fungsi pengelolaan ruang kawasan dan pengembangan produk wisata di kawasan Parapuar sebagai bagian dari upaya mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan berkelas dunia yang berbasis pada kearifan lokal dan konservasi alam melalui pendekatan *Ethno-Eco-Edu-Culture & Nature Conservation* (3ECNC). Dalam kerangka tersebut, pengelolaan kawasan diarahkan untuk menjamin keterpaduan antara pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan atraksi wisata, konservasi lingkungan, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaan pengembangan kawasan dilakukan dengan mengacu pada rencana induk pengembangan kawasan, masterplan kawasan seluas $\pm 129,6$ hektare, rencana tata ruang, serta prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Dalam mendukung fungsi pengelolaan kawasan, Direktorat Destinasi Pariwisata melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan zonasi, pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, penerapan standar desain kawasan, serta penguatan aspek konservasi dan perlindungan ekosistem, termasuk pada lanskap ekologis Hutan Nggorang Bowosie. Sejalan dengan itu, penyediaan infrastruktur dasar, konektivitas kawasan, dan fasilitas pendukung destinasi diarahkan untuk mendukung keterpaduan pengembangan kawasan, meliputi sistem utilitas dasar, aksesibilitas internal kawasan, mobilitas hijau, infrastruktur wisata alam, serta dukungan penerapan konsep *smart destination* melalui penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan manajemen pengunjung berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Direktorat Destinasi Pariwisata juga memiliki peran strategis dalam mendukung **penyelesaian aspek legalisasi dan penguasaan lahan kawasan sebagai prasyarat utama pengembangan destinasi**. Hal tersebut mencakup fasilitasi penyelesaian lahan pengganti dalam skema Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kabupaten Ngada seluas $\pm 526,49$ hektare, penyelesaian isu lahan Areal

Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 265,42$ hektare dalam rangka penguatan legalitas kawasan otorita, serta penyelesaian sisa lahan APL $\pm 4,98$ hektare di kawasan Parapuar yang masih memerlukan penanganan lanjutan terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat. Penyelesaian berbagai aspek tersebut diarahkan untuk mendukung kepastian hukum kawasan, optimalisasi pengelolaan ruang, percepatan pembangunan kawasan, serta penguatan kepastian investasi dalam pengembangan kawasan otorita.

Dalam pelaksanaan pengembangan destinasi, arah pengembangan kawasan difokuskan pada **penguatan tiga komponen utama destinasi pariwisata, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (3A)** sebagai fondasi utama peningkatan kualitas dan daya saing destinasi. Pada aspek atraksi, pengembangan diarahkan pada penciptaan *core attraction* kawasan melalui pengembangan wisata berbasis alam, budaya, petualangan, edukasi, dan *wellness tourism* yang memanfaatkan karakter lanskap Parapuar dan kekayaan budaya lokal. Pengembangan atraksi dilakukan berdasarkan pembagian lot dan fungsi ruang sebagaimana tertuang dalam dokumen masterplan kawasan, sehingga mampu menciptakan pengalaman wisata yang autentik, imersif, dan berkelanjutan sekaligus mendukung diversifikasi produk wisata darat (*mainland tourism*) di Labuan Bajo.

Pada aspek amenitas, pengembangan difokuskan pada penyediaan fasilitas penunjang destinasi yang berkualitas guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan pengalaman wisatawan. Pengembangan amenitas mencakup penyediaan ruang publik, *visitor center*, area parkir, *viewing deck*, area istirahat (*rest area*), fasilitas kebersihan, fasilitas interpretasi wisata, jalur pedestrian, pusat aktivitas budaya, hingga fasilitas pendukung wisata berbasis komunitas dan *wellness tourism*. Penyediaan amenitas tersebut diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan destinasi berkelas dunia sekaligus mendukung penguatan citra kawasan sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

Sementara itu, pada aspek aksesibilitas, pengembangan diarahkan untuk meningkatkan keterhubungan dan kemudahan mobilitas menuju maupun di dalam kawasan melalui pembangunan jaringan jalan kawasan, jalur kolektor dan jalan lokal, jalur trek, jalur sepeda, halte, fasilitas transportasi internal kawasan, serta penguatan infrastruktur digital dan telekomunikasi. Pengembangan aksesibilitas juga mencakup penerapan prinsip *universal access* melalui penyediaan trotoar, ramp, dan fasilitas pendukung mobilitas yang inklusif bagi seluruh pengunjung. Penguatan aksesibilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterpaduan konektivitas kawasan,

memperkuat daya tarik investasi, serta mendukung pemerataan pengembangan destinasi di kawasan Labuan Bajo Flores.

Selain aspek fisik kawasan, Direktorat Destinasi Pariwisata juga melaksanakan program **pemberdayaan masyarakat pada desa penyangga Kawasan Parapuar, meliputi Desa Gorontalo, Desa Golo Bilas, dan Kelurahan Wae Kelambu**. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal melalui pengembangan desa wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui pelaksanaan program-program tersebut, pengembangan kawasan Parapuar diharapkan dapat berfungsi sebagai pengungkit optimalisasi wisata darat (*mainland tourism*) di Labuan Bajo, memperkuat diversifikasi produk wisata, meningkatkan kualitas destinasi, serta mendukung pencapaian indikator daya saing pariwisata dan pembangunan berkelanjutan. Pada saat yang sama, keseluruhan program tersebut menjadi instrumen implementasi peran Direktorat Destinasi Pariwisata sebagai *land manager* dan *product developer* dalam mewujudkan kawasan Parapuar sebagai model pengembangan destinasi berbasis konservasi, budaya, dan inovasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

4. Direktorat Pemasaran Pariwisata

Direktorat Pemasaran Pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya tarik dan visibilitas Kawasan Parapuar sebagai bagian dari destinasi Labuan Bajo Flores. Dalam konteks pengelolaan kawasan, direktorat ini bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan strategi pemasaran destinasi yang mampu memperkuat positioning Parapuar sebagai destinasi wisata berbasis alam, budaya, dan edukasi.

Strategi pemasaran yang dikembangkan meliputi kegiatan branding destinasi, promosi pariwisata, pengembangan paket wisata, serta kerja sama dengan pelaku industri pariwisata seperti agen perjalanan, operator wisata, maskapai penerbangan, serta platform pemasaran digital. Direktorat Pemasaran juga berperan dalam mengintegrasikan atraksi wisata yang dikembangkan di kawasan Parapuar dengan produk wisata lain di Labuan Bajo sehingga tercipta pengalaman wisata yang lebih lengkap bagi wisatawan.

Selain promosi destinasi, direktorat ini juga mendorong penyelenggaraan berbagai event pariwisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus

memperkuat citra kawasan sebagai ruang aktivitas wisata baru di Labuan Bajo. Event budaya, kegiatan wisata olahraga, festival kuliner, serta program edukasi lingkungan menjadi bagian dari strategi untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

Melalui pembagian peran yang jelas antar direktorat tersebut, BPOLBF sebagai badan pengelola kawasan dengan pola pengelolaan keuangan BLU mampu menjalankan sistem pengelolaan Kawasan Parapuar secara terintegrasi. Direktorat Destinasi memastikan pengembangan ruang kawasan dan atraksi wisata berjalan sesuai rencana, Direktorat Industri dan Kelembagaan mengembangkan ekosistem investasi dan industri pariwisata, Direktorat Pemasaran memperkuat daya tarik destinasi di pasar wisata, sementara Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik menjamin tata kelola kawasan yang profesional dan akuntabel. Dengan sistem pengelolaan tersebut, Kawasan Parapuar diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata baru di Labuan Bajo yang tidak hanya mampu menarik investasi dan meningkatkan daya saing destinasi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat identitas budaya lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan di Wilayah Koordinatif

3.2.2.1 Landasan Kebijakan dan Strategi

Dalam upaya memastikan pengembangan kepariwisataan yang efektif, terarah, dan merata di wilayah koordinatif BPOLBF, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan mengacu pada Rencana Induk Kepariwisata Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Tahun 2024–2044 sebagai dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan destinasi, dengan tetap memperhatikan peran BPOLBF sebagai orkestrator dan integrator ekosistem kepariwisataan. Fungsi koordinatif BPOLBF mencakup harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, integrasi digitalisasi guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengalaman wisatawan, fasilitasi program strategis dalam rangka diversifikasi produk dan peningkatan daya tarik destinasi, serta penguatan sinergi antar-lembaga untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan program pengembangan. Fokus pada fungsi koordinatif tersebut diarahkan untuk mewujudkan sinergi antar pemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembangunan, serta menjamin keberlanjutan pengembangan pariwisata di seluruh wilayah koordinatif yang meliputi Pulau Flores, Lembata, Alor, serta Kecamatan Sape dan Lambu di

Kabupaten Bima.

Merespons kompleksitas dan keragaman potensi alam, budaya, serta karakteristik lanskap di wilayah koordinatif tersebut, BPOLBF telah melaksanakan identifikasi secara komprehensif guna memetakan serta menetapkan tema pengembangan tematik pada masing-masing wilayah sebagai dasar dalam penyusunan arah pengembangan kepariwisataan yang berbasis potensi unggulan daerah. Pemetaan ini berfungsi sebagai landasan strategis dalam proyeksi pengembangan destinasi, sehingga pendekatan yang dilakukan menjadi lebih adaptif, terarah, dan responsif terhadap potensi, karakteristik, serta tantangan spesifik di setiap wilayah.

Dalam melaksanakan mandatnya, BPOLBF berfokus pada penguatan berbagai dimensi strategis guna memastikan pertumbuhan sektor pariwisata yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan, tidak hanya dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta menjaga kelestarian lingkungan. Upaya pengembangan tersebut mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar melalui penguatan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas; optimalisasi strategi pemasaran terpadu melalui pendekatan *branding*, *advertising*, dan *selling*; pengembangan industri pariwisata yang tangguh (*resilient*) berbasis potensi lokal seperti budaya, alam, tenun, dan kopi; serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Keseluruhan upaya ini didukung oleh penguatan tata kelola organisasi melalui fungsi keuangan, umum, kepegawaian, hukum, dan komunikasi publik guna mewujudkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berstandar global.

BPOLBF berperan sebagai orkestrator pengembangan kepariwisataan di 10 kabupaten pada wilayah daratan Pulau Flores, serta Lembata, Alor, dan kecamatan terkait di Kabupaten Bima, sekaligus sebagai integrator dalam sistem ekosistem kepariwisataan kawasan Labuan Bajo Flores. Peran koordinatif tersebut menjadi kunci dalam menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian integral dari pelaksanaan fungsi koordinatif BPOLBF, pengembangan destinasi kepariwisataan tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dan keunggulan komparatif masing-masing wilayah. Wilayah koordinatif BPOLBF memiliki tingkat keragaman potensi alam, budaya, dan lanskap yang tinggi, yang secara inheren menciptakan diferensiasi potensi sekaligus tantangan spesifik pada setiap daerah,

sehingga memerlukan pendekatan pengembangan yang adaptif, terarah, dan berbasis potensi lokal.

Merespons kompleksitas tersebut, BPOLBF pada periode lima tahun awal operasional (2019–2024) telah melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi secara komprehensif yang menghasilkan penetapan tema pengembangan tematik untuk masing-masing wilayah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan. Pemetaan ini berfungsi sebagai landasan strategis dalam proyeksi pengembangan destinasi secara terpadu di wilayah koordinatif yang meliputi Pulau Flores, Lembata, Alor, serta Kecamatan Sape dan Lambu di Kabupaten Bima. Rincian hasil pemetaan tema pengembangan tematik, Daya Tarik Unggulan, Event/Festival Strategis dan Produk Unggulan / Rantai Pasok tersebut disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.2 Hasil Pemetaan Potensi Pengembangan Tematik, Daya Tarik Unggulan, Event Strategis dan Produk Unggulan / Rantai Pasok Wilayah Koordinatif BPOLBF

No.	Wilayah	Tema Pengembangan	Destinasi & Atraksi Utama	Festival & Event Strategis	Produk Unggulan & Rantai Pasok
1.	Manggarai Barat	Biodiversitas Bawah Laut & Konservasi	Taman Nasional Komodo (TNK), Desa Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Mawatu, Golomori, dan area Parapuar.	Festival Golo Koe	Pusat Pasar Rantai Pasok Pariwisata, Cagar Biosfer Komodo.
2.	Manggarai	Kebudayaan & Agrowisata	Agrowisata Kopi (MPIG, APEKAM), Mbohang, Kebun Kopi, Wae Rebo, Liang Bua, Dolo Curu, Lodok Meler, Gua Maria Torong Besi.	Calendar of Event dan Festival Budaya Manggarai, Festival Golo Curu	Kopi Manggarai, Eco-Print, Tenun, Ritus Adat, Rantai Pasok Buah & Sayuran.
3.	Manggarai Timur	Ekowisata	Agrowisata Lembah Colol, Cepi Watu, Rana Mese, Rana Tonjong.	Festival Pantai Ligota	Kopi Robusta (Kopi Tuang), Pengemasan Saset Kopi Colol, Rantai Pasok Kopi.

4.	Ngada	Kebudayaan & Agrowisata	Kampung Adat Megalitik Bena, TWAL Riung 17 Pulau, Air Panas Soa, Puncak Wolobobo, Manulalu, Puncak Inerie.	Festival Reba, Festival Inerie dan Wolobobo	Cokelat, Kopi, Tenun, Bambu, Rantai Pasok Buah dan Sayuran.
5.	Nagekeo	Agrowisata	Zona Ring of Road Pariwisata Nagekeo (Ring of Kinde, Amagelu, Ebulobo), Kampung Adat (Kawa, Tutubhada, Nunungongo), Nagekeo Creative Hub.	Festival Etu, Festival Literasi, Festival One Be, Forum Ekonomi Flores.	Tenun, Cengkeh, Minyak Wijen, Beras Mbay, Rantai Pasok Buah dan Sayur.
6.	Ende	Geopark, Sejarah & Kebudayaan	Geopark Kelimutu, 10 Desa Wisata, Paralayang, Situs Bung Karno, Kampung Adat Wologai, Hutan Pendidikan Nangapanda.	Parade Kebangsaan Pancasila, Festival Kelimutu, dan Festival Maria Guadalupe	Ubi Nuabosi, Pisang Barangan.
7.	Sikka	Bahari & Komunitas Kreatif	Wisata Bahari Teluk Maumere, Desa Wisata Kojadoi dan Kampung Nita, Wisata Pertunjukan (Night Coffee Shop).	Festival Komunitas Kreatif Kota Maumere, Festival Jazz, Festival Ledalero, Festival Maumere Logia, Festival Tenun Ikat.	Musik, Kerajinan, Seni Pertunjukan, Kuliner (Moke & Gastronomi), Rantai Pasok Ikan.
8.	Flores Timur	Religius	Semana Santa, Pulau Meko, Danau Asmara.	Ritual Semana Santa, Festival Bale Nagi	Jagung Titi, Sorgum, Madu Hutan, Tenun Ikat, Arak, Anyaman, Rantai Pasok Ikan.

9.	Lembata	Petualangan	Lamalera, Gunung Api Ile Batubara, Sport Fishing Tourism, Suluh Ikan.	Festival 3 Gunung, Festival Lamaholot	Jagung Titi, Kopi Bakan, Ayam Kampung, Rantai Pasok Ikan.
10.	Alor	Biodiversitas Bawah Laut	Kalabahi, Pantar, Maritaing, Alor Bawah Air, Kampung Adat Takpala.	Festival Al-Qur'an Tua, Festival Dugong dan Festival Paralayang	Jagung Titi, Kenari, Tenun, Abon Ikan, Rantai Pasok Ikan dan Makanan Olahan.

Sumber : Dokumen Rencana Induk Kepariwisata (2024-2044)

Dalam melaksanakan mandatnya sebagai orkestrator dan integrator pengembangan kepariwisataan di wilayah koordinatifnya, BPOLBF tidak hanya berfokus pada pemetaan tematik perwilayahan, namun juga pada penguatan berbagai dimensi strategis guna memastikan pertumbuhan sektor pariwisata yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Penekanan pembangunan diarahkan tidak hanya pada peningkatan daya saing destinasi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta pelestarian lingkungan. Aspek pengembangan tersebut mencakup inisiatif yang komprehensif mulai dari peningkatan infrastruktur dasar, penguatan aksesibilitas dan amenitas, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan kelembagaan dan tata kelola destinasi.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, terdapat sejumlah dimensi strategis pengembangan wilayah koordinatif yang menjadi fokus utama BPOLBF, meliputi penguatan daya tarik destinasi melalui diversifikasi produk wisata, optimalisasi strategi pemasaran terpadu, pengembangan industri pariwisata yang tangguh (*resilient*) berbasis potensi lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing. Komitmen ini diarahkan untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelas dunia di wilayah Pulau Flores, Lembata, Alor, serta Kecamatan Sape dan Lambu di Kabupaten Bima. Uraian lebih lanjut mengenai dimensi strategis pengembangan tersebut disajikan pada bagian berikut.

Selanjutnya, dalam dokumen *Integrated Tourism Master Plan (ITMP)* yang disusun oleh Bappenas, wilayah koordinatif BPOLBF yang ditetapkan sebagai *Key Tourism*

Area (KTA) masih terbatas pada kawasan Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo. Namun demikian, berdasarkan hasil identifikasi BPOLBF, setiap kabupaten di Pulau Flores memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan sebagai KTA yang unik dan signifikan, serta memerlukan intervensi kebijakan dan program pemerintah secara lebih merata.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, BPOLBF telah menyusun perencanaan pengembangan 11 sebaran KTA di wilayah Labuan Bajo Flores untuk periode 2025–2029. Perencanaan ini dirancang untuk membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelas dunia melalui pendekatan pengembangan yang tidak terpusat pada satu kawasan, melainkan tersebar secara strategis sesuai dengan potensi wilayah. Setiap KTA ditetapkan dengan tema pengembangan spesifik yang mencerminkan karakteristik dan keunggulan lokal masing-masing wilayah.

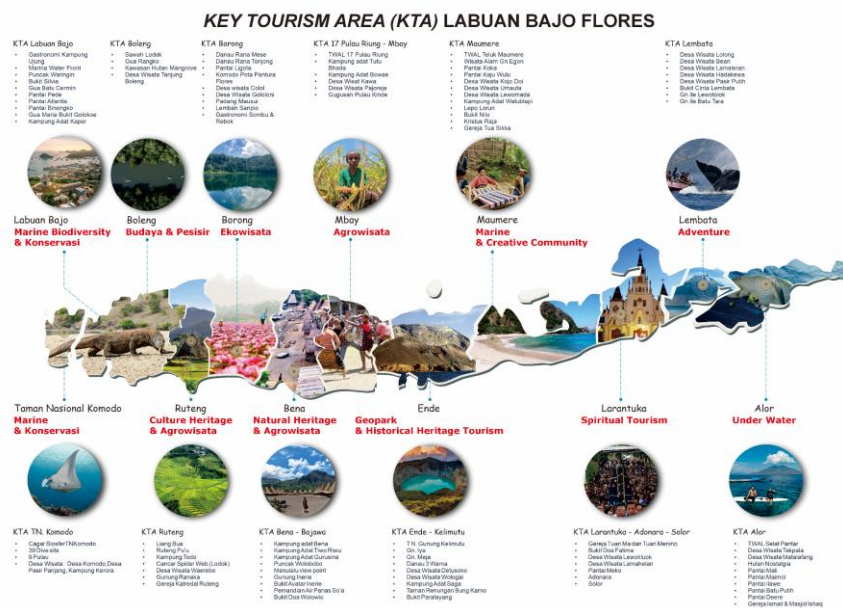
Inisiatif penetapan 11 KTA tersebut merupakan langkah strategis BPOLBF dalam mendorong pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh wilayah Pulau Flores dan sekitarnya, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui diversifikasi produk dan aktivitas pariwisata, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan kepariwisataan dapat berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh wilayah koordinatif.

Sebaran KTA beserta tema pengembangan masing-masing wilayah berdasarkan hasil identifikasi BPOLBF untuk periode pengembangan 2025–2029 disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.3 Pemetaan *Key Tourism Area* Wilayah Koordinatif BPOLBF

No.	Key Tourism Area (KTA)	Tema Pengembangan	Lokasi / Kabupaten
1.	Taman Nasional Komodo	Marine & Konservasi	Manggarai Barat
2.	Labuan Bajo	Marine Biodiversity & Konservasi	Manggarai Barat
3.	Boleng	Budaya & Pesisir	Manggarai Barat
4.	Ruteng	Culture Heritage & Agrowisata	Manggarai

5.	Borong	Ekowisata	Manggarai Timur
6.	Bena	Natural Heritage & Agrowisata	Ngada
7.	Mbay	Agrowisata	Nagekeo
8.	Ende	Geopark & Historical Heritage Tourism	Ende
9.	Maumere	Marine & Creative Community	Sikka
10.	Larantuka	Spiritual Tourism	Flores Timur
11.	Lembata	Adventure	Lembata
12.	Alor	Underwater	Alor



Gambar 3.3. Pemetaan *Key Tourism Area* Wilayah Koordinatif BPOLBF

1. Direktorat Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik

Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik (KUKP) memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas operasional organisasi melalui tata kelola keuangan yang akuntabel, pengelolaan sumber daya manusia, serta penguatan aspek legalitas. Di wilayah koordinatif, fungsi strategisnya menitikberatkan pada komunikasi publik sebagai corong informasi dan penghubung antar pemangku kepentingan kepariwisataan.

Dalam menjalankan mandat tersebut, KUKP juga mengelola fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Peran ini mencakup penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menerima dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat maupun wisatawan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan destinasi.

Selain itu, KUKP berperan penting dalam mitigasi dan penanganan komunikasi krisis melalui pengembangan sistem peringatan dini serta penyusunan respons komunikasi yang cepat dan tepat, guna meminimalkan dampak negatif terhadap citra pariwisata Labuan Bajo Flores. Fungsi ini diperkuat melalui fasilitasi dan aktivasi forum-forum kepariwisataan sebagai ruang sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu strategis, dan dialog lintas sektor.

Secara lebih spesifik, Divisi Komunikasi Publik berperan dalam memperkuat citra lembaga dan destinasi melalui pengelolaan brand BPOLBF dan Labuan Bajo Flores. Upaya ini dilakukan melalui strategi komunikasi terpadu dan memfasilitasi penyelenggaraan forum-forum diskusi dan kolaborasi, baik secara daring maupun luring, penguatan hubungan media, serta penyusunan narasi (*story telling*) yang konsisten, menarik, dan mudah dipahami.

Strategi Divisi Komunikasi Publik Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dalam memperkuat fungsi koordinatif di 11 kabupaten dirancang sebagai upaya terpadu untuk memastikan terbangunnya komunikasi yang selaras, kolaboratif, dan efektif dalam mendukung pengembangan pariwisata kawasan Flores dan sekitarnya secara berkelanjutan. Divisi Komunikasi Publik berperan sebagai penghubung strategis yang menjembatani arus informasi, memperkuat sinergi antar wilayah, serta membangun narasi bersama yang mendukung arah pembangunan kawasan.

Koordinasi komunikasi lintas pemerintah daerah menjadi salah satu fokus utama dalam memperkuat harmonisasi kebijakan dan program pengembangan pariwisata. Melalui forum komunikasi rutin, koordinasi kehumasan serta fasilitasi penyebaran informasi strategis, Divisi Komunikasi Publik memastikan setiap pemerintah daerah memiliki pemahaman dan pesan yang selaras terkait arah pembangunan pariwisata kawasan Flores. Pendekatan ini mendukung terciptanya komunikasi yang konsisten dalam isu pengembangan destinasi, investasi, penguatan SDM, serta keberlanjutan lingkungan.

Dalam mendukung efektivitas koordinasi antar wilayah, Divisi Komunikasi Publik juga mengedepankan penguatan sistem komunikasi dan pertukaran informasi. Pengelolaan media monitoring, pemetaan isu strategis, dokumentasi kegiatan, serta distribusi informasi lintas kabupaten dilakukan secara terintegrasi guna memastikan setiap perkembangan, tantangan, maupun peluang pengembangan destinasi dapat dikomunikasikan secara cepat, akurat, dan adaptif. Hasil komunikasi dan koordinasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah tindak lanjut yang responsif terhadap dinamika sektor pariwisata.

Sebagai bagian dari upaya menjaga reputasi kawasan, Divisi Komunikasi Publik turut memperkuat kolaborasi manajemen risiko komunikasi lintas kabupaten. Strategi ini dilakukan melalui penguatan koordinasi penanganan isu dan krisis pariwisata, penyusunan mekanisme komunikasi krisis, pengelolaan narasi publik, serta peningkatan kapasitas kehumasan daerah dalam menghadapi isu strategis yang berpotensi mempengaruhi citra destinasi. Pendekatan ini penting untuk memastikan kesiapsiagaan komunikasi kawasan dalam menghadapi berbagai potensi risiko, baik terkait keselamatan wisatawan, isu pelayanan, bencana alam, maupun dinamika sosial yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap destinasi Flores dan sekitarnya.

Penguatan jejaring kemitraan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam strategi koordinatif ini. Divisi Komunikasi Publik memfasilitasi kolaborasi dengan media massa, komunitas kreatif, akademisi, influencer, asosiasi pariwisata, serta mitra pembangunan lainnya guna memperluas jangkauan promosi, memperkuat penyebaran informasi positif, dan mendukung pengembangan citra kawasan secara kolektif. Pendekatan ini memastikan setiap kabupaten memiliki ruang untuk menampilkan potensi dan keunikannya dalam satu ekosistem komunikasi kawasan yang terintegrasi.

Selain itu, Divisi Komunikasi Publik berperan dalam mengharmonisasikan promosi dan branding kawasan melalui penguatan narasi bersama yang mengangkat karakteristik dan daya tarik masing-masing destinasi di 11 kabupaten. Melalui pengelolaan media sosial, publikasi, kampanye komunikasi, produksi konten kreatif, hingga kolaborasi lintas platform, Divisi Komunikasi Publik membangun citra Flores sebagai destinasi pariwisata unggulan yang berkelas dunia, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung tata kelola yang transparan dan partisipatif, Divisi Komunikasi

Publik juga memperkuat layanan informasi publik melalui pengelolaan komunikasi yang terbuka, responsif, dan mudah diakses masyarakat. Melalui fungsi layanan informasi dan dokumentasi publik, BPOLBF memastikan masyarakat, media, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang akurat terkait program, kebijakan, kegiatan, serta perkembangan sektor pariwisata kawasan. Penguatan layanan informasi publik ini juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pengelolaan isu dan komunikasi strategis kawasan.

Forum stakeholder lintas kabupaten turut difasilitasi sebagai ruang dialog dan koordinasi komunikasi untuk memperkuat sinergi antarwilayah, menyelesaikan isu strategis, serta membangun komitmen bersama dalam pengembangan kawasan. Forum ini menjadi wadah untuk menyatukan perspektif komunikasi, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan program pembangunan pariwisata berjalan secara inklusif dan terintegrasi.

Melalui strategi komunikasi publik yang terstruktur dan berkelanjutan ini, Divisi Komunikasi Publik BPOLBF tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi, pengelola reputasi kawasan, serta katalisator dalam memperkuat daya saing dan citra Flores sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia dan dunia.

2. Direktorat Industri & Kelembagaan Pariwisata

BPOLBF memiliki peran yang penting dalam koordinasi pengembangan industri pariwisata berbasis kekuatan budaya, alam, tenun, kopi, serta penguatan kelembagaan yang resilien dan berkelanjutan.

Tabel 3.4 Pengembangan Industri & Kelembagaan Wilayah Koordinatif BPOLBF

No.	Kategori Strategi	Deskripsi
1	Pengembangan Industri Pariwisata	Memetakan potensi, mendorong pembangunan infrastruktur, dan diversifikasi produk wisata (alam, budaya, sejarah, kuliner, petualangan).
2	Pengembangan Investasi	Mengidentifikasi, mempromosikan, dan memfasilitasi realisasi proyek investasi di sektor pariwisata.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Memberdayakan industri kreatif lokal (kriya, seni pertunjukan, kuliner) melalui pelatihan dan promosi untuk meningkatkan pendapatan

		masyarakat dan melestarikan budaya.
4	Kerja Sama Lintas Pemangku Kepentingan	Mengadakan forum dialog, kolaborasi proyek, dan membangun jaringan internasional untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
5	Penguatan Kelembagaan	Mendukung dan memperkuat peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), asosiasi pariwisata, dan lembaga terkait lainnya melalui pelatihan, pendampingan, dan advokasi kebijakan.
6	Pengembangan Standar Usaha	Menerapkan standar operasional, sertifikasi, dan pemantauan berkala untuk memastikan kualitas layanan dan profesionalisme industri.
7	Penanganan Krisis Usaha	Mengembangkan rencana darurat, respons cepat, dan strategi pemulihan bisnis untuk menghadapi krisis yang berdampak pada industri pariwisata.
8	Penguatan Kapasitas dan Keahlian	Meningkatkan kapasitas dan keahlian profesional melalui program pelatihan dan pendidikan (manajemen, pemasaran, teknis, keberlanjutan) untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing serta koordinasi pendirian lembaga pendidikan tinggi negeri di wilayah Flores guna menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, meningkatkan level pekerjaan tenaga lokal hingga <i>middle</i> dan <i>top management</i> .
9	Regulasi Pro-Pekerja Lokal	Memfasilitasi implementasi regulasi yang mendukung pemberdayaan, perlindungan hak, dan kesetaraan kesempatan bagi pekerja lokal di sektor pariwisata.

Sumber: Data Olahan BPOLBF (2025)

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis Wilayah Koordinatif, khususnya dalam mendorong peningkatan investasi di sektor pariwisata, telah dilakukan berbagai upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengembangan industri di kawasan koordinatif. Selanjutnya, telah dilaksanakan fasilitasi promosi investasi melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum investasi, kegiatan *business matching*, serta penyelenggaraan *project pitching* kepada calon investor baik domestik maupun internasional. Selain koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah daerah guna menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Pada tahap implementasi, upaya yang dilakukan difokuskan pada fasilitasi realisasi investasi, antara lain melalui pendampingan investor dan terlibat dalam

penyelesaian berbagai kendala di lapangan , sehingga dapat mempercepat terealisasinya investasi dan mendukung pengembangan industri pariwisata di kawasan koordinatif.

Berdasarkan matriks Pengembangan Industri dan Kelembagaan Wilayah Koordinatif BPOLBF, jenis kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU dan sasaran strategis difokuskan pada penguatan ekosistem pariwisata secara terpadu. Dalam konteks ini, Program Floratama Academy menjadi salah satu instrumen utama penguatan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM melalui pendekatan pelatihan terstruktur dan berbasis kebutuhan industri.

Lebih lanjut, penguatan ekonomi kreatif dan kelembagaan dilakukan melalui pelatihan, inkubasi bisnis, serta promosi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Floratama Academy berperan sebagai platform pembelajaran dan akselerasi “naik kelas” bagi pelaku usaha yang mencakup manajemen usaha, kualitas produk, rantai pasok, hingga akses pasar (termasuk konektivitas dengan sektor HORECA). Kegiatan ini diperkuat dengan forum kolaborasi lintas pemangku kepentingan, kemitraan dengan sektor swasta, serta penguatan peran Pokdarwis dan asosiasi pariwisata dalam menciptakan tata kelola destinasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, penerapan standar usaha, sertifikasi, dan peningkatan kualitas layanan juga didorong melalui pendampingan teknis dan monitoring berkala.

Kerja sama lintas pemangku kepentingan dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, asosiasi, serta mitra pembangunan dalam mendukung pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Labuan Bajo Flores. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain forum koordinasi dan sinkronisasi program, focus group discussion (FGD) tematik, business matching, fasilitasi kerja sama operasional (KSO), serta pengembangan jejaring kemitraan untuk mendukung investasi, pengembangan SDM, promosi destinasi, dan penguatan ekonomi lokal.

Penguatan kelembagaan di desa wisata dilakukan melalui upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, peran dan fungsi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), asosiasi pariwisata serta lembaga lokal lainnya sebagai penggerak utama pengelolaan destinasi dan pelaku UMKM di desa wisata. Kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi pelatihan tata kelola organisasi, manajemen destinasi, pengelolaan keuangan hingga pelayanan wisata berbasis standar. Selain itu,

pendampingan intensif dilakukan untuk memastikan kelembagaan mampu menjalankan fungsi operasional secara efektif, termasuk dalam perencanaan program, pengemasan produk wisata serta penguatan jejaring kemitraan dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah.

Pengembangan standar usaha diarahkan pada penerapan standar operasional yang terukur dan konsisten guna menjamin kualitas layanan serta profesionalisme pelaku industri pariwisata di wilayah koordinatif. Pengembangan standar usaha diintegrasikan dengan Program Floratama Academy sebagai sarana peningkatan kapasitas pelaku usaha. Melalui program ini, peserta dibekali pemahaman praktis terkait standar kualitas produk dan layanan, pengemasan produk yang memenuhi pasar, hingga kesiapan memenuhi sertifikasi usaha. Pendampingan lanjutan (workshop dan mentoring) menjadi kunci agar pelaku usaha tidak hanya memahami standar, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara konsisten. Dengan demikian, kualitas layanan meningkat, daya saing usaha menguat, dan kepercayaan pasar terhadap destinasi wisata di wilayah koordinatif BPOLBF semakin tinggi.

3. Direktorat Destinasi Pariwisata

Sebagai bagian dari mandat koordinatif dalam pengembangan destinasi pariwisata, tidak hanya berperan dalam pengembangan kawasan otorita, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong peningkatan kualitas destinasi pada wilayah koordinatif di sekitarnya. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan arah pembangunan pariwisata terpadu yang tidak hanya berfokus pada Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Labuan Bajo, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan Pulau Flores secara keseluruhan yang sejalan dengan Rencana Induk Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Komodo - Labuan Bajo 2024-2044 (Extention). Pendekatan ini diarahkan untuk menciptakan pemerataan manfaat pariwisata antarwilayah di Flores, memperkuat konektivitas antar destinasi, serta mengintegrasikan potensi pariwisata ke dalam satu sistem pengembangan kawasan yang saling terhubung, terarah, dan berkelanjutan.

Pengembangan destinasi wilayah koordinatif diarahkan untuk memperkuat struktur dan kualitas ekosistem pariwisata secara menyeluruh melalui pengembangan atraksi yang berdaya saing, peningkatan amenities yang memenuhi standar pelayanan, serta penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi. Selain itu, pengembangan juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata, penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis destinasi dan dinamika

pariwisata global.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan destinasi yang tidak hanya menarik secara produk, tetapi juga tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Adapun arah dan fokus pengembangan destinasi wilayah koordinatif BPOLBF dirumuskan dalam matriks strategi berikut.

Tabel 3.5 Pengembangan Destinasi Wilayah Koordinatif BPOLBF

No.	Kategori Strategi	Deskripsi
1.	Pengembangan Atraksi	Mendorong diversifikasi produk wisata melalui pemetaan potensi/ daya tarik wisata unggulan (meliputi potensi alam, budaya, dan buatan) serta penyusunan konsep pengembangan wisata tematik berbasis karakter wilayah, seperti wisata alam, budaya, petualangan, gastronomi, dan <i>wellness</i> , yang disesuaikan dengan tren pasar dan profil wisatawan.
2.	Pengembangan Amenitas	Mengoordinasikan pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas penunjang pariwisata yang mencakup akomodasi, restoran, toko souvenir, serta fasilitas pendukung lainnya yang ramah lingkungan dan memenuhi standar kesehatan, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar wisatawan sesuai standar pelayanan destinasi.
3.	Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur	Akselerasi peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi melalui penguatan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, termasuk pengembangan jalan, jembatan, fasilitas bandara & pelabuhan, serta peningkatan frekuensi dan kualitas layanan transportasi, guna mendukung kemudahan mobilitas wisatawan dan distribusi arus kunjungan.
4.	Pengembangan Desa Wisata	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan desa wisata secara berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia pariwisata melalui program pelatihan (online/offline), pendampingan, dan pengembangan kepemimpinan lokal. Implementasi program seperti <i>Floratama Destination Leadership</i>

		<i>Program</i> (FDLP) diarahkan untuk menciptakan agen perubahan (<i>local champions</i>) yang mampu menggerakkan inovasi, pengelolaan, dan pengembangan potensi desa wisata di tingkat lokal.
5.	Pengelolaan Berkelanjutan	Menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui penguatan tata kelola lingkungan, penerapan wisata bersih, implementasi standar <i>Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE)</i> , serta penerapan konsep <i>green tourism</i> dan ekonomi sirkular. Upaya ini didukung dengan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan.
6.	Penanganan Krisis Destinasi	Menyusun SOP dan mengimplementasikan sistem mitigasi serta protokol penanganan krisis destinasi yang mencakup aspek bencana alam, kesehatan, dan keamanan. Penguatan kesiapsiagaan dilakukan melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas respons cepat, serta pemulihan citra destinasi pasca-krisis secara bertahap.

Sumber: Data Olahan BPOLBF (2025)

Matriks pengembangan destinasi wilayah koordinatif ini menggambarkan kerangka intervensi strategis yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan produk wisata, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat, tata kelola destinasi, serta keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko. Melalui implementasi strategi tersebut, BPOLBF diharapkan dapat mendorong terwujudnya destinasi-destinasi unggulan di wilayah koordinatif yang memiliki karakter kuat, berdaya saing tinggi, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

Ke depan, pelaksanaan program-program tersebut akan terus diselaraskan dengan kebijakan nasional, dinamika kebutuhan pasar, serta prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, sehingga mampu menjadikan wilayah koordinatif sebagai bagian integral dari ekosistem destinasi pariwisata kelas dunia yang berkualitas dan berkelanjutan.

4. Direktorat Pemasaran Pariwisata

BPOLBF memegang peran krusial dalam fungsi koordinatif pengembangan pemasaran terintegrasi (*branding, advertising, selling*) untuk Labuan Bajo Flores dan sekitarnya. Berikut adalah gambaran peran strategis pemasaran BPOLBF.

Tabel 3.6 Pengembangan Pemasaran Wilayah Koordinatif BPOLBF

No.	Kategori Strategi	Deskripsi
1	Branding Destinasi	Mengembangkan identitas merek yang kuat untuk Labuan Bajo Flores, menonjolkan nilai unik, budaya, dan keindahan alam, serta menyoroti keunikan setiap kabupaten yang tak ditemukan di tempat lain.
2	Advertising Strategis	Mengoordinasikan kampanye iklan dan promosi melalui berbagai jenis media untuk meningkatkan visibilitas dan minat wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, terhadap daya tarik wisata di Labuan Bajo Flores.
3	Strategi Penjualan	Mengelola strategi penjualan, termasuk pengembangan paket wisata, partisipasi di bursa pariwisata serta misi penjualan di dalam maupun luar negeri, kerja sama dengan agen perjalanan, dan promosi khusus, didukung sistem reservasi daring dan informasi yang jelas.
4	Integrasi Pemasaran	Memastikan sinergi antara <i>branding, advertising, dan selling</i> untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran, dengan fokus pada pemerataan dan persebaran wisatawan ke destinasi darat.
5	Kemitraan Strategis	Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, industri, swasta, perbankan) untuk mendukung pemasaran berkelanjutan dan memperluas jaringan informasi.
6	Market Insight/Analisis	Mengembangkan dan mengelola bank data kepariwisataan Labuan Bajo Flores untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, termasuk analisis tren pasar, preferensi wisatawan, dan dampak kegiatan pemasaran.

Sumber: Data Olahan BPOLBF (2025)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat pemasaran Pariwisata di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terdapat beberapa program yang mendukung untuk mewujudkan diantaranya

- a. **Floratama Travel Insight.** Floratama Travel Insight dirancang sebagai sistem analisis berbasis data untuk memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores . Floratama Travel Insight berfungsi sebagai pusat integrasi data, riset pasar, dan insight wisatawan guna menghasilkan kebijakan dan strategi yang adaptif, terukur, dan berorientasi pasar.
- b. **Floratama Travel Experience (Destination Branding & Experience).** Floratama Travel Experience (FTE) merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat positioning Labuan Bajo Flores (LBF) sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia melalui pendekatan terintegrasi antara branding, pengalaman wisata, promosi, dan evaluasi berbasis data. FTE mengusung lima tema utama promosi BPOLBF wisata bahari, ekowisata, sejarah, religi, dan gastronomi yang diterjemahkan menjadi narasi destinasi yang konsisten serta pola perjalanan (travel pattern) terkurasi dan selaras dengan preferensi pasar. Implementasinya diintegrasikan dalam berbagai aktivitas promosi seperti Familiarization Trip, Sales Mission, dan pameran, sehingga berfungsi sebagai produk siap jual yang mampu meningkatkan konversi kunjungan. Selain itu, FTE dilengkapi mekanisme evaluasi untuk mengukur tingkat penerimaan wisatawan, perilaku perjalanan, serta dampak ekonomi, yang selanjutnya menjadi dasar penyempurnaan strategi dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Labuan Bajo Flores.
- c. **Floratama Media.** Floratama Media (FM) adalah pilar BPOLBF dalam mempromosikan daya tarik wisata di Labuan Bajo Flores. FM memanfaatkan media sosial (Instagram, Facebook, TikTok), website BPOLBF, serta kanal yang dimiliki oleh mitra strategis sebagai sumber informasi daya tarik wisata (DTW) di Labuan Bajo Flores. Penggunaan media sosial dipilih karena memberikan kesempatan komunikasi dua arah sehingga BPOLBF dalam berinteraksi dengan audiens. Promosi DTW yang dilakukan oleh FM tidak hanya berfokus pada Taman Nasional Komodo, yang merupakan tujuan utama wisatawan berkunjung ke Labuan Bajo Flores, tetapi juga memberikan sorotan kepada DTW di daratan Flores, baik yang sudah dikenal luas maupun yang belum banyak diketahui masyarakat. Aktivitas yang dilakukan oleh FM mencakup publikasi informasi kalender kegiatan (*calendar of event/CoE*), promosi DTW, serta menjalin

kemitraan dengan kreator konten di wilayah Flores, Alor, Lembata, dan Bima;

- d. **Floratama Production.** Floratama Production (FP) merupakan ujung tombak BPOLBF dalam meningkatkan ekosistem event di Labuan Bajo Flores. FP hadir tidak sekadar untuk menyelenggarakan event yang mendorong pergerakan wisatawan, namun juga mendukung pengembangan penyelenggaraan event di Labuan Bajo Flores. Penyelenggaraan event oleh FP tak terbatas di wilayah otoritatif, namun juga di wilayah koordinatif dengan bekerja sama dengan mitra strategis BPOLBF. Dalam rangka pendukungan pengembangan event di wilayah koordinatif, FP hadir nyata dengan memberikan pendukungan finansial maupun non-finansial berupa konsultasi penyelenggaraan, pemasaran, maupun monitoring dan evaluasi event.

3.3 Kerangka Regulasi Kementerian Pariwisata dan BPOLBF

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, kerangka regulasi merupakan dukungan dalam bentuk regulasi guna mencapai visi yang ingin dicapai. Kerangka regulasi akan menjadi payung hukum pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata 2025-2029. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pariwisata diusulkan sejumlah penyusunan regulasi dan dokumen antara lain:

- a. Kerangka Regulasi Kementerian Pariwisata

Tabel 3.7 Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Pariwisata

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Tahun Realisasi
1.	Revisi Undang-Undang Kepariwisataan	2025
2.	Penyusunan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2026-2045	2025
3.	Penyelesaian penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) termasuk rencana aksi	2025 - 2026
4.	Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	2025 - 2026
5.	Dokumen perencanaan pengembangan pariwisata daerah	2025

6.	Petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik pariwisata	2025
7.	Penyusunan standar industri	2026
8.	Penyusunan regulasi terkait Blue-Green-Circular Economy sektor pariwisata	2027

b. Kerangka Regulasi BPOLBF

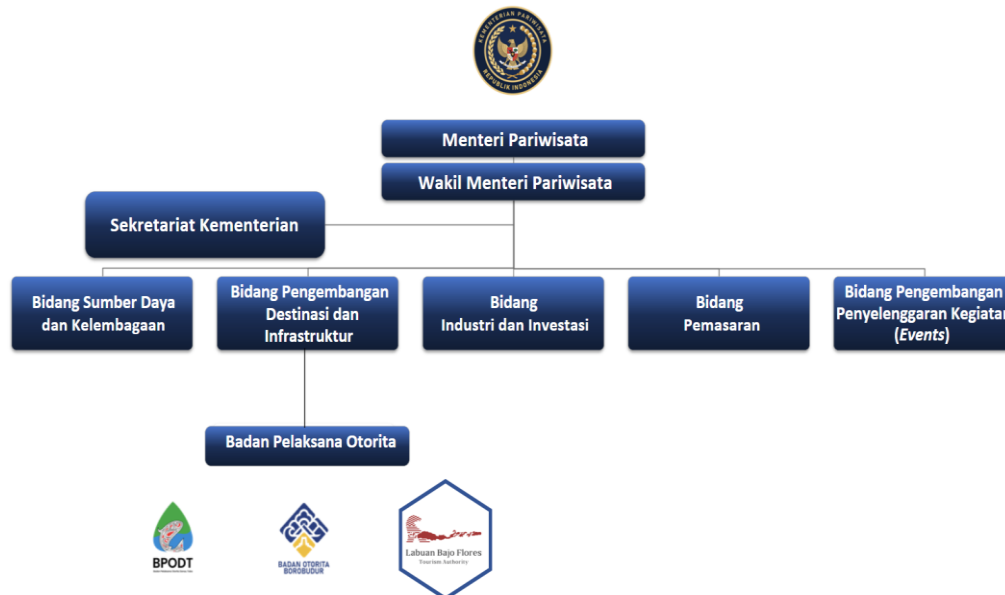
Tabel 3.8 Matriks Kerangka Regulasi BPOLBF

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Tahun Realisasi
1.	Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	2026
2.	Revisi PMK 99 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan BLU BPOLBF	2028
3.	Revisi Perdirut BPOLBF NO 02/XI/2023, Kriteria, Besaran Tarif & tata cara penetapan tarif layanan BLU BPOLBF	2026
4.	Perpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Komodo - Labuan Bajo 2024-2044	2026
5.	Rencana Strategi Bisnis 2026 - 2030 BPOLBF	2026
7.	Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Komodo - Labuan Bajo 2024-2044 (Extention)	2027-2029

3.4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan BPOLBF

Sejalan dengan prinsip *structure follows strategy*, struktur kelembagaan Kementerian Pariwisata harus didesain dengan dasar untuk memastikan ketercapaian visi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pariwisata periode 2025-2029 secara optimal. Hal serupa juga berlaku pada elemen-elemen kelembagaan lainnya seperti proses bisnis, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja. Tidak hanya berkaitan dengan kinerja pembangunan di sektor pariwisata, kelembagaan juga merupakan elemen penting dalam tema pembangunan nasional 2025-2029 yaitu Penguatan Fondasi Transformasi, khususnya transformasi tata kelola organisasi. Berpijak pada sasaran

strategis yang telah dirumuskan, amanat undang-undang terkait pembangunan di bidang pariwisata, serta hakikat kelembagaan Kementerian Pariwisata maka desain struktur kelembagaan kementerian untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata

Sebagai salah satu satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata, Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores harus menyiapkan tata kelembagaan yang mengatur peran semua pihak dengan baik. Keberhasilan pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sangat ditentukan oleh kualitas kinerja organisasi pengelola. Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai entitas pariwisata, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup dan spasial, tidak hanya mengembangkan mata rantai nilai dalam merespon dinamika pasar, Namun juga sebagai basis produksi yang terintegrasi dengan ekosistem pariwisata dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumberdaya lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Kerangka fungsional kelembagaan yang dapat ditawarkan dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores adalah:

- Membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kelancaran pengembangan investasi di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, baik investasi pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- Menjembatani aspirasi tingkat basis baik dari desa maupun dari kelompok-

- kelompok kecil pelaku pariwisata yang ada.
- c. Menggalang kerjasama, koordinasi, sinergi sistem yang dinamis, jejaring dan kepemimpinan dalam pengelolaan destinasi.

Sedangkan upaya-upaya penguatannya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membantu secara kelembagaan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengenal potensi dan kemampuan yang dimiliki. Mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang dihadapi dan mendorong agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting serta melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi/mengantisipasi masalah yang dihadapi.
- b. Memperkuat sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai macam masukan maupun akses dalam pengembangan dan penguatan sumberdaya yang dimiliki.
- c. Mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang tidak terkendali. Pembangunan kelembagaan ini diharapkan juga dapat mengkolaborasikan secara harmonis lembaga pemerintah, lembaga masyarakat lokal dan juga lembaga lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Kelembagaan Badan Pelaksana BPOLBF secara struktural terdiri atas: Direktur Utama; Satuan Pemeriksa Intern dan 4(empat) Direktur Teknis ; Direktur Destinasi, Direktur Pemasaran, Direktur Industri dan kelembagaan dan Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik. Dalam menjalankan fungsinya, masing-masing memiliki tugas untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata diantaranya.

1. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik

a. Pengelolaan Keuangan

Sumber pendanaan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersumber dari APBN yang dikelola melalui mekanisme pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Terhitung sejak 8 November 2022, BPOLBF resmi menyandang status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Transformasi status ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan (otonomi finansial) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari status BLU, BPOLBF berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang sehat guna mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain itu, guna menjamin keberlanjutan program strategis, BPOLBF dituntut untuk melakukan perencanaan anggaran yang matang dan akurat. Selain mengandalkan alokasi Rupiah Murni (APBN), BPOLBF juga didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pendapatan operasional mandiri, sesuai dengan marwah fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU.

b. Umum dan Operasional

Transformasi Labuan Bajo menjadi destinasi unggulan internasional memerlukan penguatan standar kepariwisataan yang komprehensif. Hal ini menuntut dukungan SDM profesional yang mampu mengintegrasikan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan visi strategis untuk menghasilkan output yang terukur bagi pengembangan pariwisata di Labuan Bajo Flores. Saat ini, BPOLBF didukung oleh 100 personel yang terdiri dari unsur pimpinan (pejabat), staf, hingga tenaga penunjang operasional (resepsionis, keamanan, pramusaji, dan pengemudi). Jumlah ini diproyeksikan terus berkembang sejalan dengan peningkatan kebutuhan organisasi dalam menjalankan Tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjaga produktivitas dan memenuhi hak pegawai, BPOLBF berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran secara rutin setiap bulannya yang mencakup:

- Gaji dan Tunjangan: Diberikan secara proporsional berdasarkan golongan dan jenjang jabatan yang merujuk pada peraturan menteri keuangan (PMK) dan Standar Biaya Masukan yang berlaku.
- Fasilitas Kerja: Penyediaan sarana pendukung untuk menjamin kelancaran tugas operasional.
- Biaya Operasional dan Pemeliharaan: Pemenuhan kebutuhan akan keberlangsungan Operasional Kantor dan pemeliharaan aset serta operasional pada kawasan Otorita Parapuar.

Melalui pemenuhan hak dan fasilitas yang memadai, diharapkan kinerja seluruh jajaran pegawai dapat meningkat secara signifikan. Hal ini bertujuan agar kehadiran BPOLBF memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik bagi internal organisasi maupun bagi pemangku kepentingan eksternal di kawasan Labuan Bajo Flores.

c. Strategi Komunikasi Publik

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* publik terhadap dua fungsi utama BPOLBF yaitu Koordinatif dan Otoritatif, strategi komunikasi publik yang digunakan adalah dengan menjalin kerja sama dengan media massa baik lokal dan nasional, melalui skema media partnership, koordinator pemberitaan media, dan diseminasi informasi. Selain itu, strategi lain yang digunakan adalah dengan temu media yang dikemas melalui *press conference* Diskusi Kolaborasi Bersama Media (DISKORIA) secara hybrid. Dalam kegiatan Diskoria ini, BPOLBF berkolaborasi bersama mitra strategis seperti Pemerintah Daerah, hotel, asosiasi, dan komunitas sehingga narasumber kegiatan ini tidak hanya berasal dari jajaran direksi BPOLBF saja tetapi juga mitra-mitra strategis di dunia kepariwisataan tersebut. BPOLBF juga memiliki media sosial yang aktif memberitakan, mempromosikan, dan menampilkan berbagai program BPOLBF baik di wilayah koordinatif maupun otoritatif. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah jumlah kunjungan dan meningkatkan jumlah investasi.

Selain, program kehumasan dan kerja sama media tersebut, strategi komunikasi publik lain yang juga dilakukan adalah dengan menerima layanan pengaduan, permintaan informasi dan permohonan data. Adapun kelompok kerja yang membawahi bidang ini adalah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID adalah pejabat atau unit di badan publik yang bertanggung jawab mengelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. PPID berperan sebagai pintu satu layanan untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan hak publik atas informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008. Beberapa kanal untuk memperoleh informasi ini dapat dilakukan melalui microsite PPID, SP4N Lapor, Hotline PPID BPOLBF, email komblikbpolbf@gmail.com, Direct Message/Inbox melalui media sosial dan datang langsung ke kantor BPOLBF. PPID menjamin keterbukaan informasi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh data yang akurat, cepat, dan mudah

2. Kelembagaan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Strategi Investasi Pengembangan Kawasan Parapuar sebagai bagian dari Kawasan Otoritatif BPOLBF diarahkan untuk menjadi model pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Upaya strategi pengembangan model bisnis kawasan yang mampu menciptakan berbagai peluang usaha pariwisata,

mulai dari akomodasi, atraksi wisata, hingga fasilitas pendukung lainnya, sehingga Kawasan Parapuar dapat berkembang sebagai destinasi investasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menarik minat investor yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan Parapuar dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat jangka panjang bagi destinasi serta masyarakat di sekitarnya. Sejalan dengan itu strategi investasi akan disesuaikan dengan lebih menitikberatkan pada pengembangan investasi di dalam Kawasan Otoritatif, khususnya Kawasan Parapuar dengan menitikberatkan pada :

a. Pengembangan Strategi Investasi Hijau di Kawasan Parapuar

Pengembangan strategi investasi hijau diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan di Kawasan Parapuar mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan, efisiensi energi, dan konservasi alam. Strategi ini mencakup penyusunan konsep pengembangan kawasan yang ramah lingkungan, penerapan standar green building, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengelolaan limbah dan sumber daya air yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, kawasan Parapuar diharapkan menjadi destinasi investasi pariwisata yang berwawasan lingkungan serta menarik minat investor yang memiliki komitmen terhadap prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

b. Hilirisasi Produk Pariwisata Berbasis Mice dan Geopark

Upaya hilirisasi dilakukan dengan mengembangkan potensi kawasan menjadi produk pariwisata yang bernilai tambah, khususnya melalui integrasi konsep MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dan potensi Geopark di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya. Pengembangan ini dapat berupa pembangunan fasilitas venue MICE, ruang pertemuan, amphitheater alam, serta paket kegiatan konferensi berbasis alam yang memanfaatkan keunikan lanskap dan geodiversity kawasan. Hilirisasi ini bertujuan untuk memperluas segmen pasar wisata, meningkatkan lama tinggal wisatawan, serta memperkuat posisi destinasi sebagai pusat kegiatan bisnis, ilmiah, dan event internasional berbasis alam.

c. Pengembangan Model Bisnis Kawasan

Pengembangan model bisnis kawasan dilakukan untuk menciptakan skema investasi yang menarik dan berkelanjutan bagi investor, sekaligus memberikan

manfaat ekonomi bagi kawasan dan masyarakat sekitar. Model bisnis yang dikembangkan mencakup penyiapan investment project ready to offer, penyusunan skema kerja sama pemanfaatan lahan, pengembangan berbagai klaster bisnis pariwisata (resort, eco-lodge, atraksi wisata, retail, dan rekreasi), serta integrasi dengan rantai pasok lokal. Dengan model bisnis yang jelas dan terstruktur, Kawasan Parapuar diharapkan mampu menjadi hub investasi pariwisata baru di Labuan Bajo yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

d. Penguatan Ekosistem Investasi dan Kemitraan

Strategi ini juga didukung melalui penguatan ekosistem investasi dengan membangun kemitraan antara pemerintah, investor, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Hal ini dilakukan melalui penyusunan paket investasi, promosi investasi, serta fasilitasi kerja sama dengan mitra strategis di sektor pariwisata, hospitality, dan pengembangan destinasi. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi sekaligus memastikan bahwa pengembangan kawasan memberikan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

3. Kelembagaan Destinasi Pariwisata

Pengelolaan destinasi pariwisata dilaksanakan melalui pendekatan terpadu yang menitikberatkan pada tiga komponen utama destinasi, yaitu Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas (3A). Ketiga komponen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan kawasan guna meningkatkan kualitas destinasi sekaligus memperkuat daya saing pariwisata di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya. Dalam mendukung penguatan kelembagaan destinasi pariwisata, Direktorat Destinasi Pariwisata mengembangkan pendekatan strategis melalui lima payung program utama yang dirancang sebagai kerangka intervensi terpadu dalam pengembangan destinasi di kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya. Kelima program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik destinasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengalaman wisata, penguatan tata kelola, serta keberlanjutan ekosistem pariwisata secara menyeluruh.

a. Diversifikasi Produk Daya Tarik Wisata

Program ini diarahkan untuk memperluas ragam produk dan aktivitas wisata guna mengurangi ketergantungan pada satu jenis atraksi, sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi melalui pengembangan wisata berbasis alam, budaya, petualangan,

dan *wellness tourism*. Program ini diawali dengan penguatan aspek perencanaan destinasi melalui penyusunan berbagai kajian strategis dan dokumen teknis, antara lain pemetaan daya tarik wisata unggulan, penyusunan rencana aksi pengembangan destinasi, serta penyusunan dokumen perencanaan seperti *feasibility study* dan masterplan kawasan. Program ini akan difokuskan pada penguatan *mainland tourism* sebagai penyeimbang wisata bahari, melalui pengembangan produk tematik berbasis lanskap darat, integrasi paket wisata antar destinasi di Pulau Flores, serta penciptaan *signature experiences* yang autentik dan berkkelas dunia. Selain itu, diversifikasi produk juga akan diarahkan untuk menjangkau segmen pasar baru seperti *wellness tourism*, *eco-tourism*, dan *educational tourism*, guna meningkatkan *length of stay* dan kualitas belanja wisatawan.

b. Fasilitas Pengembangan Wisata Berkelanjutan

Program ini diarahkan pada penerapan prinsip keberlanjutan melalui penguatan aspek kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang mengacu pada indikator TTDI. Implementasi dilakukan melalui program *Wisata Bersih* dan *Green Action*, termasuk aksi bersih kawasan, edukasi pengelolaan sampah, serta penanaman pohon di kawasan otorita dan wilayah koordinatif. Program ini akan diperkuat melalui pengembangan sistem pengelolaan lingkungan berbasis kawasan, termasuk integrasi pengelolaan sampah terpadu, penerapan standar destinasi hijau (*green destination standard*), serta pengembangan skema *carbon offset* melalui rehabilitasi kawasan. Selain itu, akan didorong penguatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam praktik pariwisata berkelanjutan, sehingga terbentuk ekosistem destinasi yang rendah emisi dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

c. Fasilitas Pengembangan Tata Kelola Destinasi (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wisata)

Fasilitas pengembangan tata kelola destinasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat desa wisata. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan, pendampingan, forum dan webinar, serta pelaksanaan *Floratama Destination Leadership Program* (FDLP) sebagai upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajemen destinasi di tingkat lokal. Program ini bertujuan untuk mendorong tata kelola destinasi yang partisipatif, profesional, dan berbasis komunitas, sehingga masyarakat dapat berperan aktif sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata.

Selain penguatan kapasitas, program ini juga didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung destinasi dan desa wisata oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Dukungan tersebut meliputi penyediaan dan penataan fasilitas dasar pariwisata, antara lain penataan titik atraksi, penyediaan fasilitas kebersihan seperti tempat sampah terpilah, pemasangan papan informasi dan interpretasi wisata, pengembangan spot foto dan ruang publik, serta peningkatan fasilitas pendukung aktivitas wisata berbasis komunitas. Intervensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan destinasi dan desa wisata dalam menerima kunjungan wisatawan, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan dan pengalaman wisata berbasis komunitas. Dengan adanya dukungan sarana dan prasarana tersebut, desa wisata diharapkan tidak hanya berkembang sebagai objek kunjungan, tetapi juga sebagai entitas ekonomi lokal yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

d. Pengembangan Amenitas dan Daya Tarik Wisata

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata guna memenuhi standar pelayanan wisata yang baik. Pengembangan amenities mencakup pusat informasi wisata (*visitor center*), area parkir, penyediaan fasilitas publik, ruang terbuka publik, area istirahat (*rest area*), *viewing deck*, serta fasilitas pendukung aktivitas wisata seperti jalur pedestrian, titik interpretasi, dan ruang interaksi wisatawan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperkuat kualitas pengalaman berwisata secara menyeluruh. pengembangan amenities akan difokuskan pada kawasan otoritatif, khususnya Parapuar, melalui penyediaan fasilitas berstandar internasional yang terintegrasi dengan konsep *smart destination* dan prinsip keberlanjutan. Selain itu, pengembangan amenities juga akan didorong melalui skema kolaborasi investasi dengan pihak swasta pada lot-lot pengembangan, guna mempercepat penyediaan fasilitas berkualitas serta meningkatkan daya tarik kawasan sebagai destinasi unggulan.

e. Pengembangan Aksesibilitas dan Infrastruktur Pariwisata

Program ini menjadi prioritas utama dalam mendukung pengembangan kawasan, khususnya di kawasan Parapuar sebagai kawasan otoritatif yang dikelola BPOLBF. Pembangunan infrastruktur dasar diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan kawasan, kenyamanan pengunjung, serta memperkuat daya tarik investasi. Infrastruktur yang dikembangkan meliputi pembangunan jaringan jalan kawasan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penyediaan jaringan listrik, penguatan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur

digital, serta pengembangan sistem destinasi berbasis teknologi (*smart tourism*). Selain itu, pengembangan juga mencakup pembangunan fasilitas lingkungan seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai bentuk implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan. Beberapa capaian pembangunan antara lain :

- Tahun 2022 : Pembangunan Jalan Kolektor dalam kawasan sepanjang $\pm 1,5$ km dengan Row 12 dan ROW 24;
- Tahun 2024 : Instalasi jaringan listrik sepanjang $\pm 1,7$ km dari arah jalan Trans Flores sampai titik Natas Parapuar;
- Tahun 2025 : Pembangunan Akses Jalan Masuk Kawasan sepanjang ± 180 meter dengan 2 Lajur Kiri dan Kanan dengan Ulditch pada sisi Kiri dengan ROW 24

Program ini akan difokuskan pada penyelesaian infrastruktur dasar secara menyeluruh dan terintegrasi, penguatan konektivitas kawasan, serta pengembangan sistem mobilitas berkelanjutan (*green mobility*). Selain itu, pengembangan infrastruktur akan diarahkan untuk mendukung kesiapan investasi, peningkatan kualitas pengalaman wisata, serta penerapan sistem destinasi yang terintegrasi dengan pengelolaan kawasan berbasis data.

Secara keseluruhan, kelima payung program tersebut dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, akademisi, komunitas, dan pelaku industri pariwisata, guna memastikan pengembangan destinasi dilakukan secara terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar, serta berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara optimal bagi kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya.

4. Kelembagaan Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Pariwisata Mancanegara

Dalam mendukung penguatan kelembagaan pemasaran pariwisata, Direktorat Pemasaran Pariwisata BPOLBF juga mengembangkan pendekatan strategis melalui empat flagship program, yaitu Floratama Insight, Floratama Media, Floratama Travel Experience, dan Floratama Production. Keempat program ini dirancang sebagai kerangka kerja terpadu yang tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga pada penguatan basis data, penciptaan pengalaman wisata, serta inovasi event yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap ekosistem pariwisata.

a) *Floratama Insight (Integrated Strategy & Market Insight)*

Floratama Insight merupakan pilar utama dalam penguatan pemasaran berbasis data di lingkungan BPOLBF. Program ini berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait profil, preferensi, serta perilaku wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo Flores. Sepanjang tahun 2025, Floratama Insight telah menghasilkan berbagai temuan strategis, diantaranya temuan terkait dominasi wisatawan mancanegara sebesar 71,9% dengan rata-rata pengeluaran mencapai USD 1.159,88 per orang. Selain itu, data menunjukkan bahwa daya tarik utama masih terpusat pada Taman Nasional Komodo (85%) dan aktivitas bahari (51%), namun mulai terlihat peningkatan minat terhadap destinasi darat.

Selain menghasilkan data, program ini juga telah berkontribusi dalam penyusunan rekomendasi strategis pemasaran, termasuk penguatan promosi wisata darat, pengembangan produk gastronomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan destinasi. Kegiatan seperti survei tematik, forum bincang pariwisata, dan pemantauan tren kunjungan secara berkala menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat responsif terhadap dinamika pasar. Dengan demikian, Floratama Insight tidak hanya berfungsi sebagai pusat data, tetapi juga sebagai penggerak strategi berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Ke depan, Floratama Insight perlu diperkuat melalui pengembangan sistem data yang lebih terintegrasi dan real-time, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam kerangka Tourism 5.0. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dalam mengkonversi data menjadi strategi yang lebih implementatif, seperti penyusunan segmentasi pasar yang lebih spesifik dan pengembangan pola perjalanan wisata berbasis minat. Penguatan kolaborasi dengan stakeholder, termasuk pelaku industri dan akademisi, juga menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem data pariwisata yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

b. Floratama Media (Publikasi, Media, dan Kemitraan)

Floratama Media berperan sebagai ujung tombak dalam membangun citra dan eksposur destinasi Labuan Bajo Flores melalui berbagai kanal komunikasi dan publikasi. Program ini mencakup pengelolaan media sosial (Instagram), produksi konten kreatif, serta pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk media, *influencer*, dan mitra industri. Sepanjang 2025, Floratama Media telah berhasil meningkatkan visibilitas destinasi melalui berbagai kampanye digital, produksi konten visual, serta aktivasi promosi yang melibatkan partisipasi publik. Pada tahun lalu Floratama Media memproduksi 120+ konten Instagram,

meningkatkan jumlah pengikut dari 500 menjadi 1.800, serta bekerja sama dengan 10 kreator konten di Floratama.

Pada 2026, Floratama Media menargetkan produksi 150 konten media sosial, meningkatkan *engagement* pengikut, kenaikan jumlah pengikut hingga 50%, serta kolaborasi dengan sedikitnya 10 kreator konten. Selain itu, program ini juga mencakup dokumentasi destinasi dalam bentuk foto dan video di berbagai kabupaten Floratama, serta penyusunan narasi destinasi yang kuat sebagai bagian dari strategi branding. Upaya ini menunjukkan bahwa pendekatan pemasaran tidak lagi bersifat konvensional, tetapi telah bertransformasi menuju pemasaran digital yang lebih adaptif dan terukur. Ke depan, penguatan Floratama Media perlu difokuskan pada pengembangan *storytelling* yang lebih otentik dan berbasis kearifan lokal, serta optimalisasi pemanfaatan *user-generated content* (UGC) sebagai bagian dari strategi promosi partisipatif. Selain itu, integrasi dengan platform digital global dan pemanfaatan data analitik menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Dengan pendekatan ini, Floratama Media diharapkan mampu memperkuat *positioning* Labuan Bajo Flores sebagai destinasi berkelas dunia yang memiliki identitas kuat dan diferensiasi yang jelas.

c. **Floratama Travel Experience (Destination Branding & Experience)**

Floratama Travel Experience difokuskan pada penciptaan pengalaman wisata yang berkualitas dan sesuai dengan identitas destinasi Labuan Bajo Flores. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pola perjalanan wisata yang terstruktur, menarik, dan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan serta nilai ekonomi yang dihasilkan. Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, termasuk famtrip bersama maskapai internasional seperti AirAsia dan Scoot, serta partisipasi dalam event promosi seperti *Bali Beyond Travel Fair* dan *Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF)*.

Selain itu, program ini juga telah mendorong pengembangan wisata tematik, seperti wisata gastronomi di Flores Tengah dan promosi wisata darat sebagai alternatif dari dominasi wisata bahari. Upaya ini menjadi penting dalam rangka mendistribusikan kunjungan wisatawan ke wilayah-wilayah lain di luar kawasan utama, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, Floratama Travel Experience tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai instrumen dalam pengelolaan arus wisatawan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Ke depan, pengembangan program ini perlu diarahkan pada diversifikasi produk wisata yang lebih inovatif dan berbasis pengalaman (*experience-based tourism*),

termasuk integrasi antara budaya, alam, dan aktivitas komunitas lokal. Selain itu, diperlukan penguatan konektivitas antar destinasi serta penyusunan paket wisata yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan pasar. Dengan strategi yang tepat, Floratama Travel Experience diharapkan mampu meningkatkan daya saing destinasi sekaligus memperkuat positioning Labuan Bajo Flores sebagai destinasi yang tidak hanya indah, tetapi juga memberikan pengalaman yang bermakna.

d. Floratama Production (Inovasi dan Solusi Event)

Floratama Production merupakan program strategis yang berfokus pada penyelenggaraan dan pengembangan event sebagai instrumen pemasaran dan penguatan ekosistem pariwisata. Program ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan event, baik yang diselenggarakan secara mandiri maupun kolaboratif. Sepanjang 2025, berbagai event telah berhasil diselenggarakan dengan capaian yang signifikan, antara lain POTHP v4, Mai Hang Food Festival, serta Flow & Glow. Ketiga event tersebut menyumbangkan PNBP bagi BPOLBF sebesar Rp 36.358.250, memberi kesempatan kepada 50 UMKM untuk mengembangkan usahanya, serta mendukung misi Kemenpar dalam pengembangan *wellness tourism*. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, Floratama Production juga berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta komunitas setempat. Event-event yang diselenggarakan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media promosi budaya, produk lokal, dan potensi destinasi. Dukungan terhadap event di wilayah koordinatif juga menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan promosi serta meningkatkan kapasitas penyelenggaraan event di daerah.

Di samping menyelenggarakan event, Floratama Production juga mendukung penyelenggaraan event oleh pihak lain, seperti Sinema Rakyat (kolaborasi Mawatu dengan Kementerian Ekonomi Kreatif), Festival Golo Koe (oleh Keuskupan Labuan Bajo), Festival Bale Nagi (Flores Timur), Festival Ine Maria Guadalupe (Ende), dan Festival Lamaholot (Lembata). Ke depan, pengembangan Floratama Production perlu diarahkan pada penciptaan event yang lebih kuratif, berkualitas, dan memiliki daya tarik internasional, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan integrasi antara event dan strategi pemasaran secara keseluruhan, sehingga setiap event mampu memberikan dampak yang terukur terhadap kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah. Dengan

pendekatan ini, event tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi menjadi katalis utama dalam membangun citra dan pengalaman destinasi yang kuat.

5. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

Satuan Pemeriksa Internal (SPI) merupakan unsur pengawas internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Perpres tersebut, SPI memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan di dalam organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan kawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan unit ini menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga dalam mencapai target pengembangan destinasi pariwisata super prioritas.

Secara struktural, Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pemeriksa Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kedudukan ini memberikan independensi bagi SPI untuk melakukan evaluasi objektif terhadap kinerja seluruh unit kerja di bawah Badan Pelaksana. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, rincian tugas, serta fungsi spesifik dari satuan ini diatur lebih mendalam melalui Peraturan Menteri guna mendukung efektivitas tata kelola internal BPOLBF.



BAB 4

TARGET KINERJA, PROGRAM
KERJA, DAN KERANGKA
PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA, PROGRAM KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan memiliki peran sebagai elemen utama untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dalam periode tertentu. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur. Target kinerja merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi sehingga dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi. Sedangkan kerangka pendanaan merupakan bagian penting yang menggambarkan bagaimana strategi dan program kerja akan didanai untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dalam suatu periode tertentu.

4.1 Target Kinerja

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) merupakan sebuah satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Pariwisata khususnya di bawah Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Oleh karena itu, target kinerja BPOLBF merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Renstra Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

4.1.1 Target Kinerja Kementerian Pariwisata

Pada Renstra Kementerian Pariwisata terdapat 7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai penyumbang data makro untuk target kinerja Kementerian tahun 2025 - 2029. Tabel 4.1 menunjukkan Sasaran Strategis (SS), Indikator pada setiap sasaran strategi, serta target-target yang diharapkan dapat dicapai Kementerian tahun 2025-2029. Matriks kinerja dari Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) terlampir.

Tabel 4.1. Target Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET 2025	TARGET 2029
SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata	IKSS 1.1	Rasio PDB Pariwisata (persen)	4,20 – 4,30*	4,90 – 5,00
		IKSS 1.2	Devisa Pariwisata (miliar USD)	17,1 – 18,3*	32,0 – 39,4

		IKSS 1.3	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/kunjungan)	1.220*	1.600-1.672
		IKSS 1.4	Tenaga Kerja Pariwisata (juta orang)	25,75	29,00
		IKSS 1.5	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta kunjungan)	14,0 – 15,0*	20,0 – 23,5
		IKSS 1.6	Perjalanan Wisatawan Nusantara (juta perjalanan)	1.084	1.500
SS.2	Meningkatnya Kualitas Governance Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	86,5	90,5

*) Pemutakhiran RKP 2025

Sumber : Renstra Kemenpar 2025 – 2029

Selain itu, sesuai dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 3 (tiga) penugasan kegiatan prioritas untuk sektor pariwisata, yakni:

1. **Percepatan Pembangunan 4 (empat) DPP** (Borobudur-Yogyakarta Prambanan, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Lombok-Gili Tramenai);
2. **Pengembangan 6 (enam) DPP** (Manado Likupang, Bangka-Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai);
3. **Penguatan 3 (tiga) DPR** (Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau).

Adapun sasaran, indikator, beserta dengan target kegiatan prioritas Kementerian Pariwisata berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang akan dicapai Labuan Bajo tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Target Kegiatan Prioritas Kementerian Pariwisata Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 Khusus untuk Labuan Bajo

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Percepatan Pembangunan 4 Destinasi Pariwisata Prioritas							
Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Labuan Bajo	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo	Juta Rupiah	42.889,25	45.063,74	47.348,47	49.749,04	52.062,72
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo	Miliar Rupiah	1.175,23	1.417,33	1.709,30	2.061,42	2.488,59
	Devisa Pariwisata Labuan Bajo	Juta USD	283,52	347,12	424,98	520,32	637,04
	Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo	Orang	304.910	324.957	346.323	369.094	393.362
	Investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	Juta Rupiah	663.817,72	741.347,82	827.932,99	924.630,81	1.032.622,38

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025 - 2029

4.1.2 Target Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

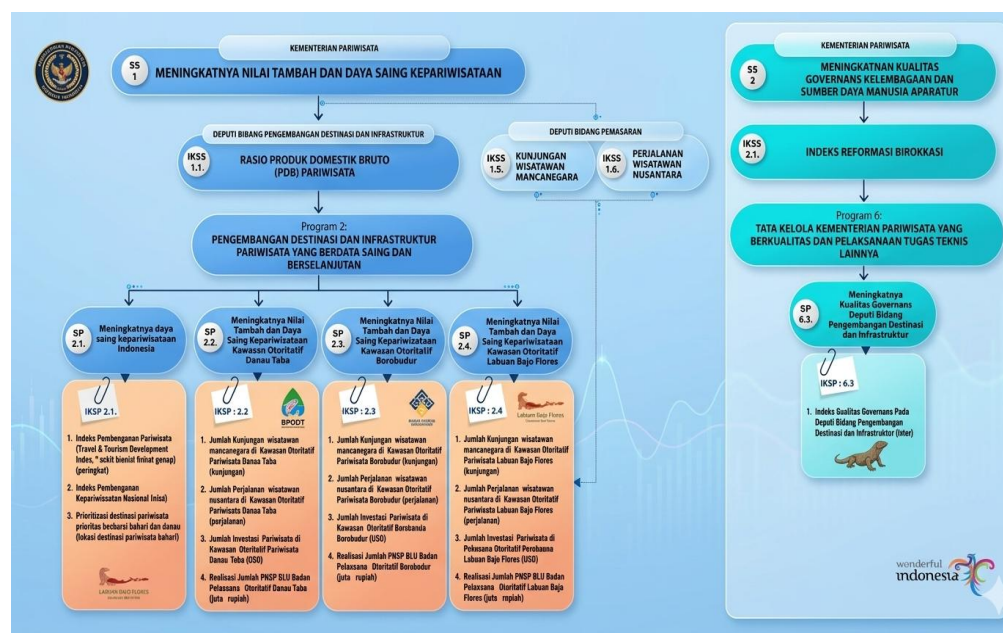
Penjabaran target kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dilakukan melalui mekanisme kaskade yang sistematis, dimulai dari Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai representasi janji kinerja level eselon I yang berfokus pada peningkatan kualitas serta daya saing destinasi secara makro. Level strategis ini kemudian diturunkan secara teknis ke dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada level eselon II, yang selanjutnya dioperasionalkan oleh unit kerja seperti BPOLBF melalui intervensi nyata pada aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas di wilayah koordinatif. Seluruh rangkaian ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan

infrastruktur dan pengembangan kawasan di lapangan memiliki garis lurus (*line of sight*) yang jelas dalam mendukung pencapaian kontribusi PDB dan devisa pariwisata yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pariwisata 2025–2029.

Integrasi antara IKSP dan IKSK mentransformasi target strategis menjadi instrumen penggerak inovatif bagi Asisten Deputi dan Badan Pelaksana Otorita seperti BPOLBF, dimana pembagian tanggung jawab yang presisi memungkinkan kolaborasi lintas unit dalam mempercepat pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas yang adaptif terhadap dinamika global. Melalui sinergi ini, unit pusat berperan sebagai perumus standar dan kebijakan nasional, sementara badan otorita bertindak sebagai akselerator di lapangan yang memastikan pembangunan infrastruktur tidak lagi berjalan secara parsial atau terfragmentasi. Pendekatan holistik ini mengunci seluruh aktivitas operasional ke dalam satu ekosistem pariwisata berkualitas yang berkelanjutan, sehingga setiap intervensi teknis di destinasi berkontribusi langsung pada pencapaian visi besar kepariwisataan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029.

Keselarasan target kinerja, mulai dari tingkat kedeputan hingga unit kerja di bawahnya, diuraikan secara komprehensif melalui skema pohon kinerja (*cascading*) dan tabel berikut.

Pohon Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Level: Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP)



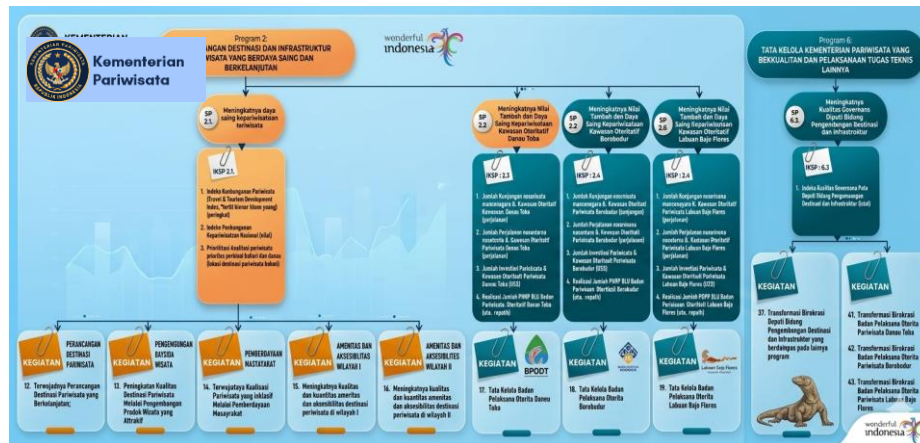
Gambar 4.1 Infografis Pohon Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur pada Level : Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran

Program (SP)

Diagram Kegiatan

Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

DIKAITKAN DENGAN SASARAN PROGRAM (SP) DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)



Gambar 4.2 Infografis Diagram Kegiatan pada Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Dikaitkan dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

Adapun Target Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Target Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSK)		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS 1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata	IKSK 1.1	Rasio PDB Pariwisata (persen)	4,20 - 4,30 *	4,60 - 4,70	4,70 - 4,80	4,80 - 4,90	4,90 - 5,00

SS 2	Meningkatnya Kualitas <i>Governance</i> Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	IKSK	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5
------	--	------	------------------------------------	------	------	------	------	------

4.1.1 Target Kinerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

BPOLBF memiliki peran strategis dalam mendukung dan mempercepat pencapaian visi dan misi Kementerian Pariwisata, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Tujuan utama dari pengembangan ini adalah untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi di sektor pariwisata, maupun melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang menjadi fokus pembangunan. Dalam praktiknya, BPOLBF beroperasi dengan fokus pada dua kategori wilayah.

- Wilayah Otoritatif (PARAPUAR) – Wilayah dengan kewenangan penuh di bawah BPOLBF untuk pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan.
- Wilayah Koordinatif (11 Kabupaten) – Wilayah yang berada dalam lingkup koordinasi BPOLBF untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata di daerah tersebut.

Sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOLBF menetapkan target kinerja yang digambarkan melalui Sasaran Strategis (SS) serta Sasaran Program (SP) yang telah ditentukan oleh Kementerian Pariwisata. Pada Target kinerja Kementerian Pariwisata, BPOLBF turut mendukung tercapainya sasaran strategis kementerian yaitu Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata yang kemudian diturunkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Rasio PDB Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dan Sasaran Program (SP) Meningkatnya Daya Saing Kepariwisata Indonesia. **Tabel 4.4**, yang memberikan gambaran lengkap mengenai setiap sasaran strategis beserta indikator pencapaiannya.

Tabel 4.4. Target Kinerja BPOLBF Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Program 1: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan									
SP 1: Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo		IKSP 1.1. Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Kunjungan	300	400	500	600	700
		IKSP 1.2 Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara ke Destinasi pariwisata Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Perjalanan	3000	4000	5000	6000	7000
		IKSP 1.3 Jumlah Investasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		USD	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000
		IKSP 1.4 Realisasi Jumlah PNB BLU Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores		Juta Rupiah	250	975	1.500	2.500	3.000
Kegiatan 1: Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores									
SK1. Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		IKSK 1.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Kegiatan	2	2	3	3	4
		IKSK 1.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Kegiatan	1	2	3	3	3
SK.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores		IKSK 2.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Promosi	2	2	3	3	4
		IKSK 2.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Kegiatan	2	2	3	3	4
SK.3 Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores		IKSK 3.1 Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores		Unit	1	2	3	4	5
		IKSK 3.2 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Km/hektar/wilayah	1	2	3	4	5
		IKSK 3.3 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Unit	1	1	2	3	4
		IKSK 3.4 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Kegiatan	1	1	1	1	2
SK.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di		IKSK 4.1 Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo		Kesepakatan	1	2	2	2	2

Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 4.2 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores		UMKM	30	30	30	30	30
	IKSK 4.3 Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores		Kegiatan	1	1	1	1	2
	IKSK 4.4 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores		Kegiatan	5	6	7	8	9
Kegiatan 2: Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores								
SK.5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	IKSK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores		Indeks	91.5	92	92.5	93	93.5
	IKSK 5.2 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores		Indeks	72	75	77	80	83
	IKSK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores		Presentase	80	80	80	80	80
Kegiatan 3: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								
SK.6 Meningkatkan Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Pariwisata	IKSK 6.1 Indeks Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores		Nilai	78.6	80	81.4	82.8	84.2

4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) didukung melalui berbagai mekanisme keuangan yang telah diatur dalam kerangka pendanaan. Sumber utama pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang terdiri dari rupiah murni sebagai alokasi utama dari pemerintah pusat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP BLU) sebagai pendapatan tambahan yang diperoleh dari layanan publik yang diselenggarakan oleh BPOLBF.

Selain memanfaatkan dana dari APBN dan PNBP BLU, BPOLBF juga berupaya mengoptimalkan pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata prioritas dengan mencari alternatif sumber pendanaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang diimplementasikan adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang memungkinkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur pariwisata melalui skema investasi jangka panjang. Dengan adanya KPBU, diharapkan pengembangan berbagai fasilitas dan sarana pendukung pariwisata dapat dilakukan secara lebih efisien serta mampu meningkatkan daya saing destinasi wisata di wilayah Labuan Bajo dan Flores.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPOLBF Tahun 2025-2029, kebutuhan anggaran telah dirancang secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi BPOLBF. Penyusunan kebutuhan anggaran

ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal BPOLBF, sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa mengabaikan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

Tabel 4.5. Kebutuhan Pendanaan Program Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo

No	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Kepariwisata	9,586	71,650	93,200	119,800	168,300
	Pemasaran	815	2,600	5,000	7,500	10,000
	Destinasi	8.171	55.300	74.400	98.400	144.400
	Industri Kelembagaan	600	13.750	13.800	13.900	13.900
2	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat KUKP)					
3	PNBP BLU	250	975	1.500	2.500	3.000

Flores 2025-2029

Ket: Angka dalam Juta Rupiah

Dalam upaya pengembangan Zona Otorita BPOLBF, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur serta berbagai fasilitas pendukungnya dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Dukungan anggaran dari pemerintah ini menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa pengembangan kawasan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Pendanaan ini dialokasikan untuk membiayai berbagai aspek pembangunan dan pengembangan di Zona Otorita, termasuk pembangunan fasilitas pariwisata, infrastruktur dasar seperti jalan dan sistem transportasi, serta pengembangan lingkungan yang menunjang pertumbuhan industri pariwisata. Dengan adanya pendanaan yang memadai, diharapkan kawasan otoritatif BPOLBF dapat dikembangkan secara berkelanjutan, modern, dan sesuai dengan standar internasional,

sehingga mampu menarik investasi serta meningkatkan daya saing destinasi wisata di Labuan Bajo dan Flores.

Selain mendapatkan pendanaan dari APBN, BPOLBF sebagai Badan Layanan Umum (BLU) juga memiliki mekanisme pendanaan lainnya melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber pendanaan ini diperoleh dari pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan jasa layanan yang diberikan oleh BPOLBF. Struktur tarif yang dikenakan dalam mekanisme PNBP disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan atau hasil investasi dana, sehingga mencerminkan keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan layanan.

PNBP yang diperoleh oleh BPOLBF dapat digunakan untuk mendukung operasional serta pengembangan berbagai program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan zona pariwisata otoritatif. Dengan adanya diversifikasi sumber pendanaan, BPOLBF dapat lebih fleksibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memastikan bahwa setiap program yang dikembangkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan sektor pariwisata secara keseluruhan.

Melalui kombinasi pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, PNBP BLU, serta potensi sumber pembiayaan lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), BPOLBF memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing global.



BAB 5

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Renstra BPOLBF Tahun 2025–2029 menjadi koridor strategis dalam pelaksanaan program, kegiatan, komponen, hingga subkomponen guna mencapai output, outcome, serta dampak nyata terhadap pembangunan di wilayah Labuan Bajo Flores. Dokumen ini sekaligus menjadi arah pembangunan sektor pariwisata untuk lima tahun ke depan yang harus dilaksanakan secara konsisten, dipantau secara berkelanjutan, serta dilengkapi dengan *milestones* pencapaian kinerja dari tahun pertama hingga tahun kelima.

Dalam implementasinya, BPOLBF juga tengah berada dalam fase perubahan transisional, mulai dari penajaman tujuan akhir hingga adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, yang turut membawa konsekuensi pada perbedaan visi, pola pikir, dan budaya kerja. Kondisi ini menuntut kemampuan adaptasi organisasi yang kuat agar tetap selaras dengan arah pembangunan nasional.

Keberhasilan pencapaian visi BPOLBF Tahun 2029 sangat tergantung pada komitmen seluruh pimpinan dan pegawai. Pengelolaan strategi tidak hanya berhenti pada perencanaan yang baik, tetapi terutama pada konsistensi implementasi sesuai rencana yang telah ditetapkan. Proses tersebut perlu didukung oleh sistem monitoring, pengukuran kinerja secara periodik, serta evaluasi berkelanjutan guna memastikan setiap langkah tetap berada pada jalur yang tepat (*on track*).

Selain itu, dinamika perubahan regulasi dan kebijakan harus terus diantisipasi untuk memahami dampaknya terhadap pelaksanaan Renstra. Dengan menerapkan prinsip peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*), diharapkan pengelolaan strategi dapat berjalan optimal, sehingga sektor pariwisata mampu menjadi salah satu kontributor utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.



LAMPIRAN

5.1 Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan BPOLBF

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam Juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program 1: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
SP 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	IKSP 1.1.1 Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kunjungan	300	400	500	600	700					
	IKSP 1.1.2 Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara ke Destinasi pariwisata Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Perjalanan	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000					
	IKSP 1.1.3 Jumlah Investasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	USD	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000					
	IKSP 1.1.4 Realisasi Jumlah PNPB BLU Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores	Juta Rupiah	250	975	1.500	2.500	3.000					
Kegiatan 1: Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores								9.986	71.600	93.250	120.000	168.000
SK1. Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	IKSK 1.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	2	2	3	3	4	150	300	500	750	1.000
	IKSK 1.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	2	3	3	3	250	1.000	2.000	3000	4.000
SK.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 2.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	2	2	3	3	4	100	300	500	750	1.000
	IKSK 2.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	2	2	3	3	4	315	1.000	2.000	3.000	4.000
SK.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 3.1 Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	Unit	1	2	3	4	5	100	4.000	6.000	8.000	12.000
	IKSK 3.2 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Km/hektar/wilayah	1	2	3	4	5	7,146	45.000	60.000	80.000	120.000
	IKSK 3.3 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Unit	1	1	2	3	4	725	6.000	8.000	10.000	12.000
	IKSK 3.4 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	1	1	1	2	200	300	400	400	400

SK.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 4.1 Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	Kesepakatan	1	2	2	2	2	200	6.000	6.000	6.000	6.000
	IKSK 4.2 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	UMKM	30	30	30	30	30	300	7.500	7.500	7.500	7.500
	IKSK 4.3 Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	1	1	1	2	100	250	300	400	400
	IKSK 4.4 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	5	6	7	8	9	500	500	750	1.000	1.000
Kegiatan 2: Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores								13.877	18.224	20.031	22.017	24.202
SK.5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	IKSK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	91.5	92	92.5	93	93.5					
	IKSK 5.2 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	72	75	77	80	83					
	IKSK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Presentase	80	80	80	80	80					
Kegiatan 3: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya												
SK.6 Meningkatnya Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Pariwisata	IKSK 6.1 Indeks Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Nilai	78.6	80	81.4	82.8	84.2					

5.2 Manual IKU

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Formula/Cara Menghitung	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Program 1: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan								
SP 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	IKSP 1.1.1 Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kunjungan	Identifikasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	300	400	500	600	700
	IKSP 1.1.2 Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara ke Destinasi pariwisata Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Perjalanan	Identifikasi jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
	IKSP 1.1.3 Jumlah Investasi Pariwisata diKawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	USD	Informasi investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata cq. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	200	300	400	500	600
	IKSP 1.1.4 Realisasi Jumlah PNPB BLU Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores	Juta Rupiah	Jumlah seluruh PNPB BLU yang disahkan ke Kuasa BUN sebagai pendapatan BLU, untuk periode Tahun Anggaran berjalan	250	975	1,5	2,5	3
Kegiatan 1: Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores								
SK1. Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	IKSK 1.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan mancanegara yang dilaksanakan	2	2	3	3	4
	IKSK 1.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	1	2	3	3	3
SK.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 2.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan nusantara yang dilaksanakan	2	2	3	3	4
	IKSK 2.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	2	2	3	3	4
SK.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 3.1 Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	Unit	Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik wisata yang telah dibangun di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1	2	3	4	5
	IKSK 3.2 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Km/hektar/wilayah	1. Identifikasi pengembangan aksesibilitas tahun berjalan (a) 2. Identifikasi pengembangan infrastruktur tahun berjalan (b) 3. Jumlah: a + b	1	2	3	4	5
	IKSK 3.3 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Unit	Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1	1	2	3	4

	IKSK 3.4 Jumlah fasilitas pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitas pemberdayaan	1	1	1	1	2
SK.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 4.1 Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	Kesepakatan	Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1	2	2	2	2
	IKSK 4.2 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	UMKM	Jumlah usaha pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	30	30	30	30	30
	IKSK 4.3 Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	Jumlah SDM yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas	1	1	1	1	2
	IKSK 4.4 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	Jumlah kegiatan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan	5	6	7	8	9
Kegiatan 2: Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores								
SK.5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	IKSK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	Identifikasi perhitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Kedeputan dan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)	91,5	92	92,5	93	93,5
	IKSK 5.2 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	Mengambil data dari Hasil Evaluasi Implementasi AKIP oleh Kementerian PANRB	72	75	77	80	83
	IKSK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang Telah Sesuai Rekomendasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi}} \times 100 \%$	80	80	80	80	80
Kegiatan 3: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								
SK.6 Meningkatnya Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Pariwisata	IKSK 6.1 Indeks Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Nilai	Nilai Indeks Kualitas Governance dihitung dengan pembagian 3 (tiga) komponen aktivitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, antara lain: Nilai SAKIP dengan bobot nilai 40 NKA dengan bobot nilai 20 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan bobot nilai 40 Dihitung dengan rumus : $(40 \times A/100) + (20 \times B/100) + (40 \times C/100)$ Keterangan : A = Nilai SAKIP Kedeputan B = NKA Kedeputan C = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Kedeputan	78,6	80	81,4	82,8	84,2

5.3 Rincian Program Kerja dan Alokasi Anggaran BPOLBF Tahun 2025-2029

5.3.1 Rincian Program Kerja dan Alokasi Anggaran BPOLBF Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target	Formula/Cara Menghitung	Turunan Program	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Penanggung jawab
Kegiatan 1: Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores							
SK1. Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	IKSK 1.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	2	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan mancanegara yang dilaksanakan	1. Familiarization Trip (3 Kegiatan " Famtrip Post Tour BBTF, Famtrip KOL Kolaborasi Air Asia Malaysia, Famtrip Kolaborasi New Zealand, Famtrip Tematik Alor Pasar Asia Tenggara, Mega Famtrip Inggris, Rusia, Kanada 2. Pameran Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025	150	Direktorat Pemasaran
	IKSK 1.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Flow and Glow: Tranquill on top of the Hill	250	Direktorat Pemasaran
SK.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 2.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	2	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan nusantara yang dilaksanakan	1. Table top Wisata Religi 2. Dukungan event Floratama (Lamaholot, Semana Santa, Parade Pesona Kebangsaan Ende 2025, Komodo Run 3. Promosi Banner Nataru dan Rekomendasi Destinasi Wisata	100	Direktorat Pemasaran
	IKSK 2.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	2	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	1. Picnic Over the Hill of Parapuar v4 2. Mai Hang Food Festival	315	Direktorat Pemasaran
SK.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 3.1 Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	Unit	1	Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik wisata yang telah dibangun di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Pengembangan Wisata Ekologis melalui penataan tanaman Estetika di Kawasan Parapuar (Green Action) 2. Pengembangan Wisata Bahari Pantai Binongko, Kab Manggarai Barat	100	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.2 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Km/hektar/wilayah	1	1. Identifikasi pengembangan aksesibilitas tahun berjalan (a) 2. Identifikasi pengembangan infrastruktur tahun berjalan (b) 3. Jumlah: a + b	1. Pembangunan Jalan Akses Masuk Lanjutan 200 Meter 2. Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada Lot I1,I2,I3,I4,I5, Lot K,Perluasan Lot G,Lot E dan jalan Penghubung Loot P)	7,146	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.3 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Unit	1	Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Penataan Natas Parapuar (Pasangan Batu dan Tangga Natas) 2. Pembangunan Area Parkir TIC BPOLBF 3. Kegiatan Land Clearing Lot I5 untuk Pembukaan Area TIC	725	Direktorat Destinasi

	IKSK 3.4 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi pemberdayaan	1. Floratama Destination Leadership Program (menciptakan Local Champion yang ekspertise dalam pengelolaan destinasi wisata di wilayah Floratama). 2. Pelatihan Hospitality & Pengelolaan Homestay di kab Manggarai dan Manggarai Barat 3. Pelatihan Paket Wisata, Digital Marketing, dan Olahan Hasil Laut, di Kab Manggarai Barat	200	Direktorat Destinasi
SK.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 4.1 Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	Kesepakatan	1	Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Promosi Investasi 2. Manajemen Investasi 3. Fasilitasi kemudahan perizinan	200	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.2 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	UMKM	30	Jumlah usaha pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	1. Floratama Academy (pengembangan bisnis unit usaha bidang pangan lokal sebagai upaya mendorong dan meningkatkan kemampuan negosiasi, akses pasar, akses permodalan dan inovasi bagi unit usaha lokal.) 2. Fasilitasi akses pasar UMKM ydi kawasan Mawatu Labuan Bajo Flores 3. Fasilitasi UMKM melalui event Weekend at Parapuar 2025	300	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.3 Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	Jumlah SDM yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas	1. Floratama Academy	100	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.4 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	5	Jumlah kegiatan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan	1. Forum Kepala Daerah 2. Forum Wartawan 3. Forum Stakeholder	500	Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
Kegiatan 2: Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores							
SK.5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	IKSK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	91.5	Identifikasi perhitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Kedeputan dan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)	1. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi RENJA, DIPA & Deviasi Hall 3 DIPA 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi Penyerapan Anggaran, belanja kontraktual, GUP & TUP 3. Hasil Pelaksanaan Anggaran meliputi Capaian output, Capaian Output, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan.	165	Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
	IKSK 5.2 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	72	Mengambil data dari Hasil Evaluasi Implementasi AKIP oleh Kementerian PANRB	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 2. Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP BPOLBF 4. Pelaporan Kinerja melalui aplikasi PERSI		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
	IKSK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Persentase	80	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang Telah Sesuai Rekomendasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi}} \times 100 \%$	1. Melakukan Pemantauan Evaluasi 2. Melaksanakan koordinasi dengan direktorat terkait dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. 3. Melakukan percepatan penyelesaian rekomendasi melalui penetapan target waktu penyelesaian.		Satuan Pemeriksa Internal
Kegiatan 3: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							

SK.6 Meningkatnya Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Pariwisata	IKSK 6.1 Indeks Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Nilai	78.6	Nilai Indeks Kualitas Governance dihitung dengan pembagian 3 (tiga) komponen aktivitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, antara lain: Nilai SAKIP dengan bobot nilai 40 NKA dengan bobot nilai 20 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan bobot nilai 40 Dihitung dengan rumus : $(40 \times A/100) + (20 \times B/100) + (40 \times C/100)$ Keterangan : A = Nilai SAKIP Kedeputian B = NKA Kedeputian C = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Kedeputian	1. Kemitraan dengan Media 2. Pengelolaan Media Sosial 3. Media monitoring dan evaluasi		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
---	--	-------	------	---	---	--	---

5.3.2 Rincian Program Kerja dan Alokasi Anggaran BPOLBF Tahun 2026

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target	Formula/Cara Menghitung	Turunan Program	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Penanggung jawab
Kegiatan 1: Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores							
SK1. Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	IKSK 1.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	2	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan mancanegara yang dilaksanakan	1. Famtrip Air Asia Malaysia 2. Famtrip Scoot Singapura	300	Direktorat Pemasaran
	IKSK 1.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	2	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Weekend at Parapuar 2. Flow and Glow: Tranquill on top of the Hill	1,000	Direktorat Pemasaran
SK.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 2.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	2	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan nusantara yang dilaksanakan	1. B8TF 2. Promosi Wisata Darat AWSTAR.	300	Direktorat Pemasaran
	IKSK 2.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	2	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	1. Picnic Over the Hill of Parapuar v5 2. Festival Parapuar	1,000	Direktorat Pemasaran
SK.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 3.1 Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	Unit	2	Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik wisata yang telah dibangun di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Pemetaan lokasi potensi atraksi Wisata Ziarah Religi Labuan Bajo Flores 2. Praktik Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan 2. Perencanaan dan Penataan Jalur Trekking Tahap I (Short Track)	4,000	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.2 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Km/hektar/wilayah	2	1. Identifikasi pengembangan aksesibilitas tahun berjalan (a) 2. Identifikasi pengembangan infrastruktur tahun berjalan (b) 3. Jumlah: a + b	1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahap I 2. Penyelesaian Isu Lahan HPL 129,6 Ha dan APL 4,98 Ha 3. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Rperpres RIDPN	45,000	Direktorat Destinasi

	IKSK 3.3 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Unit	1	Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Penyusunan DED dan Pembangunan Sarana prasarana pendukung Tourism Information Center (TIC) BPOLBF	6,000	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.4 Jumlah fasilitas pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitas pemberdayaan	1. Edukasi Keamanan & Keselamatan Wisata Bahari, Kab Manggarai Barat	300	Direktorat Destinasi
SK.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 4.1 Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	Kesepakatan	2	Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Promosi Investasi 2. Manajemen Investasi 3. Fasilitas kemudahan perizinan	6,000	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.2 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	UMKM	30	Jumlah usaha pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	1. Floratama Academy 2. Fasilitas UMKM lokal untuk pengisian unit cafetaria di Parapuar 3. Perencanaan pengembangan unit usaha baru di Parapuar	75,000	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.3 Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	Jumlah SDM yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas	1. Forum stakeholders Desa wisata	250	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.4 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	6	Jumlah kegiatan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan	1. Forum Stakeholder 2. Forum Wartawan	500	Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
Kegiatan 2: Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores							
SK.5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	IKSK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	92	Identifikasi perhitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Kedeputan dan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)	1. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi RENJA, DIPA & Deviasi Hall 3 DIPA 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi Penyerapan Anggaran, belanja kontraktual, GUP & TUP 3. Hasil Pelaksanaan Anggaran meliputi Capaian output Capaian Output, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan.		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
	IKSK 5.2 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	75	Mengambil data dari Hasil Evaluasi Implementasi AKIP oleh Kementerian PANRB	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 2. Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP BPOLBF 4. Pelaporan Kinerja melalui aplikasi PERSI		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
	IKSK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Presentase	80	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang Telah Sesuai Rekomendasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi}} \times 100 \%$	1. Melakukan Pemantauan Evaluasi 2. Melaksanakan koordinasi dengan direktorat terkait dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. 3. Melakukan percepatan penyelesaian rekomendasi melalui penetapan target waktu penyelesaian.		Satuan Pemeriksa Internal
Kegiatan 3: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
SK.6 Meningkatnya Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Pariwisata	IKSK 6.1 Indeks Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Nilai	80	Nilai Indeks Kualitas Governance dihitung dengan pembagian 3 (tiga) komponen aktivitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, antara lain: Nilai SAKIP dengan bobot nilai 40 NKA dengan bobot nilai 20	1. Kemitraan dengan Media 2. Pengelolaan Media Sosial 3. Media monitoring dan evaluasi		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik

				Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan bobot nilai 40 Dihitung dengan rumus : $(40 \times A/100) + (20 \times B/100) + (40 \times C/100)$ Keterangan : A = Nilai SAKIP Kedeputian B = NKA Kedeputian C = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Kedeputian			
--	--	--	--	--	--	--	--

5.3.3 Rincian Program Kerja dan Alokasi Anggaran BPOLBF Tahun 2027

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target	Formula/Cara Menghitung	Turunan Program	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Penanggung jawab
Kegiatan 1: Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores							
SK1. Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	IKSK 1.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	3	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan mancanegara yang dilaksanakan	1. Pemasangan/ Kerjasama TIC Pasif Labuan Bajo Flores (2 Lokasi/ Mitra) 2. Sales Mission/ Tabletop Potensial Labuan Bajo Flores 3. Wisata Pengenalan (Familiarization Trip) Kolaborasi (1 Wisata Pengenalan)	500	Direktorat Pemasaran
	IKSK 1.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	3	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Weekend at Parapuar 2. Flow and Glow: Tranquil on top of the Hill 3. Cross training event	2,000	Direktorat Pemasaran
SK.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 2.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	3	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan nusantara yang dilaksanakan	1. Pemasangan/ Kerjasama TIC Pasif Labuan Bajo Flores 2. Sales Mission/ Tabletop Potensial Labuan Bajo Flores 3. Wisata Pengenalan (Familiarization Trip) Tematik Flores	500	Direktorat Pemasaran
	IKSK 2.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	3	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	1. Picnic Over the Hill of Parapuar v6 2. Festival Parapuar 3. Jelajah dan Kemah	2,000	Direktorat Pemasaran
SK.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 3.1 Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	Unit	3	Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik wisata yang telah dibangun di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Perencanaan dan Pembangunan Wahana Flying Fox 2. Perencanaan dan Pembangunan Wahana Rock Climbing 3. Penataan Jalur Trekking Tahap II (Medium dan Long Track)	6,000	Direktorat Destinasi

	IKSK 3.2 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Km/hektar/wilayah	3	1. Identifikasi pengembangan aksesibilitas tahun berjalan (a) 2. Identifikasi pengembangan infrastruktur tahun berjalan (b) 3. Jumlah: a + b	1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahap II dan III 2. Penyusunan DED dan Pembangunan Jalan Dalam Kawasan 3. Perencanaan & Konstruksi Gerbang Utama & Landmark Akses Masuk Utama Parapuar 4. Penyusunan DED dan Pembangunan Sistem Jaringan Kelistrikan tahap I 5. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 6. Penataan Batas Lahan Pengganti Kabupaten Ngada (526,49 Ha) 7. Pembangunan Pagar Akses Jalan 200m 8. Koordinasi usulan program pengembangan infrastruktur terintegrasi kawasan parapuar	60,000	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.3 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Unit	2	Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Pembangunan TIC Kantor BPOLBF 2. Penyusunan DED & Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Ekologis Tahap I	8,000	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.4 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi pemberdayaan	1. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Wilayah Koordinatif BPOLBF	400	Direktorat Destinasi
SK.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 4.1 Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	Kesepakatan	2	Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Promosi Investasi 2. Manajemen Investasi 3. Fasilitasi kemudahan perizinan	6,000	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.2 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	UMKM	30	Jumlah usaha pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Fasilitasi Pengembangan Usaha Pariwisata bidang Kuliner: 1. Kerjasama akses permodalan 2. Fasilitasi peningkatan kualitas produksi 3. Packaging 4. Sertifikasi usaha 5. Akses Pasar	75,000	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.3 Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	Jumlah SDM yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas	1. Fasilitasi pelatihan kompetensi profesi pemandu wisata bahari dan pemandu wisata darat	300	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.4 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	7	Jumlah kegiatan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan	1. Forum Stakeholder 2. Forum Wartawan	750	Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
Kegiatan 2: Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores							
SK.5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	IKSK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	92.5	Identifikasi perhitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Kedeputan dan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)	1. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi RENJA, DIPA & Deviasi Hal 3 DIPA 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi Penyerapan Anggaran, belanja kontraktual, GUP & TUP 3. Hasil Pelaksanaan Anggaran meliputi Capaian output Capaian Output, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan.		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik

	IKSK 5.2 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	77	Mengambil data dari Hasil Evaluasi Implementasi AKIP oleh Kementerian PANRB	1. Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 2. Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP BPOLBF 4. Pelaporan Kinerja melalui aplikasi PERSI		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
	IKSK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Persentase	80	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang Telah Sesuai Rekomendasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi}} \times 100 \%$	1. Melakukan Pemantauan Evaluasi 2. Melaksanakan koordinasi dengan direktorat terkait dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. 3. Melakukan percepatan penyelesaian rekomendasi melalui penetapan target waktu penyelesaian.		Satuan Pemeriksa Internal
Kegiatan 3: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
SK.6 Meningkatnya Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Pariwisata	IKSK 6.1 Indeks Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Nilai	81.4	Nilai Indeks Kualitas Governance dihitung dengan pembagian 3 (tiga) komponen aktivitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, antara lain: Nilai SAKIP dengan bobot nilai 40 NKA dengan bobot nilai 20 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan bobot nilai 40 Dihitung dengan rumus : $(40 \times A/100) + (20 \times B/100) + (40 \times C/100)$ Keterangan : A = Nilai SAKIP Kedeputian B = NKA Kedeputian C = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Kedeputian	1. Kemitraan dengan Media 2. Pengelolaan Media Sosial 3. Layanan Informasi Publik		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik

5.3.4 Rincian Program Kerja dan Alokasi Anggaran BPOLBF Tahun 2028

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target	Formula/Cara Menghitung	Turunan Program	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Penanggung jawab
Kegiatan 1: Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores							
SK1. Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	IKSK 1.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	3	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan mancanegara yang dilaksanakan	1. Pemasangan/ Kerjasama TIC Pasif Labuan Bajo Flores (2 Lokasi/ Mitra) 2. Sales Mission/ Tabletop Potensial Labuan Bajo Flores 3. Wisata Pengenalan (Familiarization Trip) Kolaborasi (1 Wisata Pengenalan)	750	Direktorat Pemasaran
	IKSK 1.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	3	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Event Budaya di Parapuar 2. Event Wisata Olahraga di Parapuar 3. Event Kuliner di Parapuar	3,000	Direktorat Pemasaran
SK.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 2.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	3	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan nusantara yang dilaksanakan	1. Pemasangan/ Kerjasama TIC Pasif Labuan Bajo Flores 2. Sales Mission/ Tabletop Potensial Labuan Bajo Flores 3. Wisata Pengenalan (Familiarization Trip) Tematik Flores	750	Direktorat Pemasaran

	IKSK 2.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	3	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	1. Picnic Over the Hill of Parapuar v8 2. Festival Kuliner di Parapuar 3. Event Olahraga di Parapuar 4. Event Budaya di Parapuar	3,000	Direktorat Pemasaran
SK.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 3.1 Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	Unit	4	Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik wisata yang telah dibangun di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Perencanaan dan Pembangunan Ecological Hiking, Jogging and Running Centre 2. Pengembangan Wisata Edukasi / Taman Hutan Raya (Arboretum Parapuar) 3. Perencanaan dan Pembangunan Yoga and Eco Meditation 4. Penataan Edu Botanical Garden & Ethnological Lodok	8,000	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.2 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Km/hektar/wilayah	4	1. Identifikasi pengembangan aksesibilitas tahun berjalan (a) 2. Identifikasi pengembangan infrastruktur tahun berjalan (b) 3. Jumlah: a + b	1. Proses Legalisasi Kawasan Otoritatif 265,42 Hektar 2. Pembangunan Jalan Dalam Kawasan 3. Pembangunan Sistem Jaringan Kelistrikan tahap II 4. Koordinasi Reviu Masterplan Kawasan Otoritatif BPOLBF (+ 265,42 Hektar) 5. Pengadaan dan Pemasangan Guadrill Jalan Tanjakan 6. Koordinasi penyelesaian RPerpres RIDPN Flores Extension 7. Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 8. Tata Batas Lanjutan dan Reboisasi Lahan Pengganti di Ngada (+526,49 Hektar) 9. Pembangunan Pagar Keliling Kawasan	80,000	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.3 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Unit	3	Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Perencanaan dan Pembangunan UMKM Kiosk dan Eco Factory Outlet 2. Perencanaan dan Pembangunan Bangunan Utilitas dan Halte Shuttle 3. Perencanaan dan Pembangunan Amphitheatre 4. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Ekologis Tahap II 5. Perencanaan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 6. Pembangunan Lanjutan TIC Kantor BPOLBF	10,000	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.4 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi pemberdayaan	1. Koordinasi & Sinkronisasi dengan Masyarakat (Desa Penyangga) Kawasan Otoritatif	400	Direktorat Destinasi
SK.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 4.1 Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	Kesepakatan	2	Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Promosi Investasi 2. Manajemen Investasi 3. Fasilitasi kemudahan perizinan	6,000	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.2 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	UMKM	30	Jumlah usaha pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	1. Floratama Academy 2. Pengelolaan unit usaha 3. Sertifikasi usaha	75,000	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.3 Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	1	Jumlah SDM yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas	1. Table Top Labuan Bajo supply demand	400	Direktorat Industri dan Kelembagaan

	IKSK 4.4 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	8	Jumlah kegiatan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan	1. Forum Stakeholder Floratama 2. Forum Wartawan	1,000	Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
Kegiatan 2: Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores							
SK.5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	IKSK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	93	Identifikasi perhitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Kedeputian dan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)	1. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi RENJA, DIPA & Deviasi Hall 3 DIPA 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi Penyerapan Anggaran, belanja kontraktual, GUP & TUP 3. Hasil Pelaksanaan Anggaran meliputi Capaian output Capaian Output, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan.		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
	IKSK 5.2 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	80	Mengambil data dari Hasil Evaluasi Implementasi AKIP oleh Kementerian PANRB	1. Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 2. Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP BPOLBF 4. Pelaporan Kinerja melalui aplikasi PERSI		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
	IKSK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Persentase	80	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang Telah Sesuai Rekomendasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi}} \times 100 \%$	1. Melakukan Pemantauan Evaluasi 2. Melaksanakan koordinasi dengan direktorat terkait dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. 3. Melakukan percepatan penyelesaian rekomendasi melalui penetapan target waktu penyelesaian.		Satuan Pemeriksa Internal
Kegiatan 3: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
SK.6 Meningkatnya Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Pariwisata	IKSK 6.1 Indeks Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Nilai	82.8	Nilai Indeks Kualitas Governance dihitung dengan pembagian 3 (tiga) komponen aktivitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, antara lain: Nilai SAKIP dengan bobot nilai 40 NKA dengan bobot nilai 20 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan bobot nilai 40 Dihitung dengan rumus : $(40 \times A/100) + (20 \times B/100) + (40 \times C/100)$ Keterangan : A = Nilai SAKIP Kedeputian B = NKA Kedeputian C = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Kedeputian	1. Kemitraan dengan Media 2. Pengelolaan Media Sosial 3. Layanan Informasi Publik		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik

5.3.5 Rincian Program Kerja dan Alokasi Anggaran BPOLBF Tahun 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target	Formula/Cara Menghitung	Turunan Program	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Penanggung jawab
Kegiatan 1: Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores							
SK1. Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	IKSK 1.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	4	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan mancanegara yang dilaksanakan	1. Pemasangan/ Kerjasama TIC Pasif Labuan Bajo Flores (2 Lokasi/ Mitra) 2. Sales Mission/ Tabletop Potensial Labuan Bajo Flores 3. Wisata Pengenalan (Familiarization Trip) Kolaborasi (1 Wisata Pengenalan)	1,000	Direktorat Pemasaran
	IKSK 1.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	3	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	4. Event Budaya di Parapuar 5. Event Wisata Olahraga di Parapuar 6. Event Kuliner di Parapuar	4,000	Direktorat Pemasaran
SK.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 2.1. Jumlah Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Promosi	4	Jumlah kegiatan promosi pemasaran segmen wisatawan nusantara yang dilaksanakan	1. Pemasangan/ Kerjasama TIC Pasif Labuan Bajo Flores 2. Sales Mission/ Tabletop Potensial Labuan Bajo Flores 3. Wisata Pengenalan (Familiarization Trip) Tematik Flores	1,000	Direktorat Pemasaran
	IKSK 2.2. Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	4	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	1. Picnic Over the Hill of Parapuar v8 2. Festival Kuliner di Parapuar 3. Event Olahraga di Parapuar 4. Event Budaya di Parapuar	4,000	Direktorat Pemasaran
SK.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 3.1 Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	Unit	5	Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik wisata yang telah dibangun di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Perencanaan dan Pembangunan Edu Child Friendly Playground (RBRA) 2. Perencanaan dan Pembangunan NTT, Flores, Manggarai and Bajo Cultural Centre, Etno Eco Museum 3. Perencanaan dan Penataan Long Trakking (Klaster D sampai Klaster K) 4. Perencanaan dan Pembangunan Natural Reserve Park Center 5. Penataan Eco Forest Healing and Regenerative Tourism Centre	12,000	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.2 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Km/hektar/wilayah	5	1. Identifikasi pengembangan aksesibilitas tahun berjalan (a) 2. Identifikasi pengembangan infrastruktur tahun berjalan (b) 3. Jumlah: a + b	1. Pembangunan Jalan Dalam Kawasan 2. Perencanaan dan Pembangunan Water Catchment Area 3. Pembangunan Lanjutan Pagar Keliling Kawasan 4. Pembangunan Sistem Jaringan Kelistrikan tahap III 5. Tata Batas Lanjutan dan Reboisasi Lahan Pengganti di Ngada (+524,49 Hektar) 6. Proses Legalisasi Kawasan Otoritatif 265,42 Hektar 7. Finalisasi Dokumen Reviu Masterplan Kawasan Otoritatif BPOLBF (+ 265,42 Hektar)	120,000	Direktorat Destinasi
	IKSK 3.3 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan	Unit	4	Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) 2. Perencanaan dan Pembangunan Eco Mice	12,000	Direktorat Destinasi

	Bajo Flores				3. Perencanaan dan Pembangunan Eco Creative Hub 4. Perencanaan dan Pembangunan Eco Service Building (BOH) 5. Pembangunan Lanjutan TIC Kantor BPOLBF		
	IKSK 3.4 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	2	Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi pemberdayaan	1. Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat Desa Penyangga Wilayah Kawasan Otoritatif 2. Monev Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Otoritatif dan Koordinatif	400	Direktorat Destinasi
SK.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores	IKSK 4.1 Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo	Kesepakatan	2	Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Zona Otoritatif Labuan Bajo Flores	1. Promosi Investasi 2. Manajemen Investasi 3. Fasilitasi kemudahan perizinan	6,000	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.2 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	UMKM	30	Jumlah usaha pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	1. Forum alumni Floratama Academy 2. Floratama Academy 3. Pengelolaan unit usaha	75,000	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.3 Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	2	Jumlah SDM yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas	1. Forum stakeholder FLORATAMA 2. Program "Farm to Table Experience" Menggabungkan petani, pelaku kuliner, dan chef dalam satu pengalaman wisata—mulai dari panen bahan hingga penyajian. Selain peningkatan kapasitas, ini juga jadi produk wisata bernilai tinggi	400	Direktorat Industri dan Kelembagaan
	IKSK 4.4 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Kegiatan	9	Jumlah kegiatan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan	1. Forum Stakeholder 2. Forum Wartawan	1,000	Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
Kegiatan 2: Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores							
SK.5 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	IKSK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	93.5	Identifikasi perhitungan hasil Nilai Kinerja Anggaran Kedeputan dan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)	1. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi RENJA, DIPA & Deviasi Hall 3 DIPA 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi Penyerapan Anggaran, belanja kontraktual, GUP & TUP 3. Hasil Pelaksanaan Anggaran meliputi Capaian output Capaian Output, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan.		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
	IKSK 5.2 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Indeks	83	Mengambil data dari Hasil Evaluasi Implementasi AKIP oleh Kementerian PANRB	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 2. Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP BPOLBF 4. Pelaporan Kinerja melalui aplikasi PERSI		Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
	IKSK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Presentase	80	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang Telah Sesuai Rekomendasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi}} \times 100 \%$	1. Melakukan Pemantauan Evaluasi 2. Melaksanakan koordinasi dengan direktorat terkait dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. 3. Melakukan percepatan penyelesaian rekomendasi melalui penetapan target waktu penyelesaian.		Satuan Pemeriksa Internal

Kegiatan 3: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SK.6 Meningkatnya Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Pariwisata	IKSK 6.1 Indeks Kualitas Governance Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Nilai	84.2	Nilai Indeks Kualitas Governance dihitung dengan pembagian 3 (tiga) komponen aktivitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, antara lain: Nilai SAKIP dengan bobot nilai 40 NKA dengan bobot nilai 20 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan bobot nilai 40 Dihitung dengan rumus : $(40 \times A/100) + (20 \times B/100) + (40 \times C/100)$ Keterangan : A = Nilai SAKIP Kedeputian B = NKA Kedeputian C = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Kedeputian	1. Kemitraan dengan Media 2. Pengelolaan Media Sosial 3. Layanan Informasi Publik	Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik
---	--	-------	------	---	--	---

5.4 Matriks Kerangka Regulasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Direktorat Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	- Perubahan dinamika Kebijakan Nasional dan Arah Pengembangan Destinasi Pariwisata - Kebutuhan penguatan kewenangan BPOLBF dalam pengelolaan kawasan, khususnya terkait skema penguasaan lahan, percepatan legalisasi kawasan, serta fleksibilitas dalam pengelolaan aset dan kerja sama investasi - Kebutuhan penguatan model kelembagaan berbasis Badan Layanan Umum (BLU)	Seluruh Direktorat		2026
2.	Revisi PMK 99 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan BLU BPOLBF	- Terjadi penambahan aset, fasilitas, dan jenis layanan di Kawasan Otoritatif Parapuar yang belum diakomodasi dalam PMK Nomor 99 Tahun 2023, sehingga diperlukan dasar hukum pemungutan tarif baru. - PMK Nomor 99 Tahun 2023 belum mengakomodasi model bisnis BPOLBF sebagai Destination Management	KUKP		2028

		Organization, yang kini mencakup pengelolaan kawasan, penyelenggaraan event, layanan utilitas, dan pemanfaatan aset secara komersial. - Revisi PMK diperlukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan BLU melalui optimalisasi PNBP BLU, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor, mitra kerja sama, dan pengguna layanan.			
3.	Revisi Perdirut BPOLBF NO 02/XI/2023, Kriteria, Besaran Tarif & tata cara penetapan tarif layanan BLU BPOLBF	- Tarif perlu diperbarui agar tetap kompetitif dan relevan dengan perkembangan harga pasar, daya beli, serta tren industri pariwisata dan jasa - Pengembangan unit bisnis atau layanan baru (misalnya pemanfaatan kawasan, event, fasilitas wisata) memerlukan penetapan tarif yang belum diatur sebelumnya. - Mengoptimalkan pendapatan layanan (PNBP BLU) sehingga dapat mendukung pembiayaan operasional, pemeliharaan aset, dan pengembangan kawasan secara berkelanjutan.	IKP & KUKP		2026
4.	Perpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Komodo - Labuan Bajo 2024-2044	Pedoman bagi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah pada DPN Labuan Bajo dalam menyelenggarakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kepariwisata secara terpadu dan tetap memperhatikan cakupan wilayah yang tertuang dalam RIDPN (Extention)	Destinasi	• Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Pariwisata	2026
5.	Rencana Strategi Bisnis 2026 - 2030 BPOLBF	- Pembaharuan Pedoman arah pengembangan kawasan dan pengelolaan bisnis BLU secara terukur, adaptif, dan berkelanjutan - Optimalisasi pemanfaatan aset kawasan	IKP		2026

		Parapuar - Menetapkan strategi yang lebih terarah dalam menarik investor dan pembukaan unit bisnis baru di dalam kawasan otorita			
6.	Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Komodo - Labuan Bajo 2024-2044 (Extention)	- Sebagai arah pembangunan pariwisata terpadu yang tidak hanya berfokus pada DPN Labuan Bajo, tetapi juga mendorong pengembangan Flores secara keseluruhan. - Menciptakan pemerataan manfaat pariwisata antar wilayah di Flores secara keseluruhan, memperkuat konektivitas destinasi, serta mengintegrasikan potensi pariwisata dalam satu sistem pengembangan kawasan yang berkelanjutan.	Destinasi	- Kementerian PPN/Bappenas - Kementerian Pariwisata	2028

5.5 Matriks Pendanaan Hibah Luar Negeri BPOLBF

A. Komponen 2 : Infrastruktur dan Layanan Pariwisata

No	Program	Target Output	Feasibility Study (FS)	Detail Engineering Design (DED)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Usulan Anggaran		Tahun Pelaksanaan
							Rp	USD	
	Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores						Rp. 132.350.134.000	7.996.987	
1.	Pembangunan Jalan dalam Kawasan: (Jalan Kolektor 330 Meter, Jalan Lokal: 5,262 Meter) dan Penerangan Jalan Umum (PJU)	5,592 Meter, 62 Unit PJU	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 102.693.190.000	6.205.027	2028

2.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5,73 liter/detik	Tidak Ada	Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 10,164,944,000	614,196	2027
3.	Pembangunan Pagar Pengaman Kawasan	5,7 Km	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 7,850,000,000	474.320	2027
4.	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	1 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 5,000,000,000	302.115	2028
5.	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	20 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 6,642,000,000	401,329	2028
Usulan Tambahan Pengembangan Atraksi Wisata di Kawasan Parapuar							Rp. 198.404.796.997	11.337.417	
6.	Kios UMKM dan <i>Factory Outlet</i>	3 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 23.532.900.803	1.344.223	2028
7.	NTT, Flores, Manggarai dan Bajo <i>Cultural Centre</i>	1 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 96.999.839.093	5.542.848	2028

8.	<i>Edu Traditional Cultural Village with Etno Outdoor Theater</i>	1 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 77.881.057.101	4.450.346	2027
----	---	--------	-----------	-----------	----------------------	---------------------	--------------------	-----------	------

Keterangan:

- 1.Kurs 1 USD : Rp 16.550,-
- 2.Usulan masih membutuhkan penajaman kembali oleh Kementerian Pariwisata
3. Data usulan per September 2026

B. Komponen 4 : Fasilitas Investasi

No	Program	Target Output	Feasibility Study (FS)	Detail Engineering Design (DED)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Usulan Anggaran		Tahun Pelaksanaan
							Rp	USD	
	Fasilitas Investasi Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores						Rp. 132.350.134.000	7.996.987	
PROMOSI INVESTASI									
1.	Penyusunan Roadmap Investasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 1.450.000.000	USD. 82.809	2027

2.	Penyiapan Bahan Promosi Investasi Kawasan Parapuar	3 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 1.350.000.000	77.098	2027-2029
3.	Penyusunan Investment Proposal Ready to Offer untuk 10 Klaster Kawasan Parapuar	4 dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 4.200.000.000	239.862	2027-2030
4.	Partisipasi dalam Forum Investasi	4 Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Rp. 1.400.000.000	79.954	2027-2030
Managemen Investasi									
	Pelaksanaan Pemilihan Mitra Investasi di Kawasan Parapuar	4 dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	1.400.000.000	79.954	2027-2030
	Penilaian Tarif dan Penyusunan Dokumen Mou dan PKS/Kontrak	4 dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	2.800.000.000	159.908	2027-2030
Kemitraan Pemerintah dan Swasta									

	Percepatan Perizinan Investasi di Kawasan Parapuar	4 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	1.200.000.000	68.532	2027-2030
--	--	-----------	-----------	-----------	-------------------------	------------------------	---------------	--------	-----------

Keterangan:

- 1.Kurs 1 USD : Rp 16.550,-
- 2.Usulan masih membutuhkan penajaman kembali oleh Kementerian Pariwisata
3. Data usulan per September 2026